

**SISTEM KEPEMIMPINAN PAGUYUBAN PETANI LAHAN PANTAI
KULON PROGO DALAM BENTUK GERAKAN SOSIAL BARU**

**IDAH FAUJIATI ROSIDAH
I34100123**



**DEPARTEMEN SAINS KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT
FAKULTAS EKOLOGI MANUSIA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
2014**

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi berjudul Sistem Kepemimpinan Paguyuban Petani Lahan Pantai Kulon Progo dalam Bentuk Gerakan Sosial Baru adalah benar karya penulis dengan arahan dari Dosen Pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini. Dengan ini penulis melimpahkan hak cipta dari karya tulis penulis kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, Juli 2014

Idah Faujiati Rosidah
NIM I34100123

ABSTRAK

IDAHA FAUJIATI ROSIDAH. Sistem Kepemimpinan Paguyuban Petani Lahan Pantai Kulon Progo dalam Bentuk Gerakan Sosial Baru. Dibimbing oleh **FREDIAN TONNY NASDIAN**

Salah satu bentuk dari perubahan berencana adalah pembangunan. Pembangunan yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat ini pun bisa mendapatkan penolakan dari masyarakat itu sendiri yang terkena rencana pembangunan dalam penelitian ini adalah rencana pertambangan pasir besi di Kulon Progo. Masyarakat menolak dan membentuk organisasi gerakan sosial yang dinamakan Paguyuban Petani Lahan Pantai Kulon Progo (PPLP-KP) yang terdiri dari enam desa terkena rencana pertambangan. Penelitian ini menganalisis paguyuban petani lahan pantai tersebut beserta dengan peran kepemimpinannya dan tingkat pengetahuannya, kemudian menganalisis karakteristik dari gerakan sosial yang dilakukan oleh paguyuban tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey yang disertai dengan observasi dan wawancara mendalam pada petani yang termasuk dalam paguyuban di Desa Garongan, Pleret dan Bugel. Hasil dari penelitian ini adalah paguyuban ini merupakan organisasi mandiri yang tidak bergabung dengan pemerintah maupun LSM dan menjadi faktor penting dalam mengisi perjuangan dan peningkatan ekonomi petani. peran kepemimpinan diisi oleh kordinator lapang dengan tingkat pengetahuan mereka yang tinggi sehingga dapat mekaskanakan peran kepemimpinan yang tinggi, sehingga semakin tinggi tingkat pengetahuan pemimpin maka semakin tinggi peran yang dijalankan pemimpinnya. PPLP ini juga memiliki karakteristik gerakan sosial baru sehingga PPLP ini merupakan organisasi yang termasuk dalam gerakan sosial baru.

Kata kunci : Gerakan sosial, Peran Kepemimpinan, Pengetahuan Pemimpin
Pertambangan

ABSTRACT

IDAHA FAUJIATI ROSIDAH. *Leadership Systems Land Coastal Farmers Association of Kulon Progo in New Forms of Social Movement. Spervised by FREDIAN TONNY NASDIAN*

One of the plan changes is the development. Development purposed at the welfare of the people can get it's own rejection of the affected community development plans in this study were iron sand mining plan in Kulon Progo. Society refuses to form a social movement organization called Land Coastal Farmers Association of Kulon Progo (PPLP-KP) which is composed of six villages affected by the mining plan. This study analyzed the association of farmers land along the coast with his leadership role and level of knowledge, then analyze the characteristics of social movements performed by the community. The method used in this study is a survey method along with observation and in-depth interviews were included in the association of farmers in the village Garongan, Pleret and Bugel. Results of this study was the association is an independent organization that is not joined with the government and NGOs and is an important factor in the struggle to fill and improving the welfare of farmers. leadership role is filled by a field coordinator with their high level of knowledge, it also has characteristics PPLP new social movements that PPLP this is an organization that is included in the new social movements.

Keywords: New Social Movements, Role of Leadership, Mining

**SISTEM KEPEMIMPINAN PAGUYUBAN PETANI LAHAN PANTAI
KULON PROGO DALAM BENTUK GERAKAN SOSIAL BARU**

IDAH FAUJIATI ROSIDAH

Skripsi
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat
pada
Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat

**DEPARTEMEN SAINS KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT
FAKULTAS EKOLOGI MANUSIA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
2014**

Judul Skripsi : Sistem Kepemimpinan Paguyuban Petani Lahan Pantai
Kulon Progo sebagai Bentuk Gerakan Sosial Baru
Nama : Idah Faujiati Rosidah
NIM : I34100123

Disetujui oleh

Ir Fredian Tonny Nasdian, MS
Dosen Pembimbing

Diketahui oleh

Dr Ir Siti Amanah, M.Sc
Ketua Departemen
Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat

Tanggal Lulus : _____

PRAKATA

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga karya ilmiah ini bisa diselesaikan. Tema yang diambil dalam penelitian kali ini adalah kepemimpinan dan gerakan sosial dengan judul “Sistem Kepemimpinan Paguyuban Petani Lahan Pantai Kulon Progo sebagai Bentuk Gerakan Sosial Baru”.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan-bantuan moril dan material dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang terlibat. Pertama, ucapan terima kasih penulis kepada Bapak Ir. Fredian Tonny Nasdian, MS selaku dosen pembimbing yang telah memberikan waktu, tenaga, bimbingan, arahan, saran, dan kritik yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada orang tua tercinta, Bapak Ali Syahbana dan Ibu Aisyah, yang selalu melimpahkan kasih sayang, doa, serta motivasi kepada penulis. Tidak lupa terima kasih juga penulis sampaikan kepada teman-teman SKPM angkatan 47, sahabat terdekat dan terkasih penulis yang selalu memberi semangat dan masukan untuk penulis dalam penulisan skripsi ini. Tidak lupa penulis sampaikan terimakasih kepada keluarga CSS MoRA IPB khususnya angkatan 47 yang telah menjadi keluarga baru sejak penulis menjadi mahasiswa di kampus IPB, Terimakasih kepada Kementrian Agama yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril maupun materil selama penulis menuntut ilmu. Rasa terima kasih juga penulis sampaikan kepada seluruh pihak di Desa Garongan, Pleret, dan Bugel Kec.Panjatan Kab. Kulon Progo yang sudah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak.

Bogor, Juli 2014

Idah Faujiati Rosidah

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
PENDAHULUAN	1
Latar Belakang	1
Rumusan Masalah	3
Tujuan Penelitian	5
Kegunaan Penelitian	5
PENDEKATAN TEORITIS	7
Tinjauan Pustaka	7
Paguyuban	7
Perubahan Berencana	8
Gerakan Sosial Baru	8
Pemimpin	10
Tingkat Pengetahuan Pemimpin	11
Peran Kepemimpinan	11
Kerangka Pemikiran	13
Hipotesis Penelitian	15
Definisi Operasional	15
PENDEKATAN LAPANG	17
Metode penelitian	17
Lokasi dan waktu	17
Teknik Sampling	18
Teknik Pengumpulan Data	18
Teknik Pengolahan dan Analisis Data	18
KEADAAN UMUM LOKASI PENELITIAN	19
Kondisi Geografis	19
Kondisi Ekonomi	20
Kondisi Sosial	22
PROFIL PAGUYUBAN PETANI LAHAN PANTAI KULON PROGO (PPLP – KP)	25
KARAKTERISTIK GERAKAN SOSIAL BARU DALAM GERAKAN SOSIAL PAGUYUBAN PETANI LAHAN PANTAI	33

KEPEMIMPINAN DAN PERAN KEPEMIMPINAN DALAM PAGUYUBAN PETANI LAHAN PANTAI KULON PROGO	41
Kepemimpinan Paguyuban Petani Lahan Pantai Kulon Progo	41
Peran Kepemimpinan dalam Paguyuban Petani Lahan Pantai	43
TINGKAT PENGETAHUAN PEMIMPIN DALAM GERAKAN SOSIAL	47
HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN DAN PERAN KEPEMIMPINAN DALAM PAGUYUBAN PETANI LAHAN PANTAI	51
SIMPULAN DAN SARAN	53
Simpulan	53
Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	55
RIWAYAT HIDUP	77

DAFTAR TABEL

1. Jadwal kegiatan penelitian	15
2. Jumlah penduduk Kecamatan Panjatan menurut Desa dan jenis kelamin Tahun 2010	17
3. Jumlah dan persentasi anggota PPLP menurut karakteristik gerakan sosial baru dan pernyataan ya atau tidak	31
4. Jumlah dan persentasi anggota PPLP menurut tingkat pengetahuan pemimpin dan pernyataan ya atau tidak	32
5. Jumlah dan persentasi anggota PPLP menurut peran kepemimpinan dan pernyataan ya atau tidak	40
6. Jumlah dan presentasi anggota PPLP menurut tingkat pengetahuan pemimpin dan peran kepemimpinan paguyuban petani lahan pantai	47
7. Hubungan antara tingkat pengetahuan dan peran kepemimpinan di PPLP berdasarkan Uji Statistik <i>Chi-Square</i>	48

DAFTAR GAMBAR

1. Kerangka pemikiran	12
2. Grafik sebaran frekuensi tingkat pengetahuan pemimpin	43

DAFTAR LAMPIRAN

1. Peta lokasi penelitian	57
2. Kuesioner	58
3. Panduan pertanyaan penelitian	61
4. Hasil uji statistik <i>Chi Square</i>	63
5. Profil paguyuban petani lahan pantai Kulon Progo	64
6. Gerakan sosial paguyuban petani lahan pantai	70
7. Peran kepemimpinan dan pengetahuannya dalam gerakan	74

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki banyak pulau dan ditinggali oleh 237 641 326 jiwa (BPS 2010) serta tersebar di berbagai provinsi baik di daerah perkotaan dan pedesaan. Lebih dari 50 persen penduduk Indonesia tinggal di pedesaan tepatnya 119 321 070 jiwa dan sebagian dari mereka bermatapencaharian sebagai petani. Para petani di pedesaan ini masih mengandalkan sektor pertanian sebagai ladang untuk meningkatkan pendapatan mereka. Mereka akan tetap berusaha demi meningkatkan taraf hidup mereka agar kesejahteraan mereka pun meningkat, baik berusaha di sektor *on-farm*, *off-farm*, maupun *non-farm*. Kulon Progo merupakan salah satu wilayah kabupaten di Yogyakarta yang memiliki lahan pantai yang subur. Lahan pantai tersebut digunakan para petani sebagai sumber nafkah atau mata pencaharian petani dalam bidang pertanian khususnya dalam menanam cabe rawit sehingga Kulon Progo menjadi pemasok cabe merah maupun cabe rawit di pasaran baik di Jawa maupun luar Jawa. Petani lahan pantai ini sudah lama memanfaatkan lahan ini sejak zaman nenek dan leluhur mereka, sejak lahan pantai ini masih tandus karena belum adanya teknologi yang dapat mengolah lahan pantai tersebut. Namun, lahan yang sejak lama dimanfaatkan dan diolah petani lokal ini diakui oleh pemerintah sebagai lahan yang termasuk milik Paku Alaman, sehingga di Kulon Progo ini terdapat adanya konflik sumberdaya khususnya tanah yang menjadi sumber konflik antara masyarakat dengan pemerintahan daerah seperti yang terjadi di Ternate.

Sauki dkk (2009) menyebutkan bahwa Perubahan-perubahan yang terjadi dalam proses Reformasi ternyata tidak dengan sendirinya mengubah pola-pola dasar penguasaan ekonomi-politik oleh kelompok-kelompok dominan. Di Kulon Progo, konflik dalam suasana desentralisasi ini muncul dalam perebutan penguasaan lahan pantai yang mengandung bijih besi, antara Raja dalam artian sebenarnya, yakni pihak Keraton Yogyakarta, Paku Alaman dan masyarakat pesisir Kulon Progo. Pihak Kerajaan ingin membuka pertambangan pasir besi di lahan ini. Bermula dari rencana proyek besar penambangan Pasir Besi oleh PT. Jogja Magansa Mining (JMM) yang saham utamanya dimiliki keluarga besar Keraton Yogyakarta dan Paku Alaman serta berkerjasama dengan PT Indomine Australia.

Rencana pertambangan pasir besi ini membangkitkan gerakan masyarakat petani lahan pantai untuk bersatu dan membentuk gerakan sosial yaitu gerakan petani yang dikenal dengan Paguyuban Petani Lahan Pantai-Kulon Progo (PPLP-KP). Para petani memperkuat diri agar tetap mempertahankan apa yang menjadi hak mereka dan berusaha tetap menjaga kelestarian sumberdaya alam yang mereka miliki. Dengan lahan pasir yang mereka miliki, kesejahteraan petani pun meningkat tanpa adanya berbagai bantuan dari pemerintah daerah. Jika lahan pantai itu direbut dari petani dan dijadikan sebagai pabrik pertambangan pasir besi maka kesejahteraan petani menurun dan ribuan petani akan kehilangan pekerjaannya. Oleh karena itu, petani merasakan pentingnya memperjuangkan hak mereka, beragam strategi perlawanan terhadap tambang pasir besi dikerahkan,

termasuk dalam hal ini kepemimpinan karena sebuah gerakan sosial tidak lepas dari adanya kepemimpinan.

Perlawanan yang dilakukan para petani PPLP ini dilakukan dengan berbagai strategi termasuk dengan sistem kepemimpinan. Mereka tidak memusatkan kepemimpinan hanya pada perseorangan saja, namun juga di beberapa orang dan bisa disebut dengan kepemimpinan parlementer atau presidium. Sistem kepemimpinana ini didukung oleh para petani yang tidak hanya memiliki kemampuan sebagai petani saja, namun mereka juga memiliki kemampuan untuk memperluas jaringan perlawanan mereka baik antara sesama petani yang memiliki nasib yang sama maupun dengan jaringan di luar petani bahkan internasional. Hal tersebut merupakan strategi dalam melakukan perlawanan terhadap pertambangan pasir besi yang didukung oleh peranan sistem kepemimpinan parlementer tersebut. Strategi yang dilakukan oleh petani PPLP ini tidak hanya melakukan aksi turun ke jalan seperti demo, tapi juga dengan kampanye lewat teater, membuat film, bahkan lukisan. Kampanye yang dilakukan pun tidak hanya menyuarakan isu pertanian tapi juga isu lingkungan, isu gender, kerusakan lingkungan bahkan mengenai analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) sehingga bisa disebut dengan gerakan sosial baru.

Gerakan sosial yang terbentuk merupakan respon dari masyarakat petani lahan pantai yang tergabung dalam paguyuban lahan pantai-Kulon Progo dalam menghadapi adanya rencana pertambangan pasir besi yang akan dilakukan pemerintah yang bekerjasama dengan pihak swasta yang merupakan sebuah perubahan berencana. Perubahan berencana adalah perubahan yang diperkirakan atau yang telah direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang hendak mengadakan perubahan di dalam masyarakat. Pertambangan pasir besi ini ditujukan untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui pengolahan sumberdaya dan termasuk ke dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.

Berdasarkan UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada pasal 78 ayat (1) dijelaskan mengenai pembangunan Desa. Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pembangunan yang dilakukan pemerintah ternyata tidak selalu memberikan dampak positif bagi masyarakat sehingga tidak mendapatkan dukungan dari masyarakat bahkan menimbulkan konflik antara masyarakat dengan pemerintah. Taib dkk (2010) menuturkan bahwa adanya pembangunan ini seharusnya bisa disambut baik dan mendukung pembangunan, namun kenyataannya masyarakat menentang secara terang-terangan karena adanya multiinterpretasi dan ketidakadaan pegangan bersama dari berbagai pihak tentang siapa yang berhak menguasai tanah dan sumberdaya alam.

Jika masyarakat tidak mendukung adanya pembangunan maka hal ini akan menimbulkan konflik khususnya konflik sumberdaya alam seperti halnya yang terjadi di Ternate Provinsi Maluku Utara. Konflik ini terjadi karena berkaitan dengan penggunaan tanah untuk pembangunan lapangan terbang Sultan Babullah dan menimbulkan munculnya gerakan agraria yang menggunakan strategi perubahan identitas perjuangan dari “petani” menjadi “masyarakat adat” sebagai strategi yang diharapkan mampu menjadi upaya untuk melakukan perubahan. Gerakan ini terjadi sebagai respons masyarakat terhadap adanya pembangunan yang bertujuan untuk mencapai perubahan yang merupakan bentuk perubahan sosial di masyarakat akibat adanya proses pembangunan tersebut.

Martono (2011) menyebutkan bahwa gerakan sosial dimaknai sebagai sebuah gerakan yang lahir dari sekelompok individu untuk memperjuangkan kepentingan, aspirasi atau menuntut adanya perubahan yang ditujukan oleh sekelompok tertentu, misalnya adalah pemerintah atau penguasa. Namun, gerakan sosial ini dapat berpihak sebagai yang pro maupun kontra dengan pemerintah. Sebagaimana halnya dalam buku Aji (2005) bahwa Serikat Petani Pasundan atau SPP merupakan sebuah lembaga yang menggabungkan berbagai bentuk kelompok petani yang menyuarakan keadilan atas apa yang terjadi pada tanah-tanah petani yang ada di tatar pasundan khususnya Garut, Tasikmalaya dan Ciamis. SPP ini berawal dari sebuah perjuangan mendapatkan tanah garapan untuk petani di Garut yang kemudian membentuk kelompok atau ikatan yang bertujuan mendapatkan kembali lahan garapan petani yang dikuasai PT Perhutani maupun pihak perkebunan.

SPP ini merupakan sebuah organisasi yang melakukan gerakan sosial untuk mendapatkan kembali lahan garapan petani, hal ini juga dipengaruhi oleh adanya pemimpin dan kepemimpinan dalam SPP ini yang mendorong adanya perubahan. Yulianto (2010) menyebutkan bahwa munculnya pemimpin dalam suatu kelompok terasa penting dalam membimbing proses kerjasama dalam pada suatu komunitas yang mengalami perubahan. Seperti halnya dalam kasus SPP di Garut, Kepemimpinan sangat mempengaruhi keberlangsungan perjuangan untuk melakukan perubahan. Kepemimpinan dalam gerakan sosial ini penting sebagai salah satu bentuk strategi gerakan sebagai respons masyarakat terhadap adanya perkebunan tersebut yang merupakan salah satu bentuk perubahan berencana. Hal ini memiliki beberapa kesamaan dengan petani lahan pantai di Kulon Progo. Oleh karena itu, menarik untuk dikaji **bagaimana sistem kepemimpinan yang diterapkan oleh petani lahan pantai di Kulon Progo dalam gerakan sosial baru?**

Rumusan Masalah

Adanya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan bentuk dari perubahan berencana. Perubahan berencana ini merupakan perubahan yang diperkirakan atau yang telah direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang hendak mengadakan perubahan di dalam masyarakat (Soekanto 2012). Perubahan tersebut terjadi di masyarakat dan dapat menimbulkan beberapa respons dari masyarakat lokal yang mengalaminya jika perubahan tersebut tidak sesuai dengan keinginan masyarakat atau hanya berdasarkan keputusan satu pihak, seperti

pemerintah maupun pihak lokal. Masyarakat yang menolak adanya perubahan tersebut melakukan perlawanan dengan membuat sebuah gerakan sosial. Masyarakat membentuk sebuah perkumpulan atau paguyuban petani lahan pantai atau yang dikenal dengan PPLP-KP (Paguyuban Petani Lahan Pantai-Kulon Progo). Oleh karena itu, penulis merasa penting untuk mengkaji **bagaimana profil paguyuban petani lahan pantai?**

Berbagai bentuk perlawanan sudah banyak dilakukan untuk melawan pembangunan pabrik pertambangan pasir besi di daerah pesisir tempat para petani mencari nafkah bagi keluarganya, sehingga para petani membuat sebuah strategi gerakan sosial untuk mempertahankan hak mereka. Perlawanan yang dilakukan para petani PPLP ini dilakukan dengan berbagai strategi dan gerakan sosial yang dilakukan oleh paguyuban ini tidak seperti gerakan petani biasanya, gerakan sosial yang dilakukan menunjukkan adanya beragam pembaruan sehingga menunjukkan karakteristik seperti karakteristik gerakan sosial baru. Oleh karena itu penting untuk mengkaji **bagaimana karakteristik dinamika gerakan sosial petani lahan pantai?**

Gerakan sosial ini juga tidak terlepas dari adanya pemimpin, sistem kepemimpinan ini didukung oleh para petani yang tidak hanya memiliki kemampuan sebagai petani saja, namun mereka juga memiliki kemampuan untuk memperluas jaringan perlawanan mereka baik antara sesama petani yang memiliki nasib yang sama maupun dengan jaringan di luar petani bahkan internasional. Hal tersebut merupakan strategi dalam melakukan perlawanan terhadap pertambangan pasir besi yang didukung oleh peranan sistem kepemimpinan parlementer tersebut. Oleh karena itu, perlu untuk mengkaji **bagaimana peran dari masing-masing pemimpin dalam sistem kepemimpinan tersebut?**

Selain peran kepemimpinan dalam gerakan sosial ini, pengetahuan dari pemimpin juga mempunyai pengaruh yang kuat dalam menghadapi rencana pertambangan karena pemimpin mempunyai peranan dalam menyampaikan informasi terkait dengan membuat strategi dalam menolak rencana pertambangan pasir besi. Oleh karena itu penting dalam penelitian ini mengkaji **bagaimana tingkat pengetahuan pemimpin dalam gerakan sosial?**

Kemampuan dan peranan pemimpin dalam memperluas jaringan ini termasuk kedalam ciri-ciri gerakan sosial pedesaan baru. Selain itu juga, strategi yang dilakukan oleh petani PPLP ini tidak hanya melakukan aksi turun ke jalan seperti demo, tapi juga dengan kampanye lewat teater, membuat film, bahkan lukisan. Kampanye yang dilakukan pun tidak hanya menyuarakan isu pertanian tapi juga isu lingkungan, isu gender, kerusakan lingkungan bahkan mengenai analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL). Hal ini juga dipengaruhi oleh adanya pengetahuan masyarakat PLPP dan peran kepemimpinan sehingga bisa disebut dengan gerakan sosial baru yang terlihat dari karakteristiknya. Oleh karena itu, perlu untuk mengkaji **sejauhmana hubungan tingkat pengetahuan pemimpin dengan peran kepemimpinan dalam gerakan sosial baru?**

Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan penelitian secara umum adalah untuk menganalisis sistem kepemimpinan yang diterapkan oleh paguyuban petani lahan pantai di Kulon Progo dalam gerakan sosial baru dan secara khusus bertujuan untuk

1. Mendeskripsikan profil paguyuban petani lahan pantai;
2. Menganalisis karakteristik dinamika gerakan sosial petani lahan pantai;
3. Menganalisis peran dari masing-masing pemimpin dalam sistem kepemimpinan tersebut;
4. Menganalisis tingkat pengetahuan pemimpin dalam gerakan sosial; dan
5. Menganalisis hubungan tingkat pengetahuan pemimpin dengan peran kepemimpinan dalam gerakan sosial baru

Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan kajian penelitian selanjutnya mengenai gerakan sosial maupun kajian mengenai kepemimpinan dalam gerakan sosial.
2. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan informasi dan wawasan mengenai sistem kepemimpinan dalam gerakan sosial sebagai bentuk perlawanan petani dari adanya isu pertambangan pasir besi dan menunjukkan bentuk perubahan berencana yang ada di masyarakat
3. Bagi pemerintah, penelitian ini dapat memberikan masukan berupa kritik dan saran kepada pemerintah sebagai penentu kebijakan agar lebih teliti dalam memberikan kebijakan yang terkait dengan pembangunan daerah dalam proses perubahan sosial yang direncanakan sehingga sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

PENDEKATAN TEORITIS

Tinjauan Pustaka

Paguyuban

Paguyuban atau *gemeinschaft* merupakan bentuk kehidupan bersama dimana anggota-anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni dan bersifat alamiah serta bersifat kekal. Dasar hubungan tersebut adalah rasa cinta, dan rasa kesatuan batin yang memang telah dikodratkan (Soekanto 2007). Di dalam paguyuban terdapat suatu kemauan bersama (*common will*), ada suatu pengertian (*understanding*) serta kaidah-kaidah yang timbul dengan sendirinya dari kelompok tersebut. Apabila terjadi pertentangan antara anggota suatu paguyuban, pertentangan tersebut tidak akan dapat diatasi dalam suatu hal saja. Hal ini disebabkan karena adanya hubungan yang menyeluruh antara anggota-anggotanya. Tak mungkin suatu pertentangan yang kecil diatasi karena pertentangan tersebut akan menjalar ke bidang-bidang lainnya (Soekanto 2007). Menurut Tonnies seperti yang dikutip Soekanto (2007) mengatakan bahwa suatu paguyuban mempunyai beberapa ciri pokok, yaitu sebagai berikut:

1. *Intimate*, yaitu hubungan menyeluruh yang mesra
2. *Private*, yaitu hubungan yang bersifat pribadi, khusus untuk beberapa orang saja
3. *Exclusive*, hubungan tersebut hanya,ah untuk “kita” saja dan tidak untuk orang ;ain di luar “kita”

Paguyuban ini memiliki perbedaan dengan patembayan atau seperti yang diungkapkan Tonnies seperti yang dikutip Soekanto (2007) dengan *gesellschaft*, yaitu ikatan lahir yang bersifat pokok dan biasanya untuk jangka waktu pendek. Ia bersifat sebagai suatu bentuk dalam pikiran belaka. Selanjutnya Tonnies seperti yang dikutip Soekanto (2007) menyatakan bahwa terdapat tiga tipe paguyuban yaitu:

1. Paguyuban karena ikatan darah (*gemeinschaft by blood*) yaitu paguyuban yang merupakan ikatan yang didasarkan pada ikatan darah atau keturunan, contoh: keluarga, kelompok kekerabatan
2. Paguyuban karena tempat (*gemeinschaft of place*) yaitu paguyuban yang terdiri dari orang-orang yang berdekatan tempat tinggal sehingga dapat saling tolong-menolong, contoh: rukun tetangga, rukun warga
3. Paguyuban karena jiwa pikiran (*gemeinschaft of mid*) yang merupakan suatu paguyuban yang terdiri dari orang-orang yang walaupun tak mempunyai hubungan darah ataupun tempat tinggalnya tidak berdekatan, tetapi mereka mempunyai jiwa dan pikiran yang sama, ideologi yang sama. Paguyuban semacam ini biasanya ikatannya tidak sekuat paguyuban karena darah atau keturunan.

Perubahan Berencana

Perubahan berencana adalah perubahan yang diperkirakan atau yang telah direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang hendak mengadakan perubahan di dalam masyarakat (Soekanto (2012) dikutip dari Selo Soemardjan). Suatu perubahan yang dikehendaki dapat timbul sebagai reaksi (yang direncanakan) terhadap perubahan-perubahan dan kebudayaan yang terjadi sebelumnya, baik yang merupakan perubahan yang dikehendaki maupun yang tidak dikehendaki. Abdulsyani (2012) mengemukakan bahwa perubahan yang direncanakan, paling baik dilakukan pada masyarakat yang memang sebelumnya sudah mempunyai keinginan untuk mengadakan perubahan, tetapi tidak mampu melakukannya. Dalam kondisi demikian, masyarakat akan serta merta menerima perubahan yang dilakukan oleh para *agent of change* yang dirasakan sesuai dengan kehendak masyarakat yang bersangkutan.

Selain itu, Abdulsyani (2012) menambahkan bahwa akan lebih baik lagi apabila sebelum perencanaan dilaksanakan, *agent of change* terlebih dahulu melakukan pengamatan terhadap masyarakat sasaran perubahan untuk mengetahui kehendak dan harapan mereka, baru kemudian disesuaikan dengan perencanaan yang sudah ada. Perubahan yang direncanakan dengan terlebih dahulu mengetahui kehendak dan harapan masyarakat terhadap perubahan selanjutnya, dapat pula merupakan rencana perubahan terhadap hasil-hasil perubahan sebelumnya yang tidak menguntungkan pihak masyarakat.

Perubahan berencana atau perubahan yang direncanakan ini bertujuan untuk merubah kondisi sebelumnya salah satunya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Namun, perubahan yang akan dilakukan harus disesuaikan juga dengan kondisi masyarakatnya, mungkin bisa saja masyarakat tidak membutuhkan perubahan tersebut. Jika masyarakat tidak menginginkan perubahan yang telah direncanakan atau menolak adanya perubahan maka akan mendapatkan respon yang negatif dan masyarakat akan melakukan pertentangan maupun pembeontakan.

Gerakan Sosial Baru

Gerakan sosial memiliki banyak definisi dari berbagai ahli. Menurut Sunarto yang dikutip oleh Martono (2011) menyatakan bahwa gerakan sosial pada hakikatnya merupakan hasil perilaku kolektif, yaitu suatu perilaku yang dilakukan bersama-sama oleh sejumlah orang yang tidak bersifat rutin dan perilaku mereka merupakan hasil tanggapan atau respons terhadap rangsangan tertentu. Gerakan sosial sifatnya lebih terorganisir dan lebih memiliki tujuan dan kepentingan bersama dibandingkan perilaku kolektif. Perilaku kolektif dapat terjadi secara spontan, namun gerakan sosial memerlukan sebuah proses pengorganisasian massa. Martono (2011) melanjutkan bahwa gerakan sosial dimaknai sebagai sebuah gerakan yang lahir dari sekelompok individu untuk memperjuangkan kepentingan, aspirasi atau menuntut adanya perubahan yang ditujukan oleh sekelompok tertentu, misalnya adalah pemerintah atau penguasa. Namun, gerakan sosial ini dapat berpihak sebagai yang pro maupun kontra dengan pemerintah.

Sztompka (2011) menyebutkan bahwa dalam mendefinisikan gerakan sosial ini harus terdiri dari beberapa komponen seperti (1) kolektivitas orang yang

bertindak bersama, (2) tujuan bersama tindakannya adalah perubahan tertentu dalam masyarakat mereka yang ditetapkan partisipan menurut cara yang sama, (3) kolektivitasnya relatif tersebar namun lebih rendah derajatnya daripada organisasi formal, dan (4) tindakannya mempunyai derajat spontanitas relatif tinggi namun tak terlembaga dan bentuknya tak konvensional. Jadi, Sztompka (2004) memberikan kesimpulan bahwa gerakan sosial adalah tindakan kolektif yang diorganisir secara longgar, tanpa cara terlembaga untuk menghasilkan perubahan dalam masyarakat.

Sztompka (2011) dan Martono (2011) ini menjelaskan bahwa gerakan sosial merupakan tindakan kolektif yang terorganisir namun tidak sama dengan lembaga. Gerakan sosial merupakan tindakan kolektif yang terorganisir secara longgar untuk menghasilkan perubahan yang diinginkan dalam masyarakat. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa gerakan sosial ini juga bukan hanya mendorong adanya perubahan tapi juga sebagai dampak dari adanya perubahan sosial baik yang dikehendaki maupun yang tidak dikehendaki. Gerakan sosial pun muncul karena adanya ketidaknyamanan, kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang terjadi di masyarakat.

Salah satu bentuk gerakan sosial adalah gerakan sosial baru (GSB) atau gerakan sosial pedesaan baru. Menurut Putra seperti yang dikutip Martono (2011) GSB muncul pada dekade 1960 sampai 1970-an di Amerika dan Eropa. GSB lahir untuk mengoreksi prinsip-prinsip, strategi, aksi serta pilihan ideologi yang digunakan gerakan sosial di masa sebelumnya. GSB secara tidak langsung merupakan dinamika fenomena gerakan sosial itu sendiri. Menurut Fauzi (2005) ciri-ciri gerakan sosial pedesaan baru:

1. Basis sosial gerakan adalah campuran antara unsur desa-kota, baik dalam arti fisik maupun dalam berbagai urat nadi, organ dan kegiatan gerakan;
2. Kepemimpinan diisi oleh orang-orang dengan kemampuan intelektual yang mencengangkan, yang mampu menganalisa kombinasi hubungan yang relatif kompleks dari gejala lokal ke global, mikro ke makro, dan sebaliknya;
3. Taktik-taktik utamanya sangat beragam dan mengisi banyak arena pertarungan;
4. Posisi strategisnya umumnya “otonom” dari partai politik dan negara, tetapi memiliki kombinasi hubungan yang khas dengan ragam kekuatan gerakan sosial di sektor lain; dan
5. Ideologinya tidak hanya menjawab diskriminasi kelas sosial, tetapi juga untuk menghadapi perkara identitas (ras/etnis/kebudayaan), ekologi dan gender;
6. Daya jelajahnya kosmopolitan, yang utamanya ditandai oleh pembangunan solidaritas dan aksi global

Kepemimpinan

Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain, yaitu yang dipimpin atau pengikut-pengikutnya. Sehingga orang lain tersebut bertindak laku sebagaimana dikehendaki oleh pemimpin tersebut. Kepemimpinan merupakan hasil organisasi sosial yang telah terbentuk atau sebagai hasil dinamika interaksi sosial. Sejak mulai terbentuknya suatu kelompok sosial, seseorang atau beberapa orang di antara warga-warganya melakukan peranan yang lebih aktif daripada rekan-rekannya, sehingga orang tadi atau beberapa orang tampak lebih

menonjol dari yang lainnya. Munculnya seorang pemimpin sangat diperlukan dalam keadaan-keadaan dimana tujuan kelompok sosial yang bersangkutan terhalang atau apabila kelompok tadi mengalami ancaman dari luar (Soekanto 2003).

Definisi kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi orang lain, hal ini juga sama dengan apa yang diungkapkan oleh Wiriadihardja (1987) namun lebih menekankan pada kegiatan kelompok untuk menentukan tujuan bersama, beliau mengatakan bahwa kepemimpinan adalah proses mempengaruhi kegiatan kelompok, menuju ke arah penentuan tujuan dan mencapai tujuan. Menurut Prof. F.P. Brassor seperti yang dikutip Wiriadihardja (1987) memberi definisi kepemimpinan adalah proses dimana seorang pelaksana memberi petunjuk pengarahan, pembinaan atau mempengaruhi pekerjaan orang lain agar memilih ingin mencapai maksud dan tujuan tertentu. Jadi pada hakikatnya esensi kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi orang lain apakah dia pegawai bawahan, rekan sekerja atau atasan, adanya pengikut yang dapat dipengaruhi baik oleh ajakan, anjuran, bujukan, sugesti, perintah, saran atau bentuk lainnya, dan adanya tujuan yang hendak dicapai.

Konsep kepemimpinan ini didefinisikan berbeda oleh Soekanto (2012) dan Wiriadihardja (1987), walaupun sama-sama menunjukkan proses mempengaruhi orang lain, tapi wiriadihardja menambahkan adanya tujuan dan mencapai tujuan. Oleh karena itu, kepemimpinan merupakan proses mempengaruhi orang lain atau orang yang dipimpin baik perorangan maupun kelompok dan mengarahkan pada pencapaian tujuan. Selain itu, kepemimpinan ini merupakan kemampuan dari seorang pemimpin yang sedang menjalankan tugasnya dalam mengarahkan anggotanya, kelompoknya atau pengikutnya untuk mencapai tujuan bersama baik melalui anjuran, ajakan, sugesti, atau perintah.

Pemimpin

Alfian (2009) menjelaskan mengenai pemimpin secara ringkas, pemimpin itu leader. To lead berarti memimpin. Leading berarti memimpin di depan (sebagai juara), meninggalkan yang lain dalam sebuah kompetisi. Pemimpin adalah orang yang memenuhi kualifikasi kepemimpinan. Menurut Dwight D. Eisenhower (seperti dikutip oleh Alfian (2009)), kepemimpinan adalah seni atau kemampuan mengajak orang lain untuk melakukan apa yang anda inginkan karena ia ingin melakukannya. Kemudian menambahkan, pemimpin itu manusia optimis, penggerak, motivator, ia dinamis, bukan statis.

Getol (2010) menyatakan bahwa pemimpin itu adalah orang yang memiliki kemampuan lebih. Untuk dapat mempengaruhi orang banyak maka pemimpin harus memiliki pengetahuan yang lebih tinggi dan luas tentang berbagai hal. Pemimpin juga dituntut memahami kebutuhan kelompok. Dengan demikian pemimpin dapat memotivasi kelompok untuk mengejar kebutuhannya tersebut. pemimpin harus dapat memberikan contoh-contoh atau teladan dalam bekerja. Kelompok bisa belajar dari dirinya akan berbagai keterampilan dan akhirnya dapat mengakuinya sebagai pemimpin. Pemimpin juga harus memiliki wawasan yang luas dan memiliki perspektif ke depan sehingga bisa melihat kesempatan apa saja untuk kelompoknya.

Pemimpin dengan pengetahuan dan kemampuannya berusaha mencari berbagai alternatif pemecahan masalah.

Pemimpin adalah seseorang yang memiliki visi tentang masa depan, dengan visinya ini dia berusaha memengaruhi orang lain agar bersedia bergabung dengan dirinya. Misinya adalah memperjuangkan terwujudnya visi tersebut. Pemimpin harus meyakinkan anggota kelompok bahwa visi yang ditetapkan adalah bukan sesuatu yang tidak mungkin meskipun untuk mencapainya sulit (Getol 2010).

Tingkat Pengetahuan Pemimpin

Seorang pemimpin harus mampu mempengaruhi orang lain, untuk mempengaruhi orang banyak maka pemimpin harus memiliki pengetahuan yang lebih tinggi dan luas tentang berbagai hal. Pengetahuan yang luas membuat seseorang mampu berbicara tentang banyak hal. Seorang pemimpin dituntut untuk mampu berbicara tentang situasi yang dihadapi, kesempatan yang dimiliki, problem yang timbul, dan mencari solusi yang dapat diterapkan. Namun sebelum langsung berbicara tentang hal-hal terkait pekerjaan seorang pemimpin perlu melakukan pendekatan-pendekatan pendahuluan. Pendekatan ini dilakukan melalui diskusi tentang berbagai hal dari urusan hobi, politik, budaya, hubungan masyarakat dan lain-lainnya. Untuk melakukan hal ini seseorang harus membaca berita-berita di surat kabar, majalah, internet, dan sumber berita lainnya (Getol 2010).

Selain itu, pengalaman juga menjadi sumber pengetahuan pemimpin. Pengalaman adalah suatu pembelajaran dari hal-hal yang pernah dilakukan seseorang. Pekerjaan-pekerjaan yang pernah dialami ini bukan hanya memberikan pembelajaran tetapi suatu kepuasan batin atas prestasi yang pernah dicapaidengan bekal pengalaman ini seseorang dapat lebih yakin dan percaya diri atas kemampuannya sendiri (Getol 2010). Alfian (2009) menjelaskan mengenai wawasan dan intelektualitas. Wawasan itu mendasar, pengalaman tu guru yang paling baik. Seorang pemimpin wajib memiliki wawasan yang luas, pemimpin harus mau membuka diri untuk terus belajar, menjadi manusia pembelajar, sehingga cakrawala pengetahuannya dan mampu mengamalkan hasil belajarnya dengan baik. Getol (2010) menambahkan bahwa gabungan dari pengalaman, pengetahuan dan keterampilan seseorang inilah yang pada akhirnya menampilkannya menjadi seorang pemimpin dalam sebuah kelompok.

Peran Kepemimpinan

Pemimpin adalah orang yang mampu memengaruhi orang lain. Seseorang bisa menjadi pemimpin karena ditunjuk atau karena keinginan kelompok. Itulah sebabnya pemimpin itu berbeda dengan manajer. Sedangkan manajer itu ditunjuk dan memiliki kekuasaan legitimasi pada bawahannya/pengikutnya. Kekuatan memengaruhi pada manajer karena dimilikinya otoritas formal bukan karena faktor individual. Munculnya seorang pemimpin merupakan hasil dari suatu proses dinamis yang sesuai dengan kebutuhan kelompok. Apabila saat tersebut muncul seorang pemimpin, kemungkinan besar kelompok tersebut akan mengalami suatu disintegrasi (Rivai dan Mulyadi 2012)

Yulianto (2010) menyatakan bahwa munculnya pemimpin dalam suatu kelompok terasa penting dalam membimbing proses kerjasama dalam pada suatu komunitas. Peran dapat diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. Pemimpin di dalam organisasi mempunyai peranan, setiap pekerjaan membawa harapan bagaimana penanggung peran berperilaku. Peran kepemimpinan dapat diartikan sebagai seperangkat perilaku yang diharapkan dilakukan oleh seseorang sesuai dengan kedudukannya sebagai pemimpin. Menurut Covey seoerti yang dikutip oleh Rivai dan Mulyadi (2012) membagi peran kepemimpinan dalam tiga bagian yaitu:

1. Pencarian alur ; peran untuk menentukan visi dan misi yang pasti
2. Penyelaras ; peran untuk memastikan bahwa struktur, sistem dan proses operasional organisasi memberikan dukungan pada pencapaian visi dan misi
3. Pemberdaya ; peran untuk menggerakkan semangat dalam diri orang-orang dalam mengungkapkan bakat, kecerdikan, dan kreativitas laten untuk mampu mengerjakan apa pun dan konsisten dengan prinsip-prinsip yang disepakati.

Peran kepemimpinan dapat pula dibagi dalam tiga bagian berikut:

1. Pemimpin masa depan harus fleksibel dan mempunyai pengalaman yang luas.
2. Menganggap tanggung jawab “seremonial” atau “spiritual” sebagai kepada organisasi menjadi suatu fungsi yang diperlukan, bukan suatu hal yang remeh yang hasrus dialami, atau didelegasikan kepada orang lain.
3. Pembuatan tidak lagi dibuat secara efektif terpusat di puncak organisasi.

Peran pemimpin sebagai model dengan memberikan “rumus sederhana” yaitu model merupakan perpaduan antara karakter dan kompetensi. Karakter adalah siapa kita sebagai pribadi dan kompetensi adalah apa yang bisa kita lakukan. Dengan menjadi model, maka peran pemimpin baik dalam area pengambil keputusan, mengelola konflik menjadi signifikan, karena pada masa depan pemimpin dihargai bukan kedudukannya saja, melainkan dari peran yang dimainkannya (Rivai dan Mulyadi 2012)

Yulianto (2010) menambahkan dalam penelitiannya bahwa dalam suatu komunitas masyarakat, secara alamiah akan muncul kelompok yang berbeda peran sosialnya. Sebagian kecil akan terbentuk sebagai kelompok yang memimpin dan sebagian besar akan terbentuk pula seseorang yang dipimpin. Keberadaan industri perkebunan kelapa sawit juga menyebabkan berkurangnya pengaruh dan peranan pemimpin desa baik formal maupun non formal dalam masyarakat semuntai sebagai bentuk pergeseran peran kepemimpinan lokal di desa Semuntai. perubahan kepemimpinan lokal dimulai ketika masuk dan berkembangnya industri perkebunan kelapa sawit. Kini kepemimpinan lokal tidak hanya terdiri dari kepala desa dan ketua adat, namun muncul golongan pemimpin lokal yang didasarkan kekayaan yang dimiliki, jabatan yang diemban dan ilmu pengetahuan.

Dasar pengakuan dari munculnya golongan kepemimpinan ini dijelaskan pula oleh Weber dalam Johnson seperti yang dikutip oleh Yulianto (2010) yang menyebutkan bahwa mereka yang secara “kharismatik” dalam arti berdasarkan kelebihan yang dimiliki berhak menyandang dan dapat diterima sebagai pemimpin serta mewakili aspirasi dan kepentingan umatnya. Peran kepemimpinan ini dipengaruhi atau didasarkan pada tipe kepemimpinannya dan dasar kepemimpinannya, bentuk perannya berupa sebagai penasehat, ahli agama, ahli

pengetahuan, Memiliki hubungan relasi sosial dalam bentuk patron klien, penentu kebijakan atau bahkan penguasa yang memiliki kuasa penuh terhadap komunitas.

Berdasarkan pendapat para ahli dan berdasarkan penelitian memperlihatkan pendapat yang berbeda mengenai bentuk dari peranan kepemimpinan. Namun, dapat diketahui bahwa Peran kepemimpinan dapat diartikan sebagai seperangkat perilaku yang diharapkan dilakukan oleh seseorang sesuai dengan kedudukannya sebagai pemimpin. Dan bentuknya dapat berupa sebagai juru bicara, komunikator, interogator, dan penentu arah, pencarian alur, penyelaras, dan pemberdaya. Selain itu, terdapat berbagai peranan lain yang disesuaikan dengan keadaan masyarakat. Peran kepemimpinan yang diperoleh dari hasil observasi dengan masyarakat petani mengenai pemimpin mereka baik dalam PPLP secara umum sama pemimpin di dalam unit masing-masing diperoleh peran seperti penghubung eksternal, penghubung internal, penyalur aspirasi masyarakat, pengatur strategi perlawanan, pengawasan kinerja anggota PPLP dalam menjalankan misinya, penyampai informasi dan memperluas jaringan.

Kerangka Pemikiran

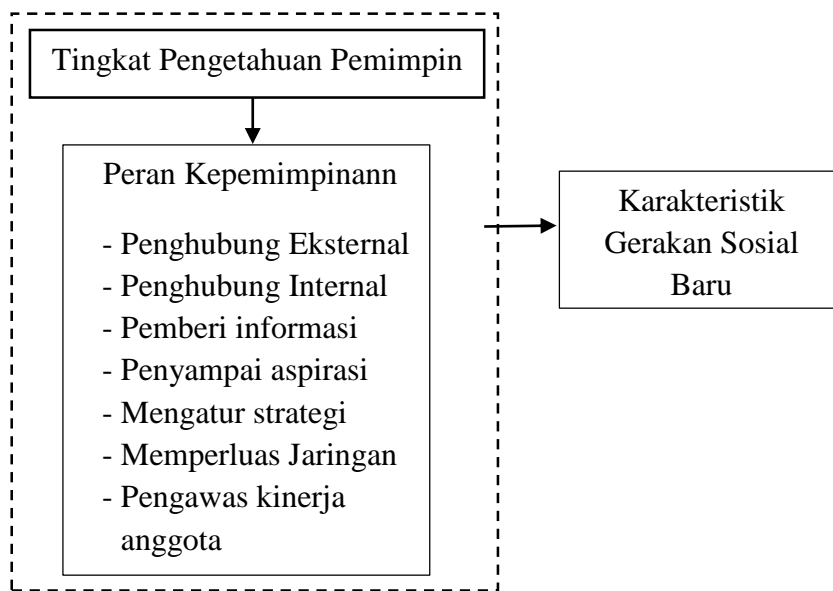
Gerakan sosial merupakan tindakan kolektif yang terorganisir namun tidak sama dengan lembaga. Gerakan sosial merupakan tindakan kolektif yang terorganisir secara longgar untuk menghasilkan perubahan yang diinginkan dalam masyarakat. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa gerakan sosial ini juga bukan hanya mendorong adanya perubahan tapi juga sebagai dampak dari adanya perubahan sosial baik yang dikehendaki maupun yang tidak dikehendaki. Gerakan sosial pun muncul karena adanya ketidaknyamanan, kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang terjadi di masyarakat (Sztompka 2011).

Salah satu bentuk gerakan sosial adalah gerakan petani. Paguyuban petani lahan pantai ini adalah salah-satu gerakan petani yang mengangkat isu pertanian, tapi paguyuban ini juga mengangkat isu lain seperti hak asasi manusia dan isu lingkungan atau kerusakan lingkungan, strategi yang digunakan juga beragam. Gerakan sosial yang mengangkat beragam isu ini juga memiliki bentuk lain yaitu termasuk bentuk gerakan sosial baru. Salah satu bentuk gerakan sosial adalah gerakan sosial baru (GSB) atau gerakan sosial pedesaan baru. menurut Putra seperti yang dikutip Martono (2011) GSB muncul pada dekade 1960 sampai 1970-an di Amerika dan Eropa. GSB lahir untuk mengoreksi prinsip-prinsip, strategi, aksi serta pilihan ideologi yang digunakan gerakan sosial di masa sebelumnya. GSB secara tidak langsung merupakan dinamika fenomena gerakan sosial itu sendiri.

Gerakan sosial baru ini memiliki karakteristik tertentu sehingga sebuah gerakan ini bisa termasuk ke dalam gerakan sosial baru, diantaranya Basis sosial gerakan adalah campuran antara unsur desa-kota, baik dalam arti fisik maupun dalam berbagai urat nadi, organ dan kegiatan gerakan; Kepemimpinan diisi oleh orang-orang dengan kemampuan intelektual yang mencengangkan, yang mampu menganalisa kombinasi hubungan yang relatif kompleks dari gejala lokal ke global, mikro ke makro, dan sebaliknya; Taktik-taktik utamanya sangat beragam dan mengisi banyak arena pertarungan; Posisi strategisnya umumnya “otonom” dari partai politik dan negara, tetapi memiliki kombinasi hubungan yang khas dengan ragam kekuatan gerakan sosial di sektor lain; Ideologinya tidak hanya menjawab

diskriminasi kelas sosial, tetapi juga untuk menghadapi perkara identitas (ras/etnis/kebudayaan), ekologi dan jender; dan Daya jelajahnya kosmopolitan, yang utamanya ditandai oleh pembangunan solidaritas dan aksi global.

Terdapat beragam faktor yang mempengaruhi karakteristik gerakan sosial yaitu, aktivitas gerakan, kepemimpinan, taktik, posisi strategis, ideologi, dan daya jelajah solidaritas atau perluasan jaringan. Salah satu faktor yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan kemampuan seorang atau sekelompok orang untuk mempengaruhi orang lain. Dalam penelitian ini, sistem kepemimpinan yang digunakan oleh paguyuban petani lahan pantai adalah parlementer, sistem kepemimpinan yang tidak hanya bertumpu pada perseorangan, tapi dalam beberapa orang. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa hal termasuk pengetahuan dan pengalaman mereka dalam menjalankan organisasi mereka. Selain itu, peran masing-masing orang yang menjalankan kepemimpinan tersebut.



Gambar 1 Kerangka Pemikiran

Keterangan :

→ : Hubungan

⋮ : Ruang Lingkup Pendekatan Kuantitatif

Sistem kepemimpinan yang didasarkan pada pengetahuan untuk menjalankan sistem tersebut, didukung peran yang jelas dan menjadikan paguyuban petani ini memiliki jaringan yang luas, hal ini bisa disebut dengan gerakan sosial baru atau gerakan sosial pedesaan baru. Oleh karena itu, kerangka pemikiran yang diusulkan peneliti adalah sebagaimana dalam Gambar 1 tersebut: Pengetahuan menjadi modal utama dalam menjalankan peran kepemimpinan seperti menjadi penghubung eksternal yaitu penghubung antara pihak PPLP dengan pihak luar PPLP seperti pihak pemerintahan dan teman solidaritas atau jaringan; penghubung internal yaitu penghubung antar pihak dalam PPLP atau antar anggota paguyuban sehingga terjalin hubungan yang lebih harmonis; pemberi informasi yaitu memberikan informasi terkait gerakan sosial baik taktik atau strategi, informasi

rencana pertambahan lainnya maupun informasi mengenai hal yang menjadi keputusan bersama dalam forum PPLP; penyampai aspirasi yaitu menyampaikan beragam aspirasi yang diutarakan para petani paguyuban petani dalam forum PPLP; mengatur strategi yaitu mengatur strategi perlawanan dalam setiap aksi yang akan dilakukan, strategi yang terpilih akan diinformasikan kepada anggota PPLP kemudian diaturlah posisi dan peran masing-masing anggota baik laki-laki maupun perempuan, kakek-nenek, maupun para pemuda dan pemudi.

Selain itu, terdapat pula peran memperluas jaringan, peran ini merupakan peran dari humas namun juga dilakukan oleh pemimpin di setiap unit atau kordinator lapangnya, hal ini dilakukan dalam hal menjalin hubungan dengan pihak luar PPLP yang ingin bersolidaritas dengan paguyuban ini dalam menolak perytambahan pasir besi. Teman solidaritas ini juga memperkuat dan melakukan perjuangan dengan cara masing-masing sesuai dengan kapasitasnya baik sebagai akademisi, ulama, maupun para seniman; dan menjadi pengawas kinerja pengurus PPLP lainnya, peran ini sebenarnya untuk melakukan pemantauan sebagai bahan evaluasi dalam setiap melakukan setiap aksi atau strategi yang telah digunakan. Jika gerakan sosial ini diisi oleh para pemimpin yang memiliki pengetahuan yang sangat luar biasa dalam memahami dan menganalisis rencana pertambahan pasir besi dan mampu menjaga keutuhan atau keberlanjutan paguyuban petani lahan pantai baik dari dalam PPLP maupun dengan orang di luar PPLP sehingga gerakan sosial ini termasuk dalam gerakan sosial baru karena kepemimpinannya sesuai dengan karakteristik gerakan sosial baru.

Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian ini terdiri dari satu hipotesis uji yaitu **semakin tinggi tingkat pengetahuan pemimpin maka semakin tinggi peranan pemimpin dalam gerakan sosial**

Definisi Operasional

1. Tingkat Pengetahuan: seperangkat ilmu yang dimiliki oleh masyarakat yang didapatkan dan diterapkan dalam sistem kepemimpinannya serta mengetahui segala hal yang menyangkut rencana pertambahan. Variabel ini akan diukur dengan kuesioner, jika responden menjawab “ya” maka akan diberi skor 1, jika responden menjawab “tidak” maka skornya adalah 0. Data yang terkumpul termasuk data ordinal dan akan digolongkan ke dalam 3 golongan yaitu:
 Tinggi : $0 < X < 3$
 Sedang : $4 < X < 6$
 Rendah : $7 < X < 10$
2. Peran kepemimpinan : seperangkat tugas dan fungsi yang dilakukan pemimpin untuk menjalankan kepemimpinannya, dapat dilihat dari cara menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan pembagian kerja. Variabel ini akan diukur dengan kuesioner, jika responden menjawab “ya” maka akan diberi skor 1, jika responden menjawab “tidak” maka skornya adalah 0.

Data yang terkumpul termasuk data ordinal dan akan digolongkan ke dalam 3 golongan yaitu :

Tinggi : $0 < X < 3$

Sedang : $3 \leq X < 5$

Rendah : $5 \leq X \leq 7$

PENDEKATAN LAPANG

Metode penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah kombinasi antara pendekatan kualitatif dengan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif dilakukan dengan metode survey untuk melihat hubungan peran kepemimpinan dengan tingkat pengetahuan pemimpin, menggolongkan karakteristik gerakan sosial baru. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian survei. Penelitian survei merupakan penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuisioner sebagai alat pengumpul data yang pokok (Singarimbun dan Effendi 1989). Sedangkan pendekatan kualitatif dilakukan dengan metode observasi dan wawancara mendalam untuk menganalisis peran kepemimpinan, pengetahuan pemimpin, dan karakteristik gerakan sosial baru secara mendalam, mendeskripsikan profil paguyuban petani lahan pantai, dengan teknik wawancara mendalam kepada responden yang sekaligus menjadi informan yang dipilih dengan metode *purposive sampling*.

Lokasi dan waktu

Penelitian ini dilakukan di Desa Garongan, Bugel dan Pleret, Kecamatan Pancatan Kabupaten Kulon Progo. Pemilihan lokasi tersebut dilakukan secara sengaja (*purposive*) dengan alasan penelitian ini karena ketiga desa ini merupakan desa yang terkena rencana pertambangan pasir besi dan anggota PPLP ini tersebar di desa tersebut. Selain itu, PPLP ini merupakan gerakan yang unik, salah satunya dalam hal kepemimpinan, mereka menyebut mereka lah pemimpin mereka sendiri.

Tabel 1 Jadwal pelaksanaan penelitian

Kegiatan	Februari	Maret	April	Mei	Juni
Penyusunan proposal skripsi					
Kolokium					
Perbaikan proposal penelitian					
Pengambilan data lapangan					
Pengolahan data dan analisis data					
Penulisan draft skripsi					
Sidang skripsi					
Perbaikan skripsi					

Pengambilan data primer dan sekunder dilakukan pada bulan Maret 2014 sampai April 2014, pengolahan data dilakukan pada bulan April 2014. Analisis data

dan penulisan dilakukan pada bulan Mei 2014. Kegiatan penelitian meliputi penyusunan proposal penelitian, kolokium, pengambilan data lapangan, pengolahan data dan analisis data, penulisan draft skripsi, sidang skripsi, dan perbaikan laporan penelitian sebagaimana terlihat dalam dalam Tabel 1.

Teknik Sampling

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Garongan, Bugel dan Pleret, Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Unit analisis dari penelitian ini adalah individu yang bermata pencaharian sebagai petani dan tinggal di daerah pesisir. Responden merupakan petani lahan pantai di ketiga desa yang termasuk ke dalam Paguyuban Petani Lahan Pantai - Kulon Progo (PPLP-KP). Petani ini yang mengalami perubahan dan membentuk gerakan sosial untuk mempertahankan hak atas lahan pantai mereka yang sudah diolah sejak nenek moyang mereka dan mereka memiliki pengaruh dalam PPLP dan menerapkan sistem kepemimpinan yang berbeda dengan organisasi lainnya. Responden dipilih dari populasi sasaran di Desa Garongan, Pleret dan Bugel yang bersifat homogen dari sisi mata pencaharian yaitu sebagai petani dan keadaan populasi tidak terlalu tersebar secara geografis maka teknik pengambilan sampel yang dipilih adalah teknik *purposive sampling* atau sengaja berdasarkan keikutsertaan mereka dalam PPLP dan Pengetahuan mereka mengenai sistem kepemimpinan. Responden yang dipilih sebanyak 30 orang dari ketiga desa tersebut.

Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data sekunder didapatkan dari studi literatur maupun data dari pihak-pihak terkait seperti pihak PPLP-KP, dan pihak pemerintahan desa. Data primer didapatkan dari lapangan melalui teknik observasi langsung, kuesioner (**Lampiran 2**) dan wawancara mendalam dengan menggunakan panduan pertanyaan (**Lampiran 3**). Kuesioner ini terbagi kedalam dua bagian yaitu untuk melihat gerakan sosial baru yang diukur dari ciri-ciri gerakan sosial baru tersebut dan sistem kepemimpinan yang dilihat dari tingkat pengetahuan, peran kepemimpinan. Data primer didapatkan dengan menggunakan kuesioner terbuka dan ditambah dengan wawancara mendalam untuk menambah data hasil.

Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan menggunakan kuisisioner akan diolah secara kuantitatif dengan menggunakan *Microsoft Excel 2013* dan *SPSS for Windows* versi 16.0. Pengolahan data kuantitatif dilakukan dengan menggunakan tabel frekuensi dan Uji Chi Square untuk meneliti hubungan antar variabel nominal dan ordinal seperti tingkat pengetahuan pemimpin dan peran kepemimpinan. Selain analisis data kuantitatif, dilakukan pula analisis data kualitatif sebagai pendukung dan pelengkap data kuantitatif. Data kualitatif akan diolah melalui tiga tahap analisis data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

KEADAAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Kondisi Geografis

Kecamatan Panjatan merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Kulon Progo dan memiliki luas wilayah 4 459.23 ha, kecamatan Pnjatan terdiri dari 11 desa yaitu, Desa Garongan, Desa Bugel, Desa Pleret, Desa Tayuban, Desa Panjatan, Desa, GatokanDesa Cerme, Desa Krembangan, Desa Depok, Desa Kanoman, Desa Bojong dan dari semua desa tersebut terdiri dari 100 pedukuhan. Kecamatan panjatan ini memiliki tiga desa di pesisir pantai yaitu Desa Garongan, Desa Pleret dan Desa Bugel yang terletak sejajar di pesisir pantai Kulon Progo. Letak geografis dari Kecamatan Panjatan ini berbatasan dengan kecamatan-kecamatan lain dan samudra Hindia.

Sebelah utara : Berbatasan dengan Kecamatan Pengasih
Sebelah selatan : Samudra Hindia dan Benua Australia
Sebelah timur : Berbatasan dengan Kecamatan Lendah dan Galur
Sebelah barat : Berbatasan dengan Kecamatan Wates

Ketiga desa yang berada di pesisir pantai ini tidak seluruh pendudukannya terletak di daerah pesisir pantai Kulon Progo tapi hanya sebagian kecil dari pedukuhan keseluruhan. Pedukuhan dari masing-masing desa adalah Desa Garongan terdiri dari 9 pedukuhan dan 3 pedukuhan berada di pesisir pantai sedangkan yang lainnya berada di sebelah utara pesisir pantai, Desa Pleret terdiri dari 11 pedukuhan dan 2 pedukuhan yang berada di daerah pesisir pantai, serta Desa Bugel terdiri dari 10 pedukuhan dan 2 pedukuhan berada di pesisir pantai Kulon Progo. Berdasarkan sensus penduduk yang dilakukan pada tahun 2009, jumlah penduduk kecamatan Panjatan sebanyak 44 162 jiwa dengan jumlah penduduk per desa dapat dilihat pada tabel jumlah penduduk berikut :

Tabel 2 Jumlah penduduk Kecamatan Panjatan menurut Desa dan jenis kelamin

No	Desa	Laki – laki	Perempuan	Total
1	Garongan	1 938	2 016	3 954
2	Pleret	2 720	2 761	5 481
3	Bugel	2 449	2 648	5 097
4	Kanoman	1 287	1 378	2 662
5	Depok	1 907	1 938	3 845
6	Bojong	2 551	2 561	5 112
7	Tayuban	1 253	1 368	2 621
8	Gotakan	1 726	1 856	3 582
9	Panjatan	934	983	1 917
10	Cerme	2 011	2 085	4 096
11	Krembangan	2 799	2 996	5 795
Jumlah/Total		21 575	22 587	44 162

Sumber data: BPS Kabupaten Kulon Progo 2010

Dari sebelas desa di Kecamatan Panjatan tidak semua berada di daerah pesisir, hanya tiga desa yaitu Desa Garongan, Desa Pleret dan Desa Bugel, jumlah

penduduk dari ketiga desa tersebut terlihat pada tabel tersebut tapi tidak semua berada di daerah pesisir, hanya sebagian kecil yang tinggal di daerah pesisir.

Kondisi Ekonomi

Jumlah Penduduk di daerah pesisir ini tidak sebanyak daerah yang bukan berasal di daerah pesisir yang disebut dengan daerah utara. Keadaan dalam keluarga masing-masing anggota PPLP sangat harmonis, mereka saling membantu dalam hal pertanian atau mengembangkan pertanian mereka, seperti seorang kepala keluarga atau bapak yang melakukan pengolahan tanah dan ibu dibantu anak-anaknya mendapatkan bagian menanam bibit atau benih tanamannya atau semua kegiatan pertaniannya dilakukan bersama-sama. Tingkat kesejahteraan dari para petani yang berada di desa pesisir ini sudah sejahtera jika dilihat dari keadaan pemukiman, kepemilikan barang berharga dan mewah serta dari tingkat pendidikan mereka. Setiap rumah para petani di pesisir ini sudah menggunakan batako dan semen bahkan tidak lagi terbuat dari bahan kayu atau bilik.

Apabila dibandingkan dengan sebelum adanya pertanian lahan pantai, masyarakat sangat tidak sejahtera, berdasarkan penuturan dari masyarakat sendiri bahwa mereka dulu sangat sengsara, rumah pun hanya terbuat dari kayu dan jika terjadi badai pasir mereka harus menjaga rumah mereka agar jangan sampai ambruk atau roboh. Dari sisi pekerjaan pun mereka hanya sebagai petani serabutan yang hanya menanam umbi-umbian, makan nasi pun tidak setiap hari karena tidak adanya uang untuk membeli beras dan berbagai penyakit pun serig datang menimpa secara musiman, misalnya penyakit gatal yang terjadi pada satu orang akan menimpa pada semua orang yang ada di desa pesisir tersebut. Oleh karena itu, mereka disebut dengan “wong cubung”. Namun, setelah adanya teknik pertanian di lahan pantai atau lahan pasir ini, kehidupan masyarakat pesisir ini pun berubah dan berangsur-angsur sejahtera. Saat ini, setiap rumah para petani memiliki setidaknya satu kendaraan bermotor.

Kendaraan bermotor khususnya sepeda motor merupakan alat transportasi utama untuk pergi ke ladang karena memang lokasi ladang dengan rumah jaraknya jauh, setiap ke ladang pasti ada sepeda motor bahkan motor besar pun sampai ke ladang. Setiap ada panen raya, para penjual sepeda motor menjajakan motornya kepada para petani di lahan pantai bukan para pembeli atau petani yang datang ke dealer tapi malah penjualnya sendiri yang datang ke pembeli karena pasti ada orang yang membeli sepeda motor setiap panen raya. Selain itu, pendidikan terakhir para petani ini rata-rata lulusan SMA dan sederajat, sedangkan anak-anak mereka sudah banyak yang belajar sampai perguruan tinggi. Bagi para petani, lahan pantai sudah menjadi sumber nafkah mereka dalam menjalankan hidup dan menyekolahkan anak-anaknya. Kemudian, berbagai penyakit yang datang karena adanya badai pasir dari pantai sudah tidak ada lagi karena badai pantai pun sudah jarang terjadi lagi karena sudah tertahan dengan pertanian lahan pantai.

Mayoritas mata pencaharian masyarakat pesisir ini adalah petani karena bagi mereka, menjadi petani ini adalah pekerjaan pokok karena dari pertanianlah mereka bisa hidup, para petani di pesisir bangga menjadi petani. Setiap petani di sini juga tidak semua bekerja sebagai petani saja, ada juga yang menjadi PNS, guru olah raga, pegawai di pemerintahan tetapi mereka menyebutnya dengan pekerjaan sampingan. Para petani ini menanam beragam komoditas seperti cabe merah,

melon, semangka dengan beragam warna, pare, dan beragam sayuran lainnya. Komoditas utama yang ditanam adalah cabe merah yang ditanam berdasarkan waktu yang telah disepakati bersama yaitu pada waktu yang ditentukan berdasarkan ciri-ciri maupun tanda-tanda yang dibaca oleh para sesepuh kampung mereka dan biasanya jatuh pada awal bulan maret. Penentuan tanggal awal tanam ini disepakati oleh satu desa dan desa lainnya mengikuti desa tersebut. Penanaman cabe merah ini biasanya juga di tumpang sari dengan sayuran seperti sawi, bawang daun, pare maupun bayam. Setelah periode tanam cabe habis, maka lahan tersebut biasanya ditanami melon dan semangka, kemudian begitu seterusnya.

Hasil produksi pertanian ini, khususnya cabe sangat melimpah malah melebihi dari modal, bahkan keuntungannya bisa sampai tiga kali lipat modal sehingga petani merasa begitu banyak keuntungan dari bertani ini dan tidak mau meninggalkannya, bahkan para anaknya pun lebih ingin bertani daripada bekerja sebagai karyawan. Menurut para petani, bertani itu lebih nyaman dari karyawan karena tidak ada yang mengatur jam kerja mereka. Selain itu, menurut penelitian dari Rustamin (2010) memperlihatkan bahwa

“Secara ekonomi, dengan mengambil contoh di desa Bugel, keuntungan bersih bertanam cabe pada lahan seluas satu hektar serta asumsi harga cabe dipasaran Rp7 000/kg adalah tidak kurang dari Rp19 003 434,- per bulan selama 7 bulan. Keuntungan tanaman semangka dengan asumsi lahan seluas satu hektar dan harga dipasaran Rp1 000/kg adalah tidak kurang Rp9 450 896,- per bulan selama 2 bulan. Sedangkan keuntungan tanaman sawi yang biasanya ditanam secara tumpang sari selama satu bulan di lahan seluas satu hektar serta asumsi harga di pasaran Rp800/kg adalah tidak kurang Rp13 046 875,- artinya dari menenam tiga jenis tanaman tersebut maka petani yang memiliki lahan satu hektar dalam setahun akan memperoleh penghasilan Rp164 972 705,- atau sebesar Rp13 747 725,- per bulan”

Penelitian ini memperlihatkan penghasilan dari pertanian ini melimpah sehingga dapat dikatakan bahwa kebutuhan sehari-hari mereka terpenuhi dari hasil pertanian. Produksi cabe merah ini sangat ditunggu-tunggu oleh para pembeli, namun cara menjual cabe merah di pesisir ini berbeda dengan cara petani cabe merah yang dijual ke tengkulak. Mereka membuat sebuah sistem yang disebut dengan “pasar lelang” artinya setiap cabe merah hasil pertanian, pada saat panen raya di lelang, dan yang membeli adalah para pengepul yang berasal dari berbagai daerah. Sistemnya sama dengan sistem lelang lainnya, siapa yang paling besar memberikan tawaran maka dialah yang akan mendapatkan cabe merahnya.

Sistem lelang ini ditemukan oleh masyarakat petani pesisir sendiri yang merasa bahwa tengkulak ini harus diputuskan agar para petani tidak merugi. Pak RP menceritakan

“Awalnya, ada seorang pedagang cabe merah yang ingin membeli ke daerah pesisir ini namun sering tidak dapat membeli karena terhalang oleh para tengkulak-tengkulak yang menghalanginya, kemudian dia memberikan saran kepada salah seorang petani untuk membuat sistem lelang, kemudian dicoba dan sangat efektif sekali dalam menjual hasil pertaniankhususnya cabe merah ini”.

Dahulu para pembeli cabe merah ini datang sendiri dan menyaksikan lelang cabe, sekarang jika pembeli tidak bisa hadir maka dia boleh memberikan sms

kepada pengurus pasar lelang atau menggunakan media komunikasi lainnya untuk ikut dalam lelang.

Para petani di pesisir ini rata-rata memiliki luas lahan 0.5 ha, sehingga sangat luas dan butuh tenaga yang banyak untuk bertani di lahan yang luas tersebut. Terkadang pekerjaan ini membutuhkan tenaga kerja tambahan untuk membantu mengurus tanaman cabe dalam hal menanam, menyiram, menyiangi gulma, dan memanen cabe merah nantinya. Tenaga kerja yang dipekerjakan berasal dari tetangga sendiri atau mengambil dari orang utara. Satu orang pekerja diberi upah sebesar Rp50 000 ditambah dengan uang makan dan cemilan. Setiap petani mempekerjakan sekurang-kurangnya 5 orang dalam sehari. Dengan demikian, pertanian ini tidak hanya memberikan kesejahteraan kepada masyarakat pesisir tetapi juga memberikan pekerjaan kepada orang lain. Jika suatu saat lahan pertanian ini diganti dengan pabrik pertambangan, maka dengan demikian lahan pertanian akan habis, masyarakat tidak sejahtera dan akan banyak yang menjadi pengangguran, karena pabrik hanya bisa memberikan pekerjaan kepada 2 000 orang, sedangkan jumlah yang kehilangan pekerjaan lebih dari 10 000 orang. Oleh karena itu, penting lahan pantai ini dipertahankan.

Kondisi Sosial

Kondisi sosial dari setiap desa ini hampir sama, karena dipengaruhi juga oleh letak geografis mereka yang sama-sama berada di pesisir pantai. Desa Garongan merupakan desa perbatasan kecamatan panjatan dengan kecamatan Wates, desa petani lahan pantai ini dekat dengan jalan besar, dan wilayah lahan pantai yang sangat luas dan pohon cabe merah yang sangat rapi berjajar. Setiap petani menanam pada waktu bersamaan sehingga pertumbuhan tanaman cabe serempak. Selain itu, sebelum mengadakan tanam perdana, para petani berkumpul dan membuat syukuran di lahan pantai yang akan ditanami cabe merah. Beragam hidangan disajikan dalam pengajian tersebut, setelah acara pengajian dan mengucapkan syukur atas nikmat yang telah diberikan, semua masyarakat pun menyantap hidangan yang diberikan secara sukarela. Hal ini memperlihatkan bahwa kondisi sosial masyarakat di Desa Garongan ini sangat harmonis. Desa ini juga merupakan perintis adanya tanam perdana. Jika Desa Garongan sudah mulai menanam, maka desa lainnya mengikuti seperti Desa Pleret dan Bugel.

Perjuangan di Desa Garongan ini sangat keras, ada seseorang yang mencurigakan pun langsung dihajar masa, tidak memperdulikan apa yang menjadi tujuan sebenarnya dari orang luar tersebut. Pernah ada kejadian, sekelompok mahasiswa yang dikatakan bahwa mereka adalah mahasiswa yang akan melaksanakan AMDAL, setelah beberapa hari tinggal dan ada gerak-gerik mereka yang mencurigakan, maka sekelompok mahasiswa tersebut langsung dihajar dan diusir dari Garongan. Betapa kerasnya perjuangan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Garongan tersebut. Keadaan perjuangan ini berbeda dengan desa lainnya. Seperti di Pleret dan Bugel.

Desa Pleret merupakan desa yang ada di pertengahan desa pesisir yang termasuk Kecamatan Panjatan. Walaupun bersebelahan dengan Desa Garongan, tapi kerasnya perjuangan dari Desa Garongan tidak sama di Pleret. Masyarakat Pleret masih bersikap halus pada setiap orang yang dicurigai oleh masyarakat sekitar. Namun, jika ada intruksi untuk berjuang, mereka akan sama-sama

memperjuangkan lahan mereka. Perjuangan masyarakat ini lebih terlihat dari segi keagamaannya. Sering sekali masyarakat desa ini melaksanakan pengajian-pengajian yang juga bertujuan untuk meminta pertolongan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, selain ada mujadahan yaitu kegiatan berdoa bersama agar diberikan ketenangan dalam berjuang dan dijauhkan dari orang-orang yang dzolim, pengajian rutin juga sering dilaksanakan baik di dalam Desa Pleret maupun di daerah lain.

Sedangkan Desa Bugel, merupakan desa perbatasan dengan Kecamatan Galur, berbeda dengan Garongan yang dekat dengan jalan raya, lingkungan sekitar desa ini sama dengan lingkungan Desa Pleret. Desa Bugel ini merupakan desa pertama yang menemukan teknik pertanian lahan pantai, karena penemu teknik ini berasal dari Desa Bugel. Di desa ini teknik pertaniannya sudah lumayan lebih maju dibandingkan desa yang lainnya karena di desa ini sudah ditemukan teknik infus, yaitu teknik menyiram tanaman yang langsung ke tanah dekat tanamannya, tidak menggunakan tenaga manusia tapi hanya dengan menyalakan jenset saja. Walaupun barisan tanamannya tidak se-rapi di Desa Garongan, tapi teknik pertaniannya tidak kalah dengan desa lain. Desa ini sering kedatangan para akademisi maupun dosen yang ingin melihat dan belajar pertanian lahan pantai. Desa Bugel merupakan pusat dari PPLP, karena disana terdapat sekretariat PPLP dan posko perjuangan PPLP.

Ketika dalam perjuangan, ibu-ibu di desa ini sangat kuat, pihak pertambangan yang pernah datang ke desa ini dengan menggunakan mobil pun sempat dihadang oleh ibu-ibu dengan membawa senjata masing-masing, orang tersebut diinterogasi dan di geledah isi mobilnya. Kejadian ini memperlihatkan kehati-hatian masyarakat akan perusahaan tambang termasuk ibu-ibu. Dalam hal pertanian, setiap desa juga ada gotong royong antara ibu-ibu, mereka saling membantu dalam hal menanam tanaman, menyiangi, atau memetik hasil atau pemeliharaan tanaman lainnya. Sekelompok ibu-ibu berkumpul dalam satu lahan dan melakukan pemeliharaan tanaman, kemudian jika sudah selesai di lahan yang satu, mereka pindah ke lahan yang lain secara bergiliran. Hal ini memperlihatkan keharmonisan masyarakat dalam pertanian dan perjuangan.

Keharmonisan tersebut terlihat pada setiap masyarakat yang menolak dengan rencana pertambangan pasir besi. Pertambangan ini telah memecah masyarakat menjadi dua golongan yaitu golongan pro dan kontra pertambangan pasir besi. Golongan kontra adalah para petani yang menolak rencana pertambangan dan tetap mempertahankan lahannya walaupun pihak pertambangan memberikan tawaran berapa pun harganya, mereka tetap mempertahankan lahannya dan termasuk dalam paguyuban petani atau PPLP. Sedangkan golongan pro adalah para petani juga yang telah menyerah dalam perjuangan, yang memberikan lahannya atau menjual lahannya kepada pihak pertambangan karena mereka tergiur dengan imbalan yang diberikan dan mereka juga secara otomatis keluar dari PPLP.

Keadaan pro-kontra pertambangan ini tidak membuat membuat peperangan mereka tetap hidup dalam satu wilayah yang sama. Desa Garongan yang begitu keras menentang pun masih ada yang pro pertambangan. Para petani yang kontra pertambangan sudah menjadi saudara seperjuangan yang disatukan dengan sebuah wadah yang disebut PPLP tadi. Bagi masyarakat petani lahan pantai, PPLP merupakan tempay atau paguyuban pemersatu petani dalam perjuangan, tempat berdiskusi mengenai pertanian dan perjuangan. Kondisi petani yang kontra ini

berbeda dengan kondisi sosial pro-kontra, Walau hidup berdampingan tapi komunikasi antara pro-kontra tidak begitu baik, bisa dikatakan bahwa komunikasi mereka terputus. Tidak hanya komunikasi, ternyata hubungan persaudaraan pun terputus. Rencana pertambangan ini juga telah memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tuanya. Jika orang tua kontra terhadap pertambangan tapi anaknya pro pertambangan, maka anaknya sudah tidak lagi dianggap sebagai anaknya lagi. Hal ini terjadi sebagai sanksi sosial terhadap mereka yang pro-rencana pertambangan.

Sanksi sosial itu merupakan kesepakatan bersama antara petani lahan pantai yang menolak rencana pertambangan. Orang yang mendukung adanya pertambangan ini awalnya hanya diberikan peringatan yaitu dengan pemberitahuan, tapi peringatan tersebut dirasakan belum cukup untuk menahan adanya pihak yang pro yang mengajak pihak kontra untuk ikut mendukung pertambangan. Akhirnya ditetapkan bahwa sanksi sosial bagi pihak pro pertambangan adalah diputuskan komunikasi bahkan hubungan oersaudaraan atau hubungan darah. Sanksi ini berlaku untuk setiap pihak yang pro pertambangan, siapa pun itu dan petani yang tergabung dalam PPLP ini pun menyetujui dan menjalankannya.

Pro-kontra ini tidak hanya terjadi dikalangan para orang tua tapi juga melibatkan para pemuda, dalam pihak kontra rencana pertambangan, para pemuda PPLP membentuk sebuah gerakan di setiap unit desa masing-masing. Pemuda pun membuat suatu gerakan di setiap desanya seperti Geranat (Karangsewu), Kompakt (Plesret), Garuda (Garongan), ada pula *Sea Child* yang dari dulu telah terbentuk sebelum adanya PPLP. Selain itu, pada saat PPLP terbentuk mereka juga membuat sebuah tempat berkumpul yang dinamakan gerbong revolusi. Gerbong ini digunakan untuk ajang kumpul anak muda yang termasuk dalam PPLP. Hal ini merupakan keinginan pemudanya sebagai bentuk apresiasi pemuda dalam perlawanan menolak tambang besi. Gerbong ini pun dulu digunakan untuk radio komunitas namun sekarang sudah tidak digunakan karena peralatannya rusak.

Selain pihak kontra, pihak pro rencana pertambangan pun membuat sebuah gerakan sendiri yang mereka namakan sesuai dengan desanya masing-masing seperti Gerakan Rakyat Pleret (Gerap) di Pleret, Peduli Rakyat (Perak) di Bugel, dan Gerakan Rakyat Karangsewu (Gerak) yang berada di Karangsewu yang merupakan desa di luar Kecamatan Panjatan. Gerakan ini muncul pada tahun 2012 dan didanai oleh PT JMI sebagai perusahaan yang akan membuat pabrik pertambangan. Gerakan ini pernah membuat sekretariat khusus dan melakukan beberapa hal untuk menggoyahkan kekuatan petani dalam menolak pertambangan. Gerakan ini pun akan diberikan traktor dan modal untuk meningkatkan produksi pertanian mereka karena walaupun mereka telah menjual lahan mereka pada pihak perusahaan tapi pihak pro ini masih bisa menanam karena mereka seperti dipinjamkan oleh pihak perusahaan. Namun, modal dan traktor pun belum sempat diterima oleh gerakan tersebut.

PROFIL PAGUYUBAN PETANI LAHAN PANTAI KULON PROGO (PPLP –KP)

Petani pesisir atau petani lahan pantai adalah mereka yang terkena rencana pertambangan. Sejak isu rencana pertambangan ini muncul ke media dan diketahui oleh masyarakat, konflik mulai terlihat. Masyarakat petani tidak bisa menerima adanya rencana tersebut karena tidak ada sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat yang terkena konsesi tersebut. Hal ini memicu kemarahan masyarakat dan mengganggu ketenangan masyarakat petani lahan pantai yang sudah lama memanfaatkan lahan pantai tersebut sehingga lahan pantai yang dulu gersang dapat memberikan kesejahteraan kepada para petani. Lahan pesisir tersebut di klaim menjadi tanah milik pakualaman namun pihak yang meng-klaim sendiri tidak bisa membuktikannya, hanya karena kekuasaan kesultanan yang membuat tanah itu di klaim. Selain itu, pihak Pakualaman bukan hanya mengklaim lahan pantai yang dijadikan tempat bertani para petani tapi juga tanah yang sudah lama di tempati oleh masyarakat sebagai tempat tinggal dan masyarakat memiliki sertifikat atas tanah tersebut.

Rencana pertambangan ini telah membuat masyarakat menjadi marah sehingga terjadi konflik antara masyarakat dengan pihak yang memiliki kepentingan dengan rencana pertambangan. Konflik tersebut berjalan di masing-masing desa di wilayah pesisir. Perlawanan dari masing-masing desa ini dilakukan atas keinginan para petani dengan sendirinya. Kelompok tani yang memiliki peran utama dalam perjuangan ini. Namun, kekuatan dari setiap desa ini masih lemah sehingga menginspirasi SK seorang ketua Gapoktan untuk mempersatukan perjuangan setiap desa untuk bersatu dalam suatu wadah yang akan memperkuat kekuatan perlawanan petani. SK mengumpulkan beberapa perwakilan dari kelompok-kelompok tani yang kemudian membentuk suatu wadah yang sifatnya santai dan non-formal, maka terbentuklah sebuah paguyuban, yaitu paguyuban petani lahan pantai Kulon Progo.

Paguyuban atau *gemeinschaft* merupakan bentuk kehidupan bersama dimana anggota-anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni dan bersifat alamiah serta bersifat kekal. Dasar hubungan tersebut adalah rasa cinta, dan rasa kesatuan batin yang memang telah dikodratkan (Soekanto 2007). Sebagaimana yang dikatakan Soekanto (2007) tersebut, PPLP ini memiliki hubungan yang sangat kuat dan hubungan yang murni, karena sampai saat ini sudah delapan tahun berdiri dan tetap kokoh. Menurut Tonnie seperti yang dikutip Soekanto (2007) mengatakan bahwa suatu paguyuban mempunyai beberapa ciri pokok, yaitu sebagai berikut:

1. *Intimate*, yaitu hubungan menyeluruh yang mesra
2. *Private*, yaitu hubungan yang bersifat pribadi, khusus untuk beberapa orang saja
3. *Exclusive*, hubungan tersebut hanyalah untuk “kita” saja dan tidak untuk orang lain di luar “kita”

Paguyuban petani lahan pantai jika dilihat dari sisi ciri paguyuban yang diungkapkan oleh Tonnie ini telah terpenuhi, seperti hubungan yang menyeluruh dan mesra (*intimate*) diperlihatkan dalam kehidupannya sehari-hari yang harmonis di seluruh petani paguyuban lahan pantai yang kontra terhadap rencana

pertambangan. Kemudian hubungan yang bersipat pribadi atau khusus (private), hal ini terlihat dalam hal hubungannya dengan masyarakat selain masyarakat kontra terhadap rencana pertambangan, mereka sangat hati-hati dan tertutup terhadap orang lain dan hanya untuk sesama petani kontra pertambangan. Selanjutnya, hubungan tersebut hanyalah untuk “kita” dan tidak untuk orang luar “kita” (exclusive), mereka membuat aturan yang disepakati bersama dan berlaku hanya untuk “kita” yang menolak pertambangan. Paguyuban ini pun memiliki tiga tipe seperti yang diungkapkan Tonnis, seperti yang dikutip oleh Soekanto (2007) bahwa tipe paguyuban yaitu paguyuban karena ikatan darah, paguyuban karena tempat tinggal dan paguyuban karena pemikiran. Paguyuban petani lahan pantai Kulon Progo ini termasuk ke dalam paguyuban karena pemikiran, mereka memiliki kesamaan pemikiran, ideologi, yaitu menolak rencana pertambangan pasir besi karena akan merugikan mereka sebagai petani, lingkungan dan orang lain. Pada saat pembentukan sebuah paguyuban ini, dilakukan sebuah pertemuan.

Pertemuan PPLP tersebut menentukan sebuah pernyataan atau kesepakatan bersama dalam menyikapi rencana pertambangan tersebut, terdapat tiga sikap untuk dipilih oleh peserta rapat atau pertemuan yaitu, menerima tambang besi, menerima dengan syarat dan menolak dengan harga mati. Tanpa dikomando atau dipengaruhi orang lain, semua petani yang hadir memilih menolak dengan harga mati dengan alasan apapun. Tidak hanya modal otot, para petani sudah berpikir kelangsungan hidup anak cucu mereka serta kehidupan di masa mendatang¹. Hal ini menunjukkan bahwa perjuangan ini tidak dipengaruhi oleh seseorang yang mendominasi atau lebih unggul dibandingkan mereka, semua keputusan benar-benar disepakati bersama. Beragam taktik dan strategis telah dilakukan dalam beragam ranah baik politik, hukum, seni sampai keagamaan. Mencoba untuk mengadu pada pemerintah pun telah dilakukan tapi hasilnya tidak ada. Selain itu, kini para petani lahan pantai yang tergabung dalam PPLP ini memiliki suatu strategi yang khas dalam melawan rencana pertambangan, yaitu menanam. Mereka yakin dengan menanam ini mereka berarti telah menguasai lahan pantai dan barang siapa yang mengganggu maka senjata mereka yang akan berbicara.

Selain kegiatan menanam, para petani yang tergabung dalam Paguyuban Petani Lahan Pantai Kulon Progo ini juga melakukan berbagai macam kegiatan lain. Kegiatan-kegiatan tersebut sebagian besar mereka lakukan bertujuan untuk menunjukkan keeksistensian para petani kepada masyarakat di luar yang luput untuk memandang kehidupan mereka. Dengan harapan setelah mereka kemudian dapat melihat kehidupan petani di pesisir Kulon Progo yang kemudian menjadi tahu dan pada akhirnya membentuk suatu solidaritas bersama untuk membantu melestarikan kegiatan pertanian lahan pasir di pesisir Kulon Progo serta menentang aksi-aksi penindasan akibat kebijakan-kebijakan yang tidak sejalan dengan kebutuhan para petani. Beberapa kegiatan yang akan dibahas dalam hasil penelitian ini ialah kegiatan tanam perdana, ulang tahun, panen raya, dan kegiatan-kegiatan lainnya. *lihat lampiran 5*

¹ Dikutip dari buku “menanam adalah melawan” karangan Widodo, petani lahan pantai Kulon Progo. Yogyakarta tahun 2013

Tanam Perdana

Kegiatan ini secara rutin dilakukan sekali dalam setahun setiap tanggal 1 Maret. Acara inti yang dilakukan dalam kegiatan tanam perdana ialah melaksanakan doa dan makan bersama seluruh masyarakat yang tergabung dalam PPLP-KP. Kegiatan ini biasanya dilakukan berpindah-pindah setiap tahunnya sehingga setiap desa mendapatkan giliran untuk menjadi tuan rumah. Ada hal menarik sebelum dilakukan kegiatan tanam perdana, para sesepuh petani akan melakukan pertemuan atau musyawarah untuk persiapan melakukan tanam perdana. Pertemuan tersebut membahas tentang peramalan-peramalan mengenai berbagai macam kemungkinan kondisi alam yang terjadi di wilayah pesisir. Salah satu metode yang digunakan ialah dengan menggunakan ilmu falak (ilmu perbintangan). Para sesepuh petani yang sudah sangat berpengalaman secara ilmiah mampu melihat dan meramalkan kemungkinan iklim dan arah angin yang akan terjadi selama masa musim tanam yang akan datang sehingga mereka mempersiapkan segala sesuatu hal untuk menghadapi ancaman yang mungkin mereka alami. Tentu saja para sesepuh tersebut tidak belajar ilmu-ilmu tersebut di bangku sekolah atau pendidikan formal lainnya melainkan belajar melalui keteraturan perilaku alam yang masih sangat asli.

“Setiap mau tanam perdana itu pasti para sesepuh khususnya di Desa Garongan, biasanya memang disana itu melakukan pertemuan atau musyawarah membicarakan dan menentukan kapan tanam perdana dimulai, entah itu pakai ramalan bintang atau ramalan cuaca atau ilmu falak dan sebagainya, sesepuh yang lebih tahu, saya gak pernah ikut dan gak ngerti juga”. (MW, Petani Lahan Pantai)

Ulang Tahun PPLP-KP

Peringatan ulang tahun atau hari jadi Paguyuban Petani Lahan Pantai ini biasanya dilaksanakan pada tanggal 31 Maret atau 1 April pada setiap tahunnya. Kegiatan ini terdiri dari beberapa acara, diawali dengan doa bersama pada malam hari sebelum hari perayaan sebagai bentuk rasa syukur dan dengan harapan acara besok berjalan dengan baik dan lancar. Pada umumnya, acara doa bersama ini dilakukan di desa yang menjadi tuan rumah perayaan ulang tahun dan dipimpin oleh pemuka agama setempat. Sebagian warga lain melakukan persiapan dengan menyiapkan tumpengan dan gunung yang terbuat dari hasil produksi tanaman sayuran petani yang dikumpulkan secara bersama-sama. tumpeng dan gunung yang dibuat oleh para petani ini merupakan sebuah simbol kesejahteraan dan rasa syukur atas karunia yang telah diberikan oleh tuhan melalui pertanian pesisir yang sangat melimpah. Mas WS petani Garongan memberitahukan bahwa

“setiap tahun di hari ulang tahun ya seperti ini, rame, nanti ada yang membunyikan motor yang keras, terus keliling desa pesisir sampai pada suatu desa yang menjadi tempat perayaan ulang tahunnya, isi acaranya ya sambutan-sambutan, orasi perjuangan dan hiburan, kemudian di akhira ada potong tumpeng dan naik gunung, berebutan gitu”. (lihat lampiran 5

Gunungan adalah semacam tumpeng raksasa yang isinya penuh dengan hasil tanaman petani di lahan pantai. Selain itu, ada lagi kegiatan kemeriahan masyarakat petani lahan pantai ini yaitu panen raya, pesta rakyat petani lahan pantai

sebagai bentuk rasa syukur karena telah diberikan hasil panen yang melimpah, ada keunikan disini. Acara dimulai pada pagi menjelang siang pada pukul 10.00 waktu setempat ditandai dengan arak-arakan sepeda motor di sepanjang jalan desa di pesisir. Setelah itu, semua masyarakat berkumpul di suatu tempat di desa yang menjadi tuan rumah pelaksanaan perayaan ulang tahun. Di tempat tersebut terdapat beberapa tenda dan sebuah panggung sebagai pusat kegiatan. Setelah semua berkumpul dimulailah inti acara yang diawali dengan sambutan dari berbagai kalangan mulai dari ketua pelaksana, ketua PPLP-KP, Kepala Desa, hingga sambutan dari seorang profesor di Universitas Gadjah Mada yang memiliki solidaritas terhadap kehidupan para petani pesisir Kulon Progo.

Acara kemudian dilanjutkan dengan orasi perjuangan untuk membangkitkan kembali semangat-semangat perjuangan para petani untuk terus menanam sebagai salah satu bentuk perlawanan terhadap berbagai ancaman dari pihak-pihak yang mencoba melemahkan mereka. Acara dilanjutkan dengan dilakukannya pemotongan tumpeng yang telah dipersiapkan tadi secara simbolis. Sebagai penutup, acara diakhiri dengan memburu gunung sebagai simbol mengambil keberkahan. Mereka percaya bahwa hasil tanaman yang berada dalam gunung tersebut membawa keberkahan yang besar karena semuanya benar-benar berasal dari tanah mereka, hasil memeras keringat dan otak, bukan barang-barang yang dibeli di pasar. Selain itu, hasil tanaman yang berada dalam gunung tersebut juga telah dibacakan doa-doa oleh pemiliknya dan juga oleh para kiyai dan lapisan masyarakat lain yang berdoa untuk misi kerakyatan bukan karena suatu imbalan.

Panen Raya

Panen raya merupakan sebuah ritual yang dilakukan pada saat panen cabai sebagai bentuk syukur para petani atas hasil produksi yang didapatkan. Acara dalam kegiatan ini tidak jauh berbeda dengan kegiatan panen raya yang umum dilakukan oleh petani-petani lainnya. Acara inti dari kegiatan panen raya yaitu doa bersama. Acara ini merupakan acara yang paling meriah karena pada acara ini tidak hanya warga PPLP yang melaksanakan akan tetapi para pedagang cabai juga turut serta berpartisipasi dalam kegiatan panen raya ini. Pada hari perayaan panen raya ini, sepanjang jalan desa akan dipadati oleh truk-truk pengangkut cabai dan hasil-hasil pertanian tumpang sari. Hari tersebut padat oleh berbagai aktifitas dan orang-orang yang berasal dari berbagai penjuru desa dan pedagang-pedagang yang akan membeli cabai-cabai hasil panen para petani pesisir Kulon Progo. Pada saat panen raya inilah pasar lelang pun digelar. Pak RP petani Karangwuni menceritakan

“Awalnya, ada seorang pedagang cabe merah yang ingin membeli ke daerah pesisir ini namun sering tidak dapat membeli karena terhalang oleh para tengkulak-tengkulak yang menghalanginya, kemudian dia memberikan saran kepada salah seorang petani untuk membuat sistem lelang, kemudian dicoba dan sangat efektif sekali dalam menjual hasil pertanian khususnya cabe merah ini, sekarang penjualnya yang datang sendiri, tidak bergantung pada tengkulak” (lihat lampiran 5).

Oleh karen itu, para petani lahan pantai ini lebih sejahtera dan terputuslah rantai tengkulak yang mengambil keuntungan dari para petani.

Kegiatan Lainnya

Selain berbagai macam kegiatan yang bernafaskan pertanian, PPLP-KP juga memiliki kegiatan-kegiatan lain di luar kegiatan mereka sebagai seorang petani. Kegiatan tersebut antara lain kesenian teater, melakukan bedah buku di berbagai tempat, membangun sekolah tani, bahkan pernah melakukan presentasi dalam sebuah workshop internasional di Filipina. Kegiatan tersebut terlaksana melalui jaringan sosial internasional yang terjalin melalui dunia maya seperti website, facebook, twitter, dan blog.

Unduk Gurun merupakan nama kelompok teater PPLP-KP ini. Nama ini memiliki makna yang dalam yang menggambarkan kehidupan para petani pesisir Kulon Progo. Unduk Gurun memiliki makna sebagai alam pesisir yang awalnya hanya sebuah gurun namun ternyata dalam gurun tersebut terdapat unduk. Unduk sendiri dalam adat Jawa memiliki makna sebuah mukjizat atau sesuatu yang disakralkan. Jadi, Unduk Gurun dapat diartikan sebagai sebuah tempat yang berbentuk gurun pasir yang di dalamnya terdapat suatu mukjizat atau sesuatu yang disakralkan sehingga tempat tersebut harus dijaga oleh setiap makhluk hidup. Ada sebuah kekuatan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan tempat tersebut (gurun pasir) yang menjadi tempat bagi makhluk hidup tersebut melangsungkan kehidupannya. Saat makhluk hidup mampu mengelola dan menjaga tempat tersebut (gurun pasir), maka tempat tersebut akan memberikan kehidupan dan penghidupan sebagai balasan kepada makhluk hidup yang telah memelihara kehidupannya atau keberadaannya. (Widodo 2013)

Kelompok teater “Unduk Gurun” ini berjalan dengan bermodalkan semangat dan percaya diri tinggi. Kelompok teater ini tidak berjalan sendiri melainkan dibantu oleh beberapa orang yang ahli di bidang pertunjukan seni teater dan peduli terhadap perjuangan para petani pesisir Kulon Progo ini. Mulai dari pelatih peran, ekspresi dan penjiwaan, hingga pemandu setting panggung pertunjukan. Didominasi oleh para petani muda, hingga saat ini mereka telah melakukan beberapa kali pertunjukan teater di berbagai instansi mulai dari perguruan tinggi hingga dalam sebuah forum internasional.

Selain teater, kegiatan lain yang menjadi aktivitas sampingan para petani pasir Kulon Progo ini ialah mereka aktif menulis sebuah buku yang menceritakan mengenai kehidupan mereka sebagai seorang petani yaitu bertani dan sebagai seorang pejuang yang berjuang mempertahankan hak-hak mereka sebagai petani di negeri agraris ini. Buku mereka telah dibahas di beberapa tempat (bedah buku) dan dijual namun tidak dijual dipasaran. Buku mereka hanya dijual di beberapa tempat saja seperti di Sains (Sajogjo Institute) yang berlokasi di kampus IPB Baranangsiang, di lokasi saat mereka melaksanakan bedah buku, dan tentunya di PPLP-KP sendiri. Selain buku, mereka juga membuat beberapa video dokumenter yang bercerita tentang aktifitas mereka sebagai petani atau aktifitas-aktifitas lainnya yang pernah mereka lakukan seperti teater, aksi demonstrasi, dokumentasi kegiatan internal, dan lain sebagainya.

Semua kegiatan tersebut di atas dilakukan secara swakelola dan gotong royong oleh semua masyarakat pesisir Kulon Progo yang tergabung dalam Paguyuban Petani Lahan Pantai Kulon Progo. Tidak hanya petani, kegiatan ini diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat baik itu anak-anak, ibu-ibu, para pelajar, para tokoh agama, dan lain sebagainya. Semua bersatu bersama melakukan

kegiatan tanpa ada paksaan melainkan karena kebutuhan. Kebutuhan akan bertahan hidup dalam melawan kemiskinan, kelaparan, dan melawan berbagai bentuk aksi ketidakadilan dan penindasan yang dilakukan oleh kaum pemodal (kapitalis) kepada para petani di pesisir Kulon Progo ini.

Kegiatan atau aktivitas inilah yang memperlihatkan bahwa PPLP ini ada dan diakui oleh masyarakat lain yang juga mengetahui kondisi dan keadaan yang sebenarnya di daerah pesisir Kulon Progo ini. Selain itu, pihak perusahaan maupun pemerintah sudah sering melakukan negosiasi dan upaya untuk mendapatkan lahan pantai seperti yang diungkapkan oleh Pak RP bahwa

“Saya dulu sering bertemu dengan orang keraton yang mengajak untuk melancarkan pabrik pertambangan pasir besi, tapi saya tidak mau terlibat, hanya memang sempat ikut dalam pertemuan itu, bahkan pengurus PPLP pun pernah ada yang ikut dan akhirnya dikeluarkan dari PPLP. Sebenarnya mereka juga tidak memiliki bukti kalau lahan itu lahan mereka, orang semuanya ada di perjanjian ganti kalau belanda itu tidak memberikan lahannya”

Ikhtisar

Patani pesisir atau petani lahan pantai adalah mereka yang terkena rencana pertambangan. Sejak isu rencana pertambangan ini muncul ke media dan diketahui oleh masyarakat, konflik mulai terlihat. Masyarakat petani tidak bisa menerima adanya rencana tersebut karena tidak ada sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat yang terkena konsesi tersebut. Hal ini memicu kemarahan masyarakat dan mengganggu ketenangan masyarakat petani lahan pantai yang sudah lama memanfaatkan lahan pantai tersebut sehingga lahan pantai yang dulu gersang dapat memberikan kesejahteraan kepada para petani. Lahan pesisir tersebut di klaim menjadi tanah milik pakualaman namun pihak yang meng-klaim sendiri tidak bisa membuktikannya, hanya karena kekuasaan kesultanan yang membuat tanah itu di klaim. Selain itu, pihak Pakualaman bukan hanya mengklaim lahan pantai yang dijadikan tempat bertani para petani tapi juga tanah yang sudah lama di tempati oleh masyarakat sebagai tempat tinggal dan masyarakat memiliki sertifikat atas tanah tersebut.

Para petani yang tidak setuju dari setiap desa yang terkena rencana pertambangan pasir besi membentuk sebuah kekuatan dan sebuah organisasi yang memiliki tujuan utama yaitu menolak tambang besi dengan harga mati. Organisasi itu berbentuk sebuah paguyuban dan dinamakan paguyuban petani lahan pantai Kulon Progo atau yang lebih dikenal dengan PPLP ini merupakan sebuah organisasi gerakan petani. Gerakan petani merupakan salah-satu bentuk dari gerakan sosial sehingga gerakan perlawanan petani ini merupakan suatu gerakan sosial yang melibatkan partisipasi masyarakat secara kolektif dalam melakukan perlawanan menolak rencana pertambangan pasir besi. Berbagai strategi telah dilakukan seperti demo walaupun tidak pernah ada hasilnya karena pemerintah lebih memihak kepada korporasi atau perusahaan, akhirnya petani ini pun melakukan sebuah strategi yang khas dari gerakan sosial ini yaitu menanam karena dengan menanam petani mampu menguasai lahannya dan menghidupi keluarganya dan orang lain karena lahan pertanian ini juga memberikan lapangan kerja untuk orang lain.

Selain kegiatan menanam, para petani yang tergabung dalam Paguyuban Petani Lahan Pantai Kulon Progo ini juga melakukan berbagai macam kegiatan lain, seperti kegiatan tanam perdana, ulang tahun, panen raya, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Kegiatan-kegiatan tersebut sebagian besar mereka lakukan bertujuan untuk menunjukkan keeksistensian para petani kepada masyarakat di luar yang luput untuk memandang kehidupan mereka. Dengan harapan setelah mereka kemudian dapat melihat kehidupan petani di pesisir Kulon Progo yang kemudian menjadi tahu dan pada akhirnya membentuk suatu solidaritas bersama untuk membantu melestarikan kegiatan pertanian lahan pasir di pesisir Kulon Progo serta menentang aksi-aksi penindasan akibat kebijakan-kebijakan yang tidak sejalan dengan kebutuhan para petani.

KARAKTERISTIK GERAKAN SOSIAL BARU DALAM GERAKAN SOSIAL PAGUYUBAN PETANI LAHAN PANTAI

Gerakan sosial memiliki banyak definisi dari berbagai ahli. Menurut Sunarto seperti yang dikutip oleh Martono (2011) menyatakan bahwa gerakan sosial pada hakikatnya merupakan hasil perilaku kolektif, yaitu suatu perilaku yang dilakukan bersama-sama oleh sejumlah orang yang tidak bersifat rutin dan perilaku mereka merupakan hasil tanggapan atau respons terhadap rangsangan tertentu. Gerakan sosial sifatnya lebih terorganisir dan lebih memiliki tujuan dan kepentingan bersama dibandingkan perilaku kolektif. Perilaku kolektif dapat terjadi secara spontan, namun gerakan sosial memerlukan sebuah proses pengorganisasian massa. Martono (2011) melanjutkan bahwa gerakan sosial dimaknai sebagai sebuah gerakan yang lahir dari sekelompok individu untuk memperjuangkan kepentingan, aspirasi atau menuntut adanya perubahan yang ditunjukkan oleh sekelompok tertentu, misalnya adalah pemerintah atau penguasa. Namun, gerakan sosial ini dapat berpihak sebagai yang pro maupun kontra dengan pemerintah.

Masyarakat Pesisir pantai Kulon Progo yang terkena rencana pertambangan pasir besi ini membuat sebuah gerakan sosial yang mereka sebut dengan gerakan petani karena mereka adalah para petani yang memperjuangkan lahan mereka yang disebut-sebut sebagai lahan dari pakualaman sedangkan pihak Pakualaman sendiri tidak bisa membuktikan bahwa mereka merupakan pemilik lahan pantai yang sekarang digunakan oleh para petani untuk menanam tanaman seperti cabe, semangka, melon, dan sayur-sayuran. Gerakan sosial yang mereka lakukan ini ditujukan untuk mempertahankan lahan mereka agar tidak menjadi pabrik pertambangan pasir besi karena dapat merusak lingkungan, akan terjadi bencana dimana-mana, dan para petani akan kehilangan pekerjaannya.

Gerakan ini berawal dari adanya sebuah penelitian mengenai kandungan dalam lahan pasir pantai Kulon Progo yang katanya mengandung bijih besi, setelah adanya penelitian ini berdampak pada adanya berita bahwa akan dibuat pabrik pertambangan pasir besi tanpa adanya kesepakatan dengan masyarakat atau sosialisasi dengan masyarakat terkait pertambangan pasir besi, pihak perusahaan malah langsung menerjunkan mahasiswa dari universitas tertentu untuk membuat AMDAL, namun masyarakat yakin bahwa AMDAL ini pun pasti akan membenarkan bahwa kawasan pantai ini layak untuk ditambang walaupun kenyataannya tidak layak, artinya AMDAL ini pun pasti akan berpihak kepada perusahaan. Hal ini berbeda dengan penuturan dari masyarakat atau sesepuh desa yang mengatakan bahwa beberapa puluh tahun yang lalu juga sempat adanya penelitian yang sama dan hasilnya kawasan ini tidak layak untuk dibuat pabrik karena akan mendapatkan kerugian bagi pihak perusahaan, jika menambang pasir di pesisir ini dan diolah di Cilacap maka akan memakan biaya yang sangat besar apalagi untuk transportasi. Kemudian jika membuat pabrik dipesisir maka limapuluh tahun pun akan tetap merugi. Oleh karena itu, masyarakat pun heran dengan adanya berita bahwa pesisir Kulon Progo ini akan dijadikan pabrik pertambangan pasir besi.

Terdapat enam desa yang terkena konsesi pertambangan pasir besi, yaitu Desa Karangsewu, Desa Siliran, Desa Bugel, Desa Pleret, Desa Garongan dan Desa Karangwuni. Keenam desa ini berada dalam kecamatan yang berbeda, Desa Bugel,

Pleret dan Garongan ini terdapat di Kecamatan Panjatan yang merupakan bahasan utama dalam penelitian ini. Setiap desa ini awalnya melakukan perjuangan masing-masing desa namun tidak begitu kuat kelihatannya. Selain itu, masyarakat dari satu desa ke desa yang berdekatan pun tidak saling kenal, bahkan saat ada perlombaan tingkat desa ini mereka sering bertengkar bahkan berkelahi. Kemudian ada inisiatif dari ketua gapoktan yaitu Pak SK yang melihat bahwa perjuangan ini memang harus diperjuangkan bersama-sama karena satu nasib dan satu tujuan dalam perjuangan ini, setelah itu berkumpul semua perwakilan dari kelompok tani yang kemudian membentuk sebuah wadah yang mempersatukan perjuangan para petani lahan pantai dengan sebutan Paguyuban Petani Lahan Pantai Kulon Progo atau yang disingkat dengan PPLP-KP, paguyuban ini sengaja dipilih karena ini bukanlah organisasi formal seperti LSM atau organisasi formal lainnya, tapi paguyuban ini bersifat kurang formal dan santai.

Setelah terbentuk PPLP ini, silaturahmi masyarakat petani pesisir ini menjadi semakin erat, para petani ini menjadi merasa menjadi keluarga, petani antar desa ini pun mulai saling mengenal, bahkan dalam perlombaan antar desa sudah tidak ada lagi perpecahan atau permusuhan, perlombaan ini sudah seperti permainan biasa saja, kalah menang pun tak masalah. Para petani ini saling mengenal setelah bertemu dalam setiap aksi perlawanan seperti demo yang dilakukan di berbagai tempat. Selain itu, PPLP ini menjadi suatu wadah atau tempat untuk bertemu dengan para petani, saling berdiskusi mengenai pertanian dan lainnya sebagaimana yang diungkapkan oleh para petani, salah satunya Pak SM “PPLP ini juga menjadi wadah untuk bertukar informasi mengenai pertanian dan mempererat tali silaturahmi diantara petani pesisir” (lihat lampiran 6).

PPLP ini merupakan wadah gerakan petani yang mengusung isu pertanian, kemudian meluas menjadi isu lingkungan, karena dampak di Kulon Progo itu bukan hanya pertanian tapi juga lingkungan dan HAM. Jika dilihat dari jenis gerakan sosialnya, PPLP ini merupakan gerakan sosial baru. Salah satu bentuk gerakan sosial adalah gerakan sosial baru (GSB) atau gerakan sosial pedesaan baru. Menurut Putra seperti yang dikutip Martono (2011) GSB muncul pada dekade 1960 sampai 1970-an di Amerika dan Eropa. GSB lahir untuk mengoreksi prinsip-prinsip, strategi, aksi serta pilihan ideologi yang digunakan gerakan sosial di masa sebelumnya. GSB secara tidak langsung merupakan dinamika fenomena gerakan sosial itu sendiri. Menurut Fauzi (2005) ciri-ciri gerakan sosial pedesaan baru:

1. Basis sosial gerakan adalah campuran antara unsur desa-kota, baik dalam arti fisik maupun dalam berbagai urat nadi, organ dan kegiatan gerakan;
2. Kepemimpinan diisi oleh orang-orang dengan kemampuan intelektual yang mencengangkan, yang mampu menganalisa kombinasi hubungan yang relatif kompleks dari gejala lokal ke global, mikro ke makro, dan sebaliknya;
3. Taktik-taktik utamanya sangat beragam dan mengisi banyak arena pertarungan;
4. Posisi strategisnya umumnya “otonom” dari partai politik dan negara, tetapi memiliki kombinasi hubungan yang khas dengan ragam kekuatan gerakan sosial di sektor lain;
5. Ideologinya tidak hanya menjawab diskriminasi kelas sosial, tetapi juga untuk menghadapi perkara identitas (ras/etnis/kebudayaan), ekologi dan jender;
6. Daya jelajahnya kosmopolitan, yang utamanya ditandai oleh pembangunan solidaritas dan aksi global

Jika dilihat dari karakteristik gerakan sosial baru tersebut, maka gerakan petani PPLP –KP ini bisa disebut dengan gerakan sosial baru karena memiliki ciri-ciri atau karakteristik yang sesuai dengan gerakan sosial baru atau GSB.

Tabel 3 Jumlah dan presentasi anggota PPLP menurut karakteristik gerakan sosial baru dan pernyataan ya atau tidak

Karakteristik Gerakan Sosial Baru	Ya		Tidak		Total
	n	%	n	%	
Basis gerakan desa-kota	30	100	0	0	100
Kepemimpinan yang luar biasa	30	100	0	0	100
Taktik yang beragam	30	100	0	0	100
Posisi strategi otonom	30	100	0	0	100
Ideologi mengenai beragam isu	30	100	0	0	100
Daya jelajah kosmpolit	30	100	0	0	100

Paguyuban petani ini termasuk dalam gerakan sosial baru ditunjukkan dengan hal berikut, yaitu pertama, basis sosial gerakan ini tidak hanya di desa tapi jug adi kota, kegiatan gerakan ini bukan hanya di daerah pedesaannya saja tapi juga ada kegiatan perjuangan yang dilakukan di kota yang dilakukan oleh teman jaringan PPLP, kemudian perjuangan PPLP juga bukan hanya memperjuangkan lahan pertanian mereka saja tapi juga lahan masyarakat lain yang bernasib sama yaitu di daerah Parang Kusumo yang terkena penggusuran atau di daerah Kebumen yang terkena rencana bandara.

Kedua, adanya kepemimpinan yang diisi oleh orang-orang yang luar biasa, setiap petani yang berada di pesisir Kulon Progo ini memiliki pengetahuan yang luar biasa mengenai pertanian atau perjuangan mempertahankan lahan pantai dan dampak dari adanya pertambangan pasir besi. Orang yang menduduki posisi sebagai pemimpin PPLP ini pun merupakan lulusan perguruan tinggi, dan para “korlap” yang dipercaya masyarakat ini pun selain memiliki pengetahuan yang luas mengenai pertambangan pasir besi, para penyuluh pun mereka banyak belajar kepada para orang kepercayaan masyarakat tersebut. Para petani ini memahami bahwa menanam adalah merupakan cara yang ampuh dalam mempertahankan lahan mereka, beragam teknologi pertanian pun lahir dan berkembang di daerah pesisir ini, seperti Pak SM, salah satu “korlap” di Desa Bugel yang menemukan teknik infus dalam menyiram tanaman.

Tingkat pengetahuan masyarakat dan pemimpin petani lahan pantai ini dilihat dari tabel jumlah dan presentasi anggota PPLP menurut tingkat pengetahuan pemimpin terhadap rencana pertambangan pasir besi termasuk pada tingkat tinggi. Mereka sangat mengetahui segala hal yang berhubungan dengan pertambangan, pihak yang terlibat dalam rencana tambang pasir besi ini, dampak dari adanya pertambangan di masa mendatang dan memahami bagaimana strategi yang harus dilakukan melihat beragam kondisi yang telah dialami dan yang akan dihadapi. Pengetahuan kepemimpinan yang luar biasa ini membuat para petani ini memahami

beragam situasi dari pengalaman sebelumnya. Sama halnya dengan bentuk kepemimpinannya saat ini.

Tabel 4 Jumlah dan Presentasi Anggota PPLP menurut Tingkat Pengetahuan Pemimpin

Tingkat pengetahuan pemimpin	n	%
Tinggi	25	83,30
Sedang	5	16,70
Rendah	0	0,00
Total	30	100,00

Ketiga, taktik atau strategi yang dilakukan oleh PPLP ini beragam. Segala bentuk strategi perlawanan pernah dilakukan baik dalam ranah hukum, politik, dan aksi langsung. PPLP melakukan beragam strategi ini saat ada kesempatan, seperti di ranah politik, yaitu pada saat adanya pemilihan umum untuk pemilihan calon legislatif baik DPRD atau DPR RI sekalipun, tapi kesempatan itu gagal karena perwakilan mereka gagal dalam mendapatkan kursi. Kemudian dalam ranah hukum, ini pernah terdapat beberapa kasus yang menimpa PPLP yang dilakukan oleh pihak lawan, misalnya membakar posko perjuangan PPLP yang telah menyulut semangat PPLP untuk memperjuangkan lahan mereka agar tidak terjadi rencana pertambangan pasir besi ini. Melaporkan kepada pihak berwajib namun ternyata pelaku pembakaran ini juga melibatkan pihak berwenang itu. Hal yang sangat aneh jika diketahui bahwa pihak berwenang itu harusnya mengamankan namun di pesisir ini malah membuat keributan dengan pembakaran posko.

Selain itu, ada salah satu petani PPLP yang ditangkap dengan alasan yang tidak jelas, malah bukan ditangkap tapi diculik oleh pihak kepolisian setempat. Hal ini juga menunjukkan bahwa ketidakberpihakan pihak tersebut kepada petani. Dalam sidang petani tersebut yang bernama Tukijo ini berlangsung sangat lama karena bertele-tele, mencari kesalahan sang “tersangka” tersebut, dari keadaan tersebut Pak Tukijo menyimpulkan bahwa “Pengadilan di negeri ini banyak, tapi tak ada keadilan di negeri ini”. Kemudian aksi langsung yang dilakukan oleh PPLP berupa demo yang dilakukan di berbagai tempat seperti di DPRD, di kantor Bupati Kulon Progo, di Wates, bahkan sampai di DPR RI Jakarta. Para petani ini sangat bersemangat dalam menolak pertambangan ini bahkan sempat menginap saat melakukan demo beberapa hari, saat menginap tersebut, peran para perempuan dalam perjuangan ini pun bergerak yaitu dengan menyediakan makanan untuk mereka yang sedang demo. Selain laki-laki muda dan perempuan muda yang ikut melakukan aksi demo ini, nenk-kakek pun ikut dalam aksi ini bahkan sempat ada nenek dan kakek yang terkena gas air mata di kepala pada saat demo. Saat ada kesempatan untuk membuat surat kepada presiden pun PPLP tidak menyia-nyiakannya, sudah beberapa kali PPLP mengirim surat kepada Presiden RI ini namun tidak ada tanggapan apaun dari Presiden, entah sampai atau tidak surat itu, saat ini mereka sudah tidak peduli.

Keempat, posisi PPLP ini otonom karena dia tidak bekerjasama dengan pemerintah dan LSM. Pemerintah bukanlah pihak yang tepat untuk diajak bekerjasama, karena sudah terbukti dari pengalaman PPLP dalam melakukan

strateginya seperti demo kepada pihak pemerintah tapi tidak pernah ada tanggapan apapun, mereka hanya mengiyakan sekedar menenangkan para petani yang sedang berrdemo. Masyarakat PPLP ini meyakini bahwa pemerintah pasti memihak pada perusahaan bukan pada petani, terbukti saat wawancara mengenai siapa saja dibalik pertambangan pair besi, kebanyakan menjawab bahwa pemerintah juga berada dibalik rencana pertambangan ini. Selain pemerintah, PPLP juga tidak akan bergabung dengan LSM, pengalaman mereka dengan LSM inilah yang membuat PPLP tidak percaya lagi dengan LSM. LSM biasanya hanya memanfaatkan masyarakat, dan hanya memberikan perintah atau mengatur bukan dari kemauan masyarakat sehingga masyarakat tidak mau. LSM ini pernah masuk juga yaitu JATAM dan memang mereka mengatur masyarakat dalam melakukan perlawanan, kemudian ada Walhi. Walhi ini tidak mengatur tapi hanya mengambil data saja karena sudah mengetahui bahwa PPLP sudah tidak mau bergabung dengan LSM.

Paguyuban ini merupakan wadah atau kelompok otonom yang tidak ada campur tangan dari pemerintah ataupun dari LSM, mengapa demikian? Karena MW dalam hal ini ini mengatakan bahwa *“Kami tidak percaya dengan pemerintah dan LSM”*. Kemudian Pernyataan MW ini juga diperjelas oleh Ibu IS yang menjelaskan ada pengalaman sebelumnya sehingga PPLP ini tidak percaya dengan LSM.

“Pernah ada pengalaman, dari pihak keraton ada yang memberikan dana katanya untuk membantu perjuangan, ternyata malah mengadu domba anggota PPLP sehingga mulai tidak percaya dengan pemerintah, kemudian setiap demo tidak pernah ditanggapi, yasudah berarti pemerintah tidak memihak kepada rakyat”.

Selain itu, Pak SK dan Pak RP juga menjelaskan bahwa ketidakpercayaan paguyuban kepada LSM adalah

“LSM itu sukanya ngatur perjuangan kita, sedangkan masyarakat tidak mau melaksanakan apa yang telah diatur oleh LSM. Pernah ada LSM yang masuk ke dalam PPLP, bukan LSM nya yang mengikuti apa yang menjadi keinginan masyarakat namun segala bentuk strategi, tempat rapat dan lain hal itu harus pihak sana yang menentukan, itu kan namanya mengatur ya bukan keinginan masyarakat sendiri”.

Oleh karena itu, pengalaman ini dijadikan bahan pembelajaran yang membuat masyarakat PPLP tidak percaya atau tidak bergabung dengan LSM maupun pemerintah. Pak SM berpandangan bahwa *“PPLP merupakan organisasi petani mandiri yang tidak terikat oleh pihak lain.”*

Kelima, ideologinya tidak hanya mengangkat isu pertanian, tapi juga isu-diskriminatif. PPLP ini mengangkat isu pertanian, bahwa jika lahan pertanian ini tidak boleh digantikan dengan pabrik pertambangan pasir besi karena para lahan tersebut adalah lahan pertanian yang menjadi sumber nafkah para petani, jika menjadi pertambangan maka tidak ada lagi tanaman cabe atau semangka, artinya produksi komoditas tersebut akan hilang, mungkin saja mereka yang di kota atau di desa tidak bisa makan. Kemudian meluas juga, selain isu pertanian yang harus diperjuangkan, pertambangan ini juga akan merusak lingkungan dan melanggar HAM yaitu kehilangan pekerjaannya berpuluh-puluh ribu para petani lahan pantai sehingga hal itu juga harus diperjuangkan sebagai dasar perjuangan mereka. Masyarakat memahami bahwa pertambangan ini akan merusak lingkungan dan mengundang bencana alam karena sudah terbukti di daerah tetangga yang

mengalami kerusakan lingkungan dan pasir tidak bisa lagi menahan desir ombak atau menahan air yang singgah di pantai.

Selain memperjuangkan daerahnya sendiri yaitu di pesisir Kulon Progo, PPLP juga bersolidaritas dengan daerah lain yang memiliki nasib yang sama, kemudian membuat sebuah perkumpulan yang dinamakan dengan Forum Komunikasi Masyarakat Agraris (FKMA) yang sudah membuat kongres dua kali dan akan membuat sebuah sekolah tani sebagai bentuk regenerasi perjuangan mereka dalam hal pertanian dan perjuangan.

Keenam, jaringan PPLP sangat kosmopolit, PPLP ini juga tidak pernah menutup diri dari orang-orang luar PPLP yang ingin berjuang bersama yang kemudian disebut dengan teman solidaritas, atau teman-teman jaringan PPLP. Orang luar ini diperbolehkan bersolidaritas tapi tidak boleh mencampuri urusan dalam PPLP. Jika ingin melakukan perjuangan, maka silahkan berjuang dengan cara masing-masing dan di luar PPLP, teman-teman solidaritas PPLP ini adalah LBH sebagai lembaga bantuan hukum yang mendampingi PPLP, LP2NU, para Ulama yang membuat sebuah kegiatan perjuangan dengan sebutan Mujadahan, yaitu berdoa bersama memohon perlindungan kepada Allah SWT agar diberikan ketenangan, dijauhkan dari kezoliman dan mendapatkan pertolongan dari-Nya dalam perjuangan menolak pasir besi.

Kemudian teman solidaritasnya ada akademisi yang melakukan penelitian di pesisir Kulon Progo dengan berbagai kasus yang diangkat, seniman yang ikut bersolidaritas di FKMA dan membuat beragam seni yang dapat mencerminkan perjuangan dan memperomosisikan bagaimana kasus dan perjuangan di Kulon Progo. Semua teman-teman solidaritas PPLP ini tidak hanya ada di dalam negeri tapi juga dari Luar Negeri seperti Perancis, Australia yang ikut mencari informasi mengenai perusahaan yang akan menanamkan modalnya dalam pertambangan ini, dan masih ada yang lainnya yang berasal dari luar negeri. Seperti yang diungkapkan Bu IS petani Bugel dan pejuang perempuan dalam PPLP

“teman jaringan kita banyak mba, ada yaang di dalam negeri, dari luar negeri juga ada, setiap ada kegiatam pasti ada orang luar negeri itu, ada ulama, LBH, akademisi seperti dosen dari UGM, mahasiswa yang melakukan penelitian dan sampai sekarang masih berhubungan baik, seniman-seniman, orang dalam kraton juga ada yang terus memberikan semangat agar tetap berjuang melawan rencana pertambangan pasir besi”.

Selain itu, PPLP ini juga bersolidaritas dengan beragam masyarakat yang memiliki nasib yang sama seperti di Kebumen, Pati, Blora, dan sepanjang pantai selatan Jawa sampai Cianjur yang tergabung dalam sebuah forum bernama Forum Komunikasi Masyarakat Agraris (FKMA). Dari keenam ciri GSB ini, PPLP sudah memenuhi semua ciri atau karakteristik tersebut sehingga dapat dikatakan bahwa PPLP ini merupakan sebuah gerakan sosial baru. Gerakan petani yang sudah maju, otonom, dan jaringan yang luar biasa. Semua kegiatan atau aktivitas perjuangannya didasarkan pada pengalaman mereka dalam berjuang dari setiap tahunnya. Saat ini PPLP sudah berusia delapan tahun, dalam perjalannya mereka kini hanya membuat sebuah strategi yang khas yaitu “menanam”, karena menanam adalah cara yang dianggap paling ampuh untuk menolak pertambangan dan agar para petani ini bisa tetap hidup dan terus berjuang.

Ikhtisar

Masyarakat Pesisir pantai Kulon Progo yang terkena rencana pertambangan pasir besi ini membentuk sebuah gerakan sosial atau gerakan petani karena mereka adalah para petani yang memperjuangkan lahan mereka yang disebut-sebut sebagai lahan dari Pakualaman, sedangkan pihak Pakualaman sendiri tidak bisa membuktikan bahwa mereka merupakan pemilik lahan pantai yang sekarang digunakan oleh para petani untuk menanam tanaman seperti cabe, semangka, melon, dan sayur-sayuran. Gerakan sosial yang mereka lakukan ini ditujukan untuk mempertahankan lahan mereka agar tidak menjadi pabrik pertambangan pasir besi karena dapat merusak lingkungan, akan terjadi bencana dimana-mana, dan para petani akan kehilangan pekerjaannya sehingga tujuan utama gerakan sosial ini adalah “Menolak tambang pasir besi dengan harga mati”.

Gerakan sosial petani lahan pantai ini bukanlah gerakan sosial seperti gerakan biasanya, gerakan yang dilakukan oleh para petani lahan pantai ini termasuk ke dalam gerakan sosial baru dilihat dari karakteristik gerakan sosial petani lahan pantai ini sesuai dengan karakteristik gerakan sosial baru yang diungkapkan oleh Fauzi (2005), yaitu Basis sosial gerakan adalah campuran antara unsur desa-kota, baik dalam arti fisik maupun kegiatan gerakan; Kepemimpinan diisi oleh orang-orang dengan kemampuan intelektual tinggi; Taktik-taktik utamanya sangat beragam dan mengisi banyak arena pertarungan; Posisi strategisnya umumnya “otonom” dari partai politik dan negara, tetapi memiliki kombinasi hubungan yang khas dengan ragam kekuatan gerakan sosial di sektor lain; Ideologinya tidak hanya menjawab diskriminasi kelas sosial, tetapi juga untuk menghadapi perkara identitas, ekologi dan jender; dan daya jelajahnya kosmopolitan, yang utamanya ditandai oleh pembangunan solidaritas dan aksi global

Gerakan sosial petani lahan pantai di Kulon Progo ini memiliki karakteristik seperti basis sosial gerakan atau aktivitas gerakan ini berada didalam desa dan di kota, melakukan aktivitas bersama dengan masyarakat yang memiliki nasib yang sama, kemudian kepemimpinan diisi oleh orang-orang yang memiliki tingkat pengetahuan tinggi, taktik atau strategi yang digunakan sangat beragam dan dari berbagai bidang seperti politik, hukum dan sosial. Hal-hal yang diangkat oleh PPLP dalam kampanye atau aksi mereka tidak hanya menjawab hal terkait pertanian tapi juga lingkungan, Hak Asasi Manusia, gender seperti peran perempuan dalam gerakan. Daya jelajah paguyuban ini juga kosmopolitan, jaringan PPLP ini membentuk solidaritas dalam menolak pertambangan pasir besi sehingga mereka sering sebut dengan teman-teman solidaritas yang tidak hanya di dalam negeri, orang-orang di luar negeri pun menjadi teman solidaritas dari PPLP.

KEPEMIMPINAN DAN PERAN KEPEMIMPINAN DALAM PAGUYUBAN PETANI LAHAN PANTAI KULON PROGO

Kepemimpinan Paguyuban Petani Lahan Pantai Kulon Progo

Kepemimpinan merupakan kemampuan seseorang atau sekelompok orang yang dapat mempengaruhi orang lain atau pengikutnya. Kepemimpinan merupakan hasil organisasi sosial yang telah terbentuk atau sebagai hasil dinamika interaksi sosial. Sejak mulai terbentuknya suatu kelompok sosial, seseorang atau beberapa orang di antara warga-warganya melakukan peranan yang lebih aktif daripada rekan-rekannya, sehingga orang tadi atau beberapa orang tampak lebih menonjol dari yang lainnya. Munculnya seorang pemimpin sangat diperlukan dalam keadaan-keadaan dimana tujuan kelompok sosial yang bersangkutan terhalang atau apabila kelompok tadi mengalami ancaman dari luar (Soekanto 2003).

Konsep kepemimpinan ini tidak berlaku untuk satu orang saja dalam sebuah organisasi gerakan rakyat yang disebut dengan Paguyuban Petani Lahan Pantai Kulon Progo atau disingkat dengan PPLP-KP. PPLP-KP ini merupakan sebuah wadah atau kelompok non-formal yang berdiri karena gagasan dari salah seorang warga yang tergabung dalam Gapoktan yang melihat perjuangan yang dilakukan oleh desa-desa secara sendiri ini kurang bisa menolak adanya pertambangan pasir besi sehingga diperlukan adanya persatuan agar semakin kuat dalam memperjuangkan lahan pantai yang sudah dikelola sejak zaman nenek moyang mereka sampai turun-temurun, semenjak lahan pantai gersang sampai kini dapat dimanfaatkan bahkan bisa menyekolahkan anak-anak mereka sampai ke perguruan tinggi. Hal ini disampaikan oleh Pak SK yang menjadi ketua Gapoktan sekaligus orang yang menginisiasi organisasi PPLP ini muncul pada saat melakukan observasi langsung sebelum penelitian dimulai.

Paguyuban ini merupakan sebuah wadah untuk mempersatukan masyarakat khususnya dalam perjuangan, umumnya dalam menjalin silaturahmi antar petani lahan pantai yang terbentang di sepanjang pesisir pantai Kulon Progo yang terkena konsesi atau rencana pertambangan pasir besi yang terdiri dari enam desa dan tiga diantaranya ada di kecamatan Panjatan yaitu Desa Bugel, Desa Pleret dan Desa Garongan. Ketiga desa ini jaraknya jauh tapi dengan adanya PPLP ini masyarakat sangat akrab dan saling mengenal apalagi mereka yang menjadi pengurus di PPLP. Selain menjadi wadah perjuangan, PPLP ini juga menjadi tempat saling bertukar pikiran atau informasi seputar pertanian seperti masa tanam, waktu tanam perdana, hama dan penyakit, dan sistem penjualan hasil pertanian yang terkenal dengan sistem lelang, semuanya dibicarakan dalam lingkup PPLP-KP, setiap orang yang ditanya mengatakan hal tersebut jika ditanyakan mengenai makna PPLP-KP, bahkan mereka ada yang mengatakan bahwa jika tidak ada PPLP kami mungkin kami tidak bisa menanam seperti ini, entah karena lahannya yang sudah dirampas atau karena kurangnya pengetahuan kami dalam menanam apalagi mengatasi hama dan penyakit yang menyerang tanaman kami.

Selain itu, setiap ditanya mengenai siapa pemimpin PPLP, mereka menjawab dengan sedikit ragu, padahal mereka tahu karena beliau sering berorasi pada saat ada acara ulang tahun PPLP-KP, mengapa demikian? Karena mereka mengatakan bahwa mereka tidak sama-sekali bergantung pada pemimpin PPLP,

kami bertindak berdasarkan hati-nurani kami sendiri sebagai petani, apalagi sebagian besar laki-laki menjawab bahwa

“Lahan ini merupakan lahan kami sendiri dan tanggung jawab kami sehingga perlu untuk mempertahankannya sendiri tanpa bergantung pada orang lain, kami merasakan bahwa kami memiliki lahan ini dan bersatu dalam wadah yang disebut paguyuban petani yang meyatukan kami dan menaungi kami, memberikan informasi bagaimana kami bisa berjuang dan mempertahankan lahan kami selanjutnya terserah-masing-masing orang untuk ikut dalam setiap aksi yang dilakukan PPLP-KP ini.: (lihat lampiran 7)

Pada kenyataannya semua warga antusias dalam mengikuti beragam strategi atau aksi yang telah dilakukan PPLP-KP untuk menolak tambang besi, diantaranya demo yang telah dilakukan diberbagai tempat bahkan sampai tingkan DPR RI walaupun tanpa hasil, beragam strategi dicoba sampai pada suatu strategi baru yang khas dari petani ini adalah “menanam”. Karena dengan menanam, lahan ini adalah kekuasaan kami, tanggung jawab kami sehingga kami bisa melakukan apa saja untuk lahan kami termasuk mengusir bahkan menghukum orang yang mengganggu lahan kami, senjata yang kami punya merupakan senjata yang sering kami gunakan untuk menanam tapi jika ada kemungkinan pengganggu datang, alat tersebut bisa digunakan menyerang mereka. Oleh karena itu, masyarakat PPLP ini mengatakan bahwa pemimpin mereka adalah mereka sendiri dan mereka juga mengakui adanya pemimpin dalam PPLP namun bukan sebagai panutan atau tempat bergantung. Pemimpin PPLP mereka anggap sebagai orang yang mereka hormati juga dan melakukan hal-hal yang bersifat administratif.

PPLP ini berbeda dengan gerakan petani lainnya, karena berasaskan ikatan kekeluargaan sehingga tidak memiliki daftar anggota tetap dalam wadah atau dalam paguyubannya apalagi dengan Serikat Petani Pasundan (SPP) yang sangat bergantung pada perintah atau arahan dari sang pemimpin yaitu Agustiana. Para pengurus mengatakan hal demikian terutama para “korlap” yang diwawancarai. Setiap “korlap” memiliki kapasitas masing-masing dalam masyarakat karena cakupan wilayah yang sangat luas sehingga para “korlap” di setiap desa ini tidak sendirian, ada dua orang bahkan tiga orang, contohnya di Desa Bugel, terdapat tiga orang “korlap” dan salah-satunya adalah perempuan. Beliau adalah aktivis desa bugel yang juga berani melawan setiap orang yang berani mengambil lahan mereka, selalu ikut dalam setiap aksi dan sebagai perempuan tangguh dan pandai dalam segala bidang termasuk hukum. Beliau adalah Ibu Isyanti, beliau yang memberikan semangat dan menggerakkan para perempuan di Desa Bugel untuk menolak tambang besi dan terus menanam, bekerja sama dengan para suami untuk tetap menanam di lahan mereka.

Pernah ada kejadian mengenai adanya penghadangan enam mobil dari pihak peetambangan yang datang ke Desa Bugel, Bu Isyanti dan kakaknya menghadang keenam mobil tersebut dengan membawa parang, saat Bu Isyanti berteriak menghentikan mobil tersebut, semua ibu-ibu di desa pesisir itu keluar dengan membawa senjata masing-masing, pada waktu itu para lelaki sedang akan melaksanakan shalat maghrib. Seketika itu mereka langsung diinterogasi dan mobil pihak perusahaan itu pun diselidiki, mobil itu pun mengalami beberapa kerusakan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa mereka tidak bergantung pada perintah atau pengaruh dari pemimpin PPLP, melakukan perlawanan atas hati nurani dan

tanggung jawab sendiri karena setiap diri adalah pemimpin bagi dirinya sendiri sebagaimana dituturkan oleh Widodo saat diwawancarai. Kepemimpinan PPLP ini bukanlah tipe otokratik, karena pemimpin mereka tidaklah memiliki kekuasaan sepenuhnya seperti halnya Soeharto. PPLP ini juga bukan tipe paternalistik karena pemimpin yang dipilih bukan tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh besar, bukan juga tipe demokrasi atau bahkan laissez faire karena bukan pemimpin yang membebaskan anggotanya untuk mengurus organisasinya sendiri. Kepemimpinan PPLP ini mungkin bisa disebut dengan kepemimpinan kolektif karena semua anggota memberikan pengaruhnya masing-masing dan merasa memiliki perjuangan ini dalam diri mereka.

Selain itu, PPLP ini memiliki pembagian tugas dalam menjalankan kegiatan organisasinya. Dari setiap unit ini terdapat koordinator lapangan yang bertugas sebagai pemandu atau penggerak dalam perjuangannya. “korlap” ini dipilih karena mereka merupakan tokoh masyarakat yang bersedia meluangkan waktu mereka untuk mengurus perjuangan dan dapat dipercaya oleh masyarakat sebagai wakil mereka dalam forum PPLP-KP. Sistem kepemimpinan yang diterapkan PPLP ini merupakan penerapan dari hasil belajar mereka dari pengalaman sebelumnya. Seperti organisasi biasanya, pemimpin adalah orang yang sangat berpengaruh dan mengetahui segala seluk beluk organisasi, strategi dan taktik yang digunakan dalam sebuah gerakan sosial, seperti yang terjadi pada SPP. Pemimpin SPP yaitu Agustiana merupakan sosok pemimpin yang kharismatik dan sangat berpengaruh dalam organisasinya.

Paguyuban petani ini cukup berbeda, karena pemimpin disini tidak mempengaruhi banyak hal dalam perjuangan menolak pertambangan, bahkan dengan sengaja untuk tidak mengikutsertakan dalam setiap forum PPLP, mengapa demikian? Karena setiap pertemuan yang disertakan dengan pemimpin PPLP ini selalu ada intel yang datang mengawasi rapat forum PPLP. Pak SK petani Bugel mengatakan bahwa:

“Dulu itu sering sekali kalo lagi rapat itu ada intel yang ngeliatin, biasanya SMS atau tlpn, nanyain kapan dan dimana rapatnya? Biasanya yang diawasi itu ya ketua PPLP nya ini, jadi setiap ada ketuanya pasti ada intel gitu dari pihak pro itu, terus kalo udah selesai ditanyain apa aja hasilnya gitu, dia pasti tahu dimana kita rapat, makanya kalau rapat gak ada ketuanya, gak ada intelnya. Oleh karena itu, untuk keamanan dan kenyamanan bersama ya kita gak usah ngasih tahu ketuanya aja, nanti hasilnya baru dikasih tahu”. (lihat lampiran 7

Peran Kepemimpinan dalam Paguyuban Petani Lahan Pantai

Peran kepemimpinan yang diperoleh dari cerita masyarakat petani mengenai pemimpin mereka baik dalam PPLP secara umum sama pemimpin di dalam unit masing-masing diperoleh peran seperti penghubung eksternal, penghubung internal, penyalur aspirasi masyarakat, pengatur strategi perlawanan, pengawasan kinerja anggota PPLP dalam menjalankan misinya, penyampai informasi dan memperluas jaringan. Peran-peran tersebut diidentifikasi dalam penelitian ini, pemimpin dalam unit desa ini memiliki peran sebagaimana terlihat dalam tabel sebaran frekuensi peran kepemimpinan yang memperlihatkan peran

yang dominan dilakukan oleh para pemimpin atau koorlap mereka. Pak SM Petani Bugel mengatakan

“Peran kami ini ya ikut kumpul forum PPLP, jika ada masalah di masyarakat atau aspirasi masyarakat nanti kami sampaikan di forum, hasilnya kami sebarkan kepada masyarakat juga, kemudian dalam melakukan aksi, kami yang mengatur strategi di lapangan, taktik atau strategi yang dipilih sudah dipicarakan terlebih dahulu di forum PPLP. Untuk memperluas jaringan atau hubungan dengan orang luar itu humas yang lebih tahu, sebagai penyampai informasi apa saja terkait dengan perjuangan termasuk hasil dari forum PPLP, mau lewat apa saja bisa, mengumpulkan orang dalam 10 menit saja mudah apalagi menyampaikan informasi, lewat sms juga kan Cuma beberapa detik sudah terkirim”. (lihat lampiran 7)

Karena peran inilah maka tingkat pengetahuan pemimpin ini juga harus tinggi karena peran untuk menyampaikan informasi ini penting untuk kemajuan gerakan sosial atau perlawanan.

Tabel 5 Jumlah dan Presentasi Anggota PPLP menurut Peran Kepemimpinan dan Pernyataan Ya atau Tidak

Peran Kepemimpinan	Anggota PPLP				Total (%)
	Ya		Tidak		
	n	%	n	%	
Penghubung eksternal	2	6,7	28	93,3	100
Penghubung internal	30	100,0	0	0,0	100
Penyalur aspirasi	25	83,3	5	16,7	100
Pengatur strategi lapang	25	83,3	5	16,7	100
Pengawas kinerja anggota	11	36,7	19	63,3	100
Penyampai informasi	30	100,0	0	0,0	100
Memperluas jaringan	3	0,3	27	99,7	100

Sebagaimana terlihat pada tabel tersebut maka peran kepemimpinan yang dilakukan oleh para “korlap” di setiap unit adalah sebagai penghubung internal, penyalur aspirasi, pengatur strategi perlawanan, penyampai informasi. Sedangkan penghubung eksternal, pengawas, dan memperluas jaringan bukan sebagai peran dari “korlap” secara umum.

Peran kepemimpinan secara keseluruhan ini dijalankan oleh koordinator lapangan. Penghubung internal merupakan peran kordinator untuk menjaga hubungan antar para petani lahan pantai. Jika ada kegiatan atau acara PPLP yang dilakukan oleh “korlap” adalah menyebarkan informasi dan mengundang seluruh petani lahan pantai, sekarang sudah canggih, tidak perlu memakai surat, cukup dengan mengirimkan pesan singkat maka undangan akan segera tersebar. Tidak butuh waktu lama untuk mengumpulkan para petani lahan pantai, cukup dengan

pesan singkat yang dikirimkan untuk berkumpul maka mereka akan segera berkumpul.

Penyalur aspirasi masyarakat juga merupakan peran dari para “korlap”. Jika terjadi hal yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat atau ada keinginan masyarakat seperti membuat pengajian maka kordinator yang akan menyampaikannya di Forum PPLP yang diselenggarakan setiap bulannya. Atau dalam pertemuan PPLP yang *insidental*. Kordinator lapangan juga melakukan peran lainnya seperti memberikan informasi terkait beberapa informasi penting terkait dengan perjuangan menolak tambang besi tersebut. Setiap hasil dari pertemuan atau forum yang dilakukan PPLP akan segera tersebar setelah rapat selesai dan kordinator menyampaikan informasinya baik melalui pesan singkat maupun melalui perkumpulan yang dilakukan di beberapa tempat atau melalui para suami dari ibu-ibu petani PPLP yang ikut dalam perkumpulan.

Beragam strategi yang dilakukan PPLP juga merupakan kesepakatan bersama. Sebelum melakukan gerakan atau aksi masa, misalnya aksi demo di depan gedung DPRD maka kordinaor lapangan inilah yang mengatur strategi kepada para petani yang ikut demo tersebut. Mereka yang mengatur strategi ini dipercaya oleh masyarakat dan menjadi garda terdepan dalam melakukan aksi. Selain peran yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat peran lain yang tidak dilakukan oleh “korlap” secara umum. Peran penghubung eksternal merupakan peran yang dilakukan oleh divisi Humas. Penghubung eksternal inilah yang menghubungkan masyarakat petani dengan teman-teman solidaritas yang menjadi jaringan dari PPLP. (lihat Lampiran 5)

Setiap orang luar yang masuk dan ingin bersolidaritas dengan PPLP ini harus melalui satu pintu, yaitu harus menemui humas PPLP terlebih dahulu. Kemudian karena perannya sebagai penghubung eksternal juga sebagai perluasan jaringan PPLP. Sedangkan peran pengawasan dalam setiap kinerja pengurus PPLP ini dilakukan oleh setiap anggota PPLP masing-masing. Setiap anggota PPLP ini memiliki kapasitas masing-masing dalam perjuangannya dan memiliki cara sendiri-sendiri dalam meakukan aksi perjuangan menolak tambang besi ini dan kemudian disatukan oleh Paguyuban Petani Lahan Pantai ini.

Ikhtisar

Kepemimpinan merupakan kemampuan seseorang atau sekelompok orang yang dapat mempengaruhi orang lain atau pengikutnya. Namun konsep ini tidak berlaku untuk pemimpin Paguyuban petani lahan pantai Kulon Progo. Hal ini menjadi sangat unik, karena pengalaman dari organisasi dalam gerakan sosial, pemimpin merupakan orang yang sangat mempengaruhi aktivitas gerakan, kemajuan dan kemunduran suatu gerakan sosial biasanya dipengaruhi oleh pemimpin. PPLP ini merupakan organisasi dalam gerakan sosial yang benar-benar bersifat kolektif, tidak mau bergantung kepada siapapun karena menurut mereka, orang yang paling berpengaruh dan memiliki tanggung jawab atas apa yang diperjuangkan saat ini adalah diri mereka sendiri sebagai seorang petani lahan pantai. Oleh karena itu, pemimpin bukanlah tokoh utama dalam gerakan sosial ini.

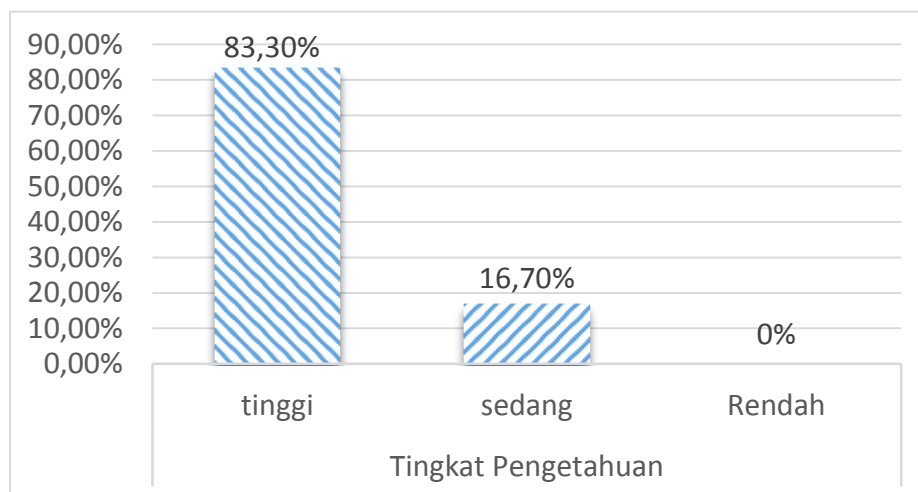
PPLP ini tidak menokohkan seorang pemimpin dalam organisasinya karena akan menimbulkan ketergantungan yang akan menghambat jalannya perjuangan.

Pemimpin saat ini hanya sebagai orang yang berurusan dengan hal-hal yang bersifat administratif, sedangkan peran kepemimpinan selanjutnya dilakukan oleh kordinator lapang (“korlap”) yang dipercaya oleh masyarakat sebagai wakil mereka di setiap desa. Jumlah “korlap” di setiap desa ini berbeda-beda dan dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Peran kepemimpinan yang dilakukan adalah menjadi penghubung eksternal yang lebih diberikan kepada humas, penghubung internal, pengatur strategi di lapangan, memberikan informasi terkait dengan perjuangan, menyampaikan aspirasi masyarakat di forum PPLP, memperluas jaringan.

TINGKAT PENGETAHUAN PEMIMPIN DALAM GERAKAN SOSIAL

Konsep kepemimpinan yang didefinisikan berbeda oleh Soekanto (2003) dan Wiriadihardja (1987), walaupun sama-sama menunjukkan proses mempengaruhi orang lain, tapi wiriadihardja menambahkan adanya tujuan dan mencapai tujuan. Oleh karena itu, kepemimpinan merupakan proses mempengaruhi orang lain atau orang yang dipimpin baik perorangan maupun kelompok dan mengarahkan pada pencapaian tujuan. Selain itu, kepemimpinan ini merupakan kemampuan dari seorang pemimpin yang sedang menjalankan tugasnya dalam mengarahkan anggotanya, kelompoknya atau pengikutnya untuk mencapai tujuan bersama baik melalui anjuran, ajakan, sugesti, atau perintah.

Paguyuban petani ini merupakan sebuah organisasi yang menerapkan konsep berbeda dalam kepemimpinan. Menurut mereka kepemimpinan ada dalam diri masing-masing orang termasuk orang-orang yang menjadi anggota dari paguyuban petani lahan pantai tersebut. Oleh karena itu, PPLP ini tidak perlu untuk menokohkan seseorang untuk menjadi pemimpin. Namun, setiap desa memiliki koordinator lapang yang bertugas dan berperan sebagai orang yang dipercaya oleh masyarakat dan memiliki waktu luang untuk mengurus perjuangan dan mempersatukan masyarakat di desanya. Tugas dan peran seorang pemimpin ada dalam koordinator lapang. Koordinator ini sendiri tidaklah sendiri dan fleksibel, koordinator ini bisa berganti orang kapan saja dan dimana saja. Selain dari perannya sebagai pemimpin, pengetahuan mereka juga sangat luas karena mereka juga mempunyai kepercayaan dari masyarakat untuk menyampaikan informasi terkait rencana pertambangan ini. Pada penelitian ini diketahui bahwa tingkat pengetahuan pemimpin termasuk tinggi, dapat dilihat pada Gambar 2 berikut :



Gambar 2 Grafik jumlah dan persentasi tingkat pengetahuan pemimpin PPLP

Setiap koordinator memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada para anggota PPLP mengenai beragam hal kepada masyarakat petani lahan pantai termasuk dampak dari adanya pertambangan pasir besi jika tetap dilaksanakan di lahan pantai yang sudah dijadikan sebagai lahan pertanian puluhan tahun yang lalu.

Setiap petani yang ditanyakan mengenai dampak pertambangan lahan pantai ini, semua hampir sama menjawab banyak hal diantaranya:

1. Petani akan kehilangan pekerjaannya karena lahan penghidupan atau sumber nafkah kami telah diambil oleh pertambangan.
2. Jumlah pengangguran di Kulon Progo akan bertambah banyak karena jumlah petani disepanjang pesisir ini berjumlah sekitar 10 000 orang
3. Walaupun perusahaan akan mempekerjakan masyarakat petani lahan pantai yang tergusur lahannya ini, namun jumlah karyawan yang bisa masuk hanya 2000 orang tidak sebanding dengan jumlah petani yang menjadi korban.
4. Perusahaan pasti menentukan syarat dan ketentuan bagi karyawan yang dapat masuk ke pertambangan sedangkan banyak nenek dan kakek bahkan bapak-ibu diatas 40 tahun yang dulu sebagai petani akan tidak mendapatkan lagi pekerjaan sehingga angka kemiskinan pun akan bertambah.
5. Ekosistem akan rusak, Menurut penuturan dari profesor UGM dalam bidang pertanian bahwa lahan pasir ini tidak bisa di reklamasi.
6. Akan terjadi banyak bencana alam karena pasir pantai yang telah ditambang tidak dapat menahan arus atau gelombang air.
7. Akan banyak terjadi badai pasir lagi
8. Pasir yang telah ditambang tidak dapat ditanami kembali, seperti yang terjadi di daerah yang pernah mengalami pertambangan pasir besi, kini pasirnya tidak dapat menahan airyaitu di daerah Ketawang.
9. Sering terjadi gempa sebagaimana terjadi di daerah tambang pasir lainnya
10. Tataruang akan kacau
11. Kehidupan pun akan hilang karena semua lahan termasuk lahan pemukiman pun diambil untuk dijadikan area pertambangan

Alasan – alasan inilah yang menjadi argumentasi mereka sebagai dampak jika terjadi pertambangan pasir besi di wilayah pesisir kulon progo. Seperti yang diungkapkan oleh Bu IS petani Bugel yaitu:

“profesor dari UGM pernah mengatakan bahwa lahan pasir ini jika ditambang nantinya tidak bisa direklamasi lagi, kehidupan hilang, banyak bencana, terus pernah ada yang melihat contoh yang sudah terjadi yaitu di Ketawang, pasirnya jadi tidak bisa menyerap air, beberapa rumah juga ada yang roboh karena pasirnya turun, saya tidak mau kalau seperti tu. Selain itu, akan banyak pengangguran disini, bukan hanya pengangguran kesejahteraan masyarakat juga menurun apalagi orang yang sudah sepuh yang saat jadi petani masih bisa bekerja dan sehat setelah ada pertambangan dia tidak akan bekerja lagi, sering sakit mungkin karena tidak digerakan, tata ruang juga akan tidak teratur”.(lihat lampiran 7)

Selain itu, rencana pertambangan ini telah menghancurkan kehidupan sosial masyarakat, hubungan darah pun bisa terputus karena adanya rencana ini jika dalam satu keluarga ada pihak pro-kontra, maka terputuslah persaudaraan atau hubungan darah mereka dengan sukarela karena ini merupakan hal yang sudah disepakati bersama dan semua orang menyetujuinya. Komunikasi dengan pihak pro – kontra ini pun sudah tidak efektif dan tidak harmonis lagi.

Pengetahuan dan pemahaman mengenai dampak ini masyarakat dapatkan dari media massa, dari para tokoh masyarakat, koordinator lapang dan berdasarkan pengetahuan lokal yang mereka miliki. Rencana pertambangan pasir besi ini merupakan rencana besar dari pihak pemerintahan Yogyakarta, PT JMI dan perusahaan yang ada di Australia yaitu PT Indomines Australia, pihak yang terlibat dalam rencana besar ini adalah pihak pemerintah dan perusahaan yang dikatakan akan membawa perubahan besar bagi kehidupan masyarakat Yogyakarta dengan pembangunan ini.

Petani lahan pantai ini percaya bahwa pemerintah daerah pun berpihak kepada perusahaan karena mereka sering membantu perusahaan untuk melancarkan pembangunan pabrik pertambangan pasir besi, kemudian setiap demo yang dilakukan oleh PPLP tidak pernah ada tanggapan, mungkin pernah mengatakan bahwa kasus ini akan segera ditindaklanjuti tapi tidak ada tindakan selanjutnya dari pemerintahan tersebut. Selain pertanian lahan pantai yang akan mengalami penggusuran ternyata sekarang pun sudah adalagi rencana penggusuran untuk pembangunan bandara dan perluasan daerah pariwisata. Pembangunan ini mungkin akan memberikan keuntungan pada pihak perusahaan dan pemerintahan tapi kenyataan lain bahwa masyarakat yang terkena dampak langsung akan mengalami kerugian.

Pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) pun kini sudah diperintahkan oleh pihak pemerintah untuk tidak melayani pembuatan sertifikat atas tanah maupun lahan, baik surat hak milik, hak pakai, atau pengalihan hak lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah sengaja melakukan hal ini agar semua tanah dan lahan yang dapat digunakan untuk pembangunan. *“Saat ini BPN juga sudah tidak menerima lagi pembuatan sertifikat hak milik atau pengalihan hak, notaris sekarang pada nganggur di Jogja”* ungkap MW (47 th, petani Garongan) Masyarakat juga mengetahui bahwa lahan yang sebenarnya diakui atau diklaim oleh Pakualaman atau Kesultanan ini bukan lahan milik pemerintah seutuhnya sebagaimana dalam Perjanjian Ganti bahwa lahan yang sebenarnya itu hanya dipinjamkan oleh pihak Belanda dan hanya dikuasai bukan dimiliki. Oleh karena itu, masyarakat tahu dan tidak merasa bahwa tanah pesisir Kulon Progo ini milik pihak kerajaan.

Pengetahuan petani mengenai strategi dan taktik yang digunakan dalam setiap aksi mereka yang mereka jadikan sebagai pelajaran untuk aksi selanjutnya, setiap aksi yang dilakukan akan dievaluasi sehingga beragam strategi yang dilakukan oleh petani ini diketahui kekurangan dan kelebihanannya. Saat ini PPLP memiliki strategi yang khas yaitu “menanam”. Hal ini mereka lakukan berdasarkan pengalaman dan pengetahuan lokal mereka selama ini. Masyarakat yakin bahwa petani harus bersatu dan tetap menanam agar pertambangan pasir besi ini tidak akan pernah terjadi. Keyakinan inilah yang menjadikan masyarakat membuat sebuah gerakan menanam sebagai strategi khas mereka. MW pun menerangkan

“Strategi yang sudah kami lakukan itu beragam, selain demo kemana-mana yang tidak ada hasilnya, menulis surat untuk presiden pun pernah beberapa kali, ikut ranah politik pun pernah walaupun gagal, kemudian bersolidaritas dengan LBH, jaringan lain seperti akademisi, seniman, baik dalam maupun luar negeri, banyak yang sudah kami kerjakan, sekareng strategi yang pas ya inilah menanam, karena dengan menanam petani bisa makan, bisa ngasih makan orang, kita

menguasai lahan kita dan barangsiapa ada yang mengusik ya senjata kita yang angkat bicara, ya senjata dalam menanam itu”.

Sistem kepemimpinan paguyuban ini juga dilihat berdasarkan pengalaman mereka yang mereka jadikan pelajaran dan pengetahuan bahwa menokohkan seseorang saja itu dapat menjadikan orang-orang menjadi ketergantungan dan dapat menghalangi perjuangan atau gerakan jika pemimpinnya itu berhalangan. Hal ini sangat mengganggu perjuangan. Kemudian terdapat kejadian bahwa pihak lawan atau pro terhadap pertambangan ini pasti akan mengintai dan mencari sang pemimpin paguyuban untuk dimintai keterangan mengenai strategi dan kelemahan gerakan sosial ini sehingga PPLP tidak begitu menyerahkan semua urusan kepada sang pemimpin. MW (47 th, petani Garongan) mengatakan

“Dulu PPLP ini pernah juga mengalami bentuk organisasi yang sama seperti struktur organisasi formal lainnya namun seiring berjalannya waktu dan berdasarkan pengalaman yang telah dilalui beginilah jadinya, pemimpin itu tidak ada pengaruhnya, ada pemimpin untuk administrasi saja”.(lihat lampiran 7)

Sekarang, mereka tetap memiliki struktur organisasi yang tidak pernah dirubah sama sekali dari dulu awal mula terbentuk sampai sekarang. Namun mereka tetap tidak menokohkan salah satu dari para pengurus PPLP-KP ini. Karena akan terjadi ketergantungan. Pak DD (Petani Pleret) mengatakan *“Kami PPLP disini memiliki pemimpin seperti halnya yang lain, tapi kami tidak menokohkan karena akan ada ketergantungan, jika menokohkan pada satu orang saja, jika dia berhalangan maka perjuangan ini juga tidak akan berjalan”.*(lihat lampiran 7)

Ikhtisar

PPLP menerapkan kepemimpinan yang berbeda, menurut mereka kepemimpinan ada dalam diri masing-masing orang termasuk orang-orang yang menjadi anggota dari paguyuban petani lahan pantai tersebut. Oleh karena itu, PPLP ini tidak perlu untuk menokohkan seseorang untuk menjadi pemimpin. Namun, setiap desa memiliki koordinator lapang yang bertugas dan berperan sebagai orang yang dipercaya oleh masyarakat dan memiliki waktu luang untuk mengurus perjuangan dan mempersatukan masyarakat di desanya. Tugas dan peran seorang pemimpin ada dalam koordinator lapang. Koordinator ini sendiri tidaklah sendiri dan fleksibel, koordinator ini bisa berganti orang kapan saja dan dimana saja.

Selain dari perannya sebagai pemimpin, pengetahuan mereka juga sangat luas karena mereka juga mempunyai kepercayaan dari masyarakat untuk menyampaikan informasi terkait rencana pertambangan ini. Setiap koordinator lapang yang melakukan peran kepemimpinan, tingkat pengetahuan yang tinggi penting untuk menjalankan perannya. Setiap koordinator memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada para anggota PPLP mengenai beragam hal kepada masyarakat petani lahan pantai termasuk dampak dari adanya pertambangan pasir besi jika tetap dilaksanakan di lahan pantai yang sudah dijadikan sebagai lahan pertanian puluhan tahun yang lalu. Tingkat pengetahuan ini bisa dilihat dari beragam bidang pengetahuan baik pertanian, politik, hukum, strategi perlawanan termasuk strategi dalam sistem kepemimpinan yang digunakan, dan mengenai hal-hal yang terkait dengan rencana pertambangan

HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN DAN PERAN KEPEMIMPINAN DALAM PAGUYUBAN PETANI LAHAN PANTAI

Gerakan sosial yang dilakukan petani yang menjadi anggota paguyuban petani lahan pantai ini sedikit banyak dipengaruhi oleh paguyubannya, beberapa orang yang berhubungan langsung dengan petani maupun orang diluar petani yang juga ikut bersolidaritas dalam perjuangan. Beragam peran kepemimpinan pun dilakukan oleh beberapa orang yang dipercayakan masyarakat bahkan ada yang dijadikan suri tauladan dalam perjuangan maupun dalam pertanian atau bertani. Banyak orang yang menjadi teman solidaritas paguyuban ini juga karena adanya peran dari petani yang berperan dalam menjalin hubungan dengan luar paguyuban. Hal ini tidak mudah jika tidak didukung oleh pengetahuan mereka. Secara tidak langsung, teman-teman solidaritas yang juga sering melakukan diskusi dan bercerita yang juga memberikan pengetahuan baru untuk para petani lahan pantai ini.

Tingkat pengetahuan pemimpin ini sangat berpengaruh dalam gerakan sosial ini karena akan mempengaruhi strategi yang akan digunakan oleh organisasi petani untuk memperjuangkan lahan mereka agar tidak terjadi pertambahan pasir besi di wilayah pesisir tersebut. Setelah ditemukan suatu strategi baru maka peran kepemimpinan pun berjalan yaitu mengkoordinasikan dan menginformasikan strategi yang telah dibuat bersama dalam forum PPLP sebelumnya. Selain itu, pengetahuan pemimpin dalam hal mencari teman solidaritas atau teman jaringan ini sangat diperlukan dalam menjalankan peran kepemimpinannya sebagai orang memperluas jaringan sehingga jaringan organisasi petani ini kosmopolitan sesuai dengan ciri atau karakteristik dari gerakan sosial baru.

Oleh karena itu, penelitian ini disusun untuk melihat hubungan antara peran kepemimpinan dengan tingkat pengetahuan pemimpin dalam sebuah gerakan sosial yang dilakukan paguyuban petani lahan pantai di Kulon Progo. Hubungan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6 Jumlah dan Presentase Anggota PPLP menurut Tingkat Pengetahuan Pemimpin dan Peran Kepemimpinan Paguyuban Petani Lahan Pantai

Tingkat Pengetahuan	Peran kepemimpinan						Total	
	Rendah		Sedang		Tinggi		n	%
	n	%	n	%	n	%		
Rendah	0	0	0	0	0	0	0	0
Sedang	3	60	0	0	2	40	5	100
Tinggi	2	8	11	44	12	48	25	100
Jumlah	5		11		14		30	100

Hubungan tingkat pengetahuan dan peran kepemimpinan ini juga terlihat dari yang diungkapkan Pak SM (Petani Bugel) yaitu

“peran kami ini ya ikut kumpul forum PPLP, jika ada masalah di masyarakat atau aspirasi masyarakat nanti kami sampaikan di forum, hasilnya kami sebarkan kepada masyarakat juga, kemudian dalam melakukan aksi, kami yang mengatur strategi di lapangan, taktik atau strategi yang dipilih sudah dibicarakan terlebih dahulu di forum PPLP. Untuk memperluas jaringan atau hubungan dengan orang luar itu humas yang lebih tahu, sebagai penyampai informasi apa saja terkait dengan perjuangan termasuk hasil dari forum PPLP, mau lewat apa saja bisa, mengumpulkan orang dalam 10 menit saja mudah apalagi menyampaikan informasi, lewat sms juga kan Cuma beberapa detik sudah terkirim”. (lihat lampiran 7)

Karena peran inilah maka tingkat pengetahuan pemimpin ini juga harus tinggi karena peran untuk menyampaikan informasi ini penting untuk kemajuan gerakan sosial atau perlawanan. Data pada tabel 6 menunjukkan kecenderungan adanya hubungan antara tingkat pengetahuan pemimpin dengan peran kepemimpinan dalam Paguyuban Petani lahan pantai ini. Hal tersebut didukung dengan hasil uji statistik hasil pengukuran Chi-Square menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara tingkat pengetahuan pemimpin dengan peran kepemimpinan di PPLP. Hubungan tersebut bernilai nyata sebesar 0,011 persen, artinya hipotesis diterima karena $0,011 < 0,05$. Angka 0,05 persen merupakan standar kesalahan yang ditetapkan oleh peneliti seperti yang terlihat dalam tabel uji statistik berikut :

Ikhtisar

Petani yang termasuk dalam paguyuban petani lahan pantai ini sangat percaya kepada para “korlap”nya untuk membawa mereka melakukan aksi-aksi atau kegiatan gerakan, sehingga gerakan sosial yang dilakukan petani yang menjadi anggota paguyuban petani lahan pantai ini sedikit banyak dipengaruhi oleh paguyubannya, baik beberapa orang yang berhubungan langsung dengan petani maupun orang diluar petani yang juga ikut bersolidaritas dalam perjuangan. Beragam peran kepemimpinan pun dilakukan oleh beberapa orang yang dipercayakan masyarakat bahkan ada yang dijadikan suri tauladan dalam perjuangan maupun dalam pertanian atau bertani. Seiring dengan menjalankan perannya sebagai petani dan peran kepemimpinan di masing-masing unit, para “korlap” ini harus memiliki tingkat pengetahuan yang tinggi agar dapat mendukung peran dari kepemimpinannya.

Peran kepemimpinan ini didukung dengan tingkat pengetahuan yang tinggi. Masyarakat juga memilih mereka sebagai “korlap” itu salah satunya karena pengetahuan mereka, seperti kemampuan berkomunikasi yang baik juga diperlukan untuk dapat menyampaikan informasi terkait dengan perjuangan atau gerakan perlawanan terhadap rencana pertambangan pasir besi ini. Penelitian ini telah membuktikan bahwa tingkat pengetahuan memiliki hubungan dengan peran kepemimpinan dari para “korlap”. Semakin tinggi tingkat pengetahuannya, maka semakin tinggi peran kepemimpinan yang dilakukan oleh para “korlap” tersebut

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Paguyuban petani lahan pantai Kulon Progo ini merupakan organisasi petani yang otonom dalam melakukan gerakan sosial menolak rencana pertambangan pasir besi sebagai respon dari salah satu pembangunan berencana oleh pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Sampai saat ini masih dilakukan dengan beragam strategi dari segala bidang, baik politik, hukum, sosial dan ekonomi. Paguyuban petani ini atau dikenal dengan PPLP-KP ini memiliki karakteristik yang sesuai dengan karakteristik gerakan sosial baru yang dijelaskan oleh Fauzi (2005) yaitu PPLP ini merupakan organisasi yang otonom atau mandiri, tidak bercampur dengan pemerintah maupun LSM, karena mereka selalu belajar dari pengalaman mereka mengenai hal yang berhubungan dengan perlawanan termasuk bergabung dengan LSM.

Kemudian, Isu yang diangkat oleh PPLP ini bukan hanya isu pertanian saja karena mereka adalah petani, namun PPLP juga menyuarakan mengenai ekologi, gender, AMDAL, dan segala bentuk diskriminasi seperti penggusuran. PPLP ini memperluas solidaritas dengan banyak teman jaringan atau teman solidaritas baik di dalam maupun luar negeri, masyarakat dari daerah luar Kulon Progo yang memiliki nasib yang sama dengan Kulon progo, mengikuti aksi bersama sehingga bisa dikatakan bahwa PPLP ini jaringannya kosmopolit sehingga gerakan sosial ini termasuk dalam gerakan sosial baru.

Kepemimpinan dalam PPLP ini juga berbeda dengan konsep kepemimpinan yang biasa seperti yang diungkapkan oleh Soekanto, mereka berpendapat bahwa pemimpin mereka adalah mereka sendiri karena merekalah yang bertanggungjawab atas lahan mereka sendiri. Walaupun memiliki seorang pemimpin dalam PPLP, tugas atau perannya hanya sebatas administratif saja tapi posisinya dalam PPLP diakui oleh semua petani paguyuban. Mereka tidak mau menokohkan karena dengan menokohkan atau menjadikan pemimpin ini panutan sama saja dengan menumbuhkan rasa ketergantungan yang dapat menghambat perjuangan. Oleh karena itu, peran kepemimpinan ini ditugaskan kepada kordinator lapang dari masing-masing unit yang jumlahnya tidak hanya satu dan dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi.

Peran kepemimpinan ini harus didukung dengan tingkat pengetahuan yang tinggi agar para kordinator lapangan dapat menjalankan perannya dengan baik, baik sebagai penghubung eksternal yang lebih diberikan kepada humas, penghubung internal, pengatur strategi di lapangan, memberikan informasi terkait dengan perjuangan, menyampaikan aspirasi masyarakat di forum PPLP, memperluas jaringan. Dalam penelitian ini terbukti adanya hubungan antara tingkat pengetahuan dengan peran kepemimpinan dalam paguyuban petani lahan pantai ini sehingga semakin tinggi tingkat pengetahuan maka semakin tinggi peran kepemimpinan yang dijalankan oleh para kordinator lapang.

Saran

Rencana pembangunan pabrik pertambangan pasir besi merupakan pembangunan atau bentuk perubahan berencana untuk mensejahterakan masyarakat pesisir, namun kenyataannya masyarakat menolak hal ini karena masyarakat tidak memerlukan pabrik pertambangan melainkan lahan pantai yang telah diolah puluhan tahun yang lalu sampai akhirnya dapat memberikan kesejahteraan. Para petani lahan pantai ini pada kenyataannya tidak perlu lagi mendapatkan pembangunan untuk mensejahterakannya karena kearifan lokal mereka adalah lahan pantai ini yang harus dijaga. Rencana pertambangan ini akhirnya ditolak karena tidak mendapatkan respon positif dari masyarakat. Oleh karena itu, setiap pembangunan berencana itu harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang akan menerimanya, pembangunan ini harus partisipatif agar mendapatkan respons yang positif dari masyarakat.

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah penelitian serta dapat menambah pengetahuan masyarakat mengenai peran kepemimpinan dan gerakan sosial baru. Peneliti menyadari keterbatasan dan kekurangan pada penelitian ini, baik dari segi metode penelitian maupun analisis yang dilakukan terhadap fenomena yang terjadi. Penelitian mengenai kepemimpinan di PPLP ini hanya sampai mendeskripsikan peran kepemimpinan dan dalam gerakan sosial baru. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang lebih menyeluruh dan lebih mendalam mengenai kepemimpinan dalam gerakan sosial baru

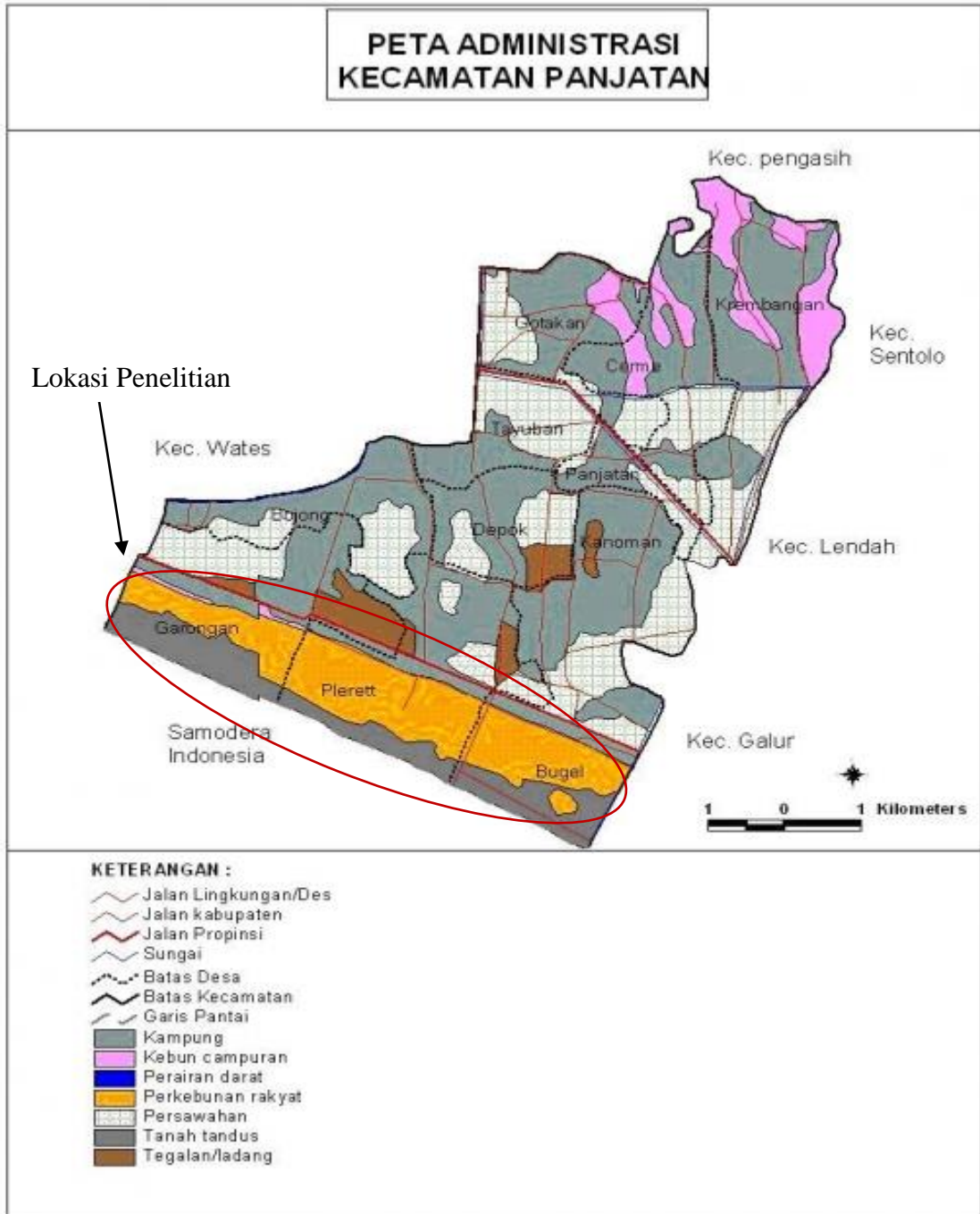
DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani. 2012. Sosiologi Skematika, Teori dan Terapan. Jakarta (ID): Bumi Aksara
- Aji GB. 2005. Tanah untuk Penggarap, Pengalaman Serikat Petani Pasundan Menggarap Lahan-lahan Perkebunan dan Kehutanan. Edisi Pertama. Bogor (ID). Pustaka LATIN
- Alfian MA. 2009. Menjadi Pemimpin Politik. Jakarta (ID): PT Gramedia Pustaka Utama
- Apriyanto D, Harini R. 2013. Dampak Kegiatan Pertambangan Batubara terhadap Kondisi Sosial-Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Loa Ipuh Darat, Tenggara, Kutai Kartanegara. Artikel Ilmiah. Universitas Gadjah Mada. [internet]. [Diunduh pada tanggal 05 Nopember 2013, pukul : 11.13]. Tersedia pada : <http://lib.geo.ugm.ac.id/ojs/index.php/jbi/article/download/96/93>
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2010. Jumlah Penduduk di Indonesia.
- Bungin B. 2005. Metodologi Penelitian Kuantitatif. Jakarta (ID) : Prenada Media
- Fauzi N. 2005. Gerakan-gerakan Rakyat Dunia Ketiga. Yogyakarta: Resist Book.
- Getol G. 2010. *Good Leadership vs Bad Leadership*. Jakarta (ID): PT Elex Media Komputindo
- Martono, N. 2011. Sosiologi Perubahan Sosial: perspektif Klasik Modern, Posmodern, dan Poskolonial. Jakarta (ID) : Rajawali Pers
- Rivai, V , Mulyadi D. 2012. Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi. Jakarta (ID) : Rajawali Pers
- Sauki M, Hestu W P, Budhiawan H, Syaifullah A, Cahyono E, dan Yanuardi D. 2009. Memahami dan Menemukan Jalan Keluar dari Problem Agraria dan Krisis Sosial Ekologi : Konflik Lahan Pasir Besi Dan Dinamika Sosial Ekonomi Petani Pesisir Kulon Progo. Bogor (ID). Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta dan Sajogyo Institute
- Singarimbun M, Effendi S. 1989. Metode Penelitian Survei. Jakarta (ID): LP3ES. 334 hal.
- Soekanto S. 2003. Sosiologi suatu pengantar, Edisi ke-44, Januari tahun 2001. Jakarta (ID) : PT. Raja Grafindo Persada
- Soekanto S. 2007. Sosiologi suatu pengantar, Edisi ke-44, Januari tahun 2001. Jakarta (ID) : PT. Raja Grafindo Persada
- Soekanto S. 2012. Sosiologi suatu pengantar, Edisi ke-44, Januari tahun 2001. Jakarta (ID) : PT. Raja Grafindo Persada
- Sztompka P. 2011. Sosiologi Perubahan Sosial : Konsep Fundamental dalam Studi Perubahan Sosial. Jakarta (ID) : Prenada
- Taib R, Soetarto E, dan Tonny F. 2010. Transformasi Identitas Gerakan dari “Petani” menjadi “Masyarakat Adat”: Upaya Memahami Konflik Pembangunan Bandara Sultan Babullah di Ternate Maluku Utara. Jurnal Sodality Vol.04, No. 02. Bogor (ID). Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat. Institut Pertanian Bogor
- [UU] Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Wiriadihardja, HM. 1987. Dimensi kepemimpinan dalam manajemen. Jakarta (ID): Balai Pustaka

- Widodo. 2013. Menanam Adalah Melawan. Yogyakarta: Tanah Air Beta
- Yulianto EH. 2010. Perubahan Struktur Sosial Dan Kepemimpinan Lokal Masyarakat Akibat Masuknya Perkebunan Kelapa Sawit Di Desa Semuntai Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur. Jurnal EPP.Vo. 1. No.7. 2010 : 39-46. Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman, Samarinda. [internet]. [Diunduh pada tanggal 28 Nopember 2013, Pukul 13:57]. Tersedia pada : <http://agribisnisfpunjurnal.files.wordpress.com/2012/03/jurnal-vol-7-no-1-eko.pdf>

LAMPIRAN

Lampiran 1 Peta Lokasi Penelitian



Lampiran 2 Kuisisioner

Diisi oleh peneliti

Nomor Responden :

Hari/tanggal wawancara : /



KUISISIONER

Sistem Kepemimpinan Paguyuban Petani Lahan Pantai Kulon Progo sebagai Bentuk Gerakan Sosial Baru

Peneliti bernama Idah Faujiati Rosidah, merupakan mahasiswi Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor. Saat ini sedang menyelesaikan skripsi sebagai syarat kelulusan studi. Peneliti berharap Bapak/Ibu dan Saudara/i menjawab kuisisioner ini dengan lengkap dan jujur. Identitas dan jawaban dijamin kerahasiannya dan semata-mata hanya akan digunakan untuk kepentingan penulisan skripsi.

Terima kasih atas bantuan dan partisipasi Bapak/Ibu dan Saudara/i untuk menjawab kuisisioner ini.

I. KARAKTERISTIK RESPONDEN

Karakteristik Umum

1. Nama :
2. Jenis Kelamin : L / P
3. Usia : tahun
4. Alamat :
5. Pendidikan terakhir :
 1. Tidak Sekolah
 2. SD/Madrasah Ibtidaiyah
 3. SMP/ Madrasah Tsanawiyah
 4. SMA/ Madrasah Aliyah
 5. Perguruan Tinggi
6. Pekerjaan :

Karakteristik Gerakan Sosial Baru

No.	Pertanyaan	Jawaban		Keterangan
		Ya	Tidak	
1.	Apakah PPLP ini tidak hanya berbasis di daerah pedesaan?			
2.	Apakah kegiatan PPLP ini tidak hanya diperuntukan untuk anggota PPLP?			
3.	Apakah PPLP ini mempunyai hubungan dengan lain?			
4.	Apakah PPLP ini menggunakan beragam taktik?			
5.	Apakah PPLP mempunyai sistem dan strategi yang khas dan menghindari pemerintah maupun politik?			
6.	Apakah PPLP ini menyuarakan isu yang terkait dengan diskriminasi?			
7.	Apakah PPLP membangun solidaritas dengan luar PPLP?			
8.	Apakah PPLP melakukan aksi yang menyangkut dengan isu lain selain pertanian?			
9.	Apakah PPLP memberikan apresiasi terhadap isu lain selain pertanian?			
10.	Apakah PPLP menggunakan strategi baru yang didasarkan pada pengalaman sebelumnya?			
11.	Apakah PPLP merespon isu yang berasal dari masyarakat?			
12.	Apakah PPLP membentuk struktur organisasi yang disesuaikan dengan strategi dan tujuan PPLP?			
13.	Apakah Anda memahami bahwa isu penambangan ini adalah bagian dari proyek besar dunia?			

Bentuk Sistem Kepemimpinan

No.	Pertanyaan	Jawaban		Keterangan
		Ya	Tidak	
Tingkat Pengetahuan				
1.	Apakah anda mengetahui bentuk kepemimpinan yang diterapkan PPLP?			
2.	Apakah anda mengetahui kelebihan dari sistem tersebut?			
3.	Apakah anda mengetahui kekurangan dari bentuk kepemimpinan tersebut?			

4.	Apakah anda mengetahui asal usul terbentuknya sistem kepemimpinan tersebut?			
5.	Apakah anda mengetahui alasan menggunakan bentuk kepemimpinan tersebut?			
6.	Apakah Anda memahami tentang isu pertambangan pasir besi?			
7.	Apakah anda memahami dampak dari adanya rencana pertambangan pasir besi di Kulon Progo?			
8.	Apakah anda pernah menganalisis mengenai rencana pertambangan pasir besi ini?			
9.	Apakah anda mengetahui orang yang berada dibalik pertambangan?			
10.	Apakah anda memahami akibat dari gerakan perlawanan ini terhadap kehidupan petani?			
Peran Kepemimpinan				
11.	Apakah “korlap” Anda menghubungkan orang luar dengan orang dalam PPLP?			
12.	Apakah “korlap” Anda menghubungkan antar petani dalam melakukan perlawanan?			
13.	Apakah “korlap” Anda menyalurkan aspirasi masyarakat petani dalam melakukan gerakan perlawanan?			
14.	Apakah “korlap” Anda mengatur masyarakat dalam melakukan aksi massa?			
15.	Apakah “korlap” Anda mengawasi kinerja para anggota PPLP lain yang mendapatkan tugas?			
16.	Apakah “korlap” Anda menyampaikan informasi kepada masyarakat anggota PPLP mengenai strategi yang digunakan?			
17.	Apakah “korlap” Anda mendapatkan rekan solidaritas dari luar PPLP?			

Lampiran 3 Panduan Pertanyaan Penelitian

1. Profil Lokasi Penelitian

Hari/ tanggal wawancara :

Lokasi wawancara :

Nama dan umur informan :

Jabatan :

Pertanyaan Penelitian :

1. Bagaimana perkembangan kondisi kependudukan di lokasi penelitian hingga saat ini?
2. Bagaimana perkembangan tingkat pendidikan di lokasi penelitian hingga saat ini?
3. Bagaimana perkembangan mata pencaharian masyarakat di lokasi penelitian hingga saat ini?
4. Bagaimana perkembangan pendapatan masyarakat di lokasi penelitian hingga saat ini?
5. Bagaimana perkembangan kondisi pertanian di lokasi penelitian hingga saat ini?
6. Bagaimana perkembangan kondisi infrastruktur di lokasi penelitian hingga saat ini?
7. Siapa saja tokoh yang dihormati di lokasi penelitian? Apa alasannya?
8. Bagaimana pelapisan sosial di lokasi penelitian? Apa dasarnya?
9. Apa saja kegiatan kemasyarakatan di lokasi penelitian?
10. Bagaimana tradisi dan budaya yang terdapat di lokasi penelitian?
11. Bagaimana keadaan pangan di lokasi penelitian hingga saat ini?

2. Bentuk Sistem Kepemimpinan

(Untuk: responden dan informan lainnya yang mampu memberikan informasi terkait)

Hari/ tanggal wawancara :

Lokasi wawancara :

Nama dan umur informan :

Jabatan :

Tingkat Pengetahuan mengenai kepemimpinan yang diterapkan

1. Bagaimana pendapat anda tentang kepemimpinan?
2. Seberapa pentingkah kepemimpinan itu?
3. Darimana anda memperoleh pengetahuan tentang kepemimpinan yang telah diterapkan PPLP?
4. Mengapa bisa dipilih sistem kepemimpinan seperti itu?
5. Apa keunggulan atau kelebihanannya?
6. Adakah kekurangan dari sistem tersebut?
7. Bagaimana menjaga sistem kepemimpinan tersebut?

Peran pemimpin

1. Bagaimana pembagian tugas yang ada dalam struktur PPLP?
2. Apa saja tugas tiap anggota PPLP?
3. Bagaimana cara menjalankan tugas yang telah diberikan?

4. Adakah tenggang waktu pelaksanaan tugas?
5. Apa saja fungsi dari anggota PPLP yang telah diberi tugas?
6. Apa saja peranan para pemimpin?
7. Bagaimana cara menjalankan peran tersebut?

Jaringan

1. Siapa saja yang telah bergabung membentuk solidaritas dengan PPLP?
2. Bagaimana mereka bisa bersolidaritas di PPLP?
3. Berapa lama mereka bersolidaritas dengan PPLP?
4. Adakah dari mereka yang sudah tidak lagi bersolidaritas dengan PPLP?
5. Apa alasan mereka bersolidaritas dengan PPLP?
6. Apa syarat agar bisa bersolidaritas dengan PPLP?
7. Bagaimana cara PPLP mendapatkan rekan dalam bersolidaritas?

Lampiran 4 Hasil Uji Statistik *Chi Square*

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Pengetahuan * Peran	30	100.0%	0	.0%	30	100.0%

Pengetahuan * Peran Crosstabulation

Count					
		Peran			Total
		Rendah	Sedang	Tinggi	
Pengetahuan	Sedang	3	0	2	5
	Tinggi	2	11	12	25
Total		5	11	14	30

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	9.017 ^a	2	.011
Likelihood Ratio	8.820	2	.012
Linear-by-Linear Association	2.669	1	.102
N of Valid Cases	30		

a. 4 cells (66,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,83.

Lampiran 5 Profil Paguyuban Petani Lahan Pantai Kulon Progo

Paguyuban petani lahan pantai Kulon Progo atau lebih dikenal dengan sebutan PPLP ini merupakan organisasi yang santai, tidak begitu formal dan terbentuk dari sebuah kesepakatan bersama untuk melakukan gerakan sosial secara bersama-sama dari beberapa desa yang terkena rencana pertambangan pasir besi. Keadaan setiap desa berbeda-beda, cara perjuangan atau konflik diantara para desa ini berbeda caranya sesuai dengan kondisi masing-masing desa. Kemudian seorang petani muda yang menemukan teknik pertanian di lahan pasir pun memiliki inisiatif untuk menggabungkan atau mempersatukan perjuangan setiap desa tersebut dalam sebuah wadah, dia adalah Sukarman. SK mengatakan bahwa

“Dulu, setiap desa melakukan perjuangan masing-masing, namun saya lihat kekuatannya masih lemah untuk melawan rencana pertambangan pasir besi, akhirnya saya mencoba mengundang perwakilan dari kelompok tani dari setiap desa untuk menyatukan kekuatan dalam melawan rencana pertambangan.”

Pertemuan ini pun menjadi awal terbentuknya organisasi gerakan sosial yang mereka namakan dengan Paguyuban Petani Lahan Pantai Kulon Progo (PPLP-KP), mereka memilih paguyuban karena organisasi ini bukanlah organisasi formal seperti organisasi biasanya. MW menambahkan bahwa *“...dalam pertemuan itu terdapat tiga pilihan, yaitu menerima tambang besi, menerima dengan syarat, atau menolak dengan harga mati. Serempak warga yang hadir tanpa dikordinir memilih menolak dengan harga mati.”* Hal inilah yang menjadi dasar mereka dalam melawan rencana pertambangan pasir besi ini. Widodo juga mengatakan bahwa *“PPLP ini merupakan alat pemersatu masyarakat petani di sepanjang pesisir Kulon Progo yang terkena dampak dari rencana pertambangan pasir besi”*. Walaupun dulu masih belum terorganisir sesuai yang dikatakan oleh Pak Didi (salah satu pengurus PPLP) namun sekarang sudah sangat efektif dalam memersatukan masyarakat petani dalam perlawanan. Pak SM menambahkan bahwa tujuan dari adanya PPLP ini bukan hanya untuk menolak pertambangan, tapi juga untuk meningkatkan pertanian.

Paguyuban ini memiliki struktur kepengurusan atau struktur organisasi yang sama dengan organisasi formal lainnya, namun disini lebih ringkas disesuaikan dengan kebutuhan paguyuban. SK menuturkan bahwa

“Struktur kepengurusan PPLP ini sama seperti yang lainnya, ada ketua dan wakil ketua, sekretaris dan wakilnya, bendahara dan wakilnya, kemudian ada juga seksi atau divisi lainnya seperti humas, perlengkapan dan koorlap untuk disetiap unit desa”.

Kepengurusan ini pun tidak pernah diganti selama PPLP ini masih berdiri, karena menurut mereka bahwa pergantian kepengurusan ini akan membuat orang lain sakit hati sehingga tekad untuk menolak pasir besi ini bisa goyah dan akhirnya berpihak pada pertambangan. Walaupun demikian, masih ada pengurus yang melenceng dari tugasnya, ada beberapa orang yang terpaksa dikeluarkan dari kepengurusan bahkan dari paguyuban karena keterlibatannya dengan pihak luar yang pro terhadap rencana pertambangan. Pak Rupingi mengatakan

“...Pernah ada yang dikeluarkan dari kepengurusan karena beliau-beliau ini telah melanggar aturan atau istilahnya komitmen dari PPLP”

sendiri, mereka bekerja sama, sering membuat pertemuan dengan pihak pro-pertambangan terutama pihak dari dalam keraton, kemudiann dikeluarkan. Termasuk wakil ketua dari PPLP sendiri sehingga kami gantikanlah dengan orang lain sampai saat ini. Ada juga humas yang melakukan hal yang sama kemudian kami keluarkan, tidak dianggap lagi”.

Aturan didalam PPLP ini merupakan kesepakatan bersama dan berdasarkan penuturan salah satu koorlap dari unit desa Bugel pun mengatakan bahwa aturan PPLP ini tidak tertulis termasuk juga sanksi sosial yang diberikan kepada para pihak yang pro pertambangan walaupun masih ada ikatan darah atau persaudaraan. Secara tidak langsung, rencana pertambangan ini telah membuat sebuah konflik horizontal seperti konflik keluarga, bahkan agama. Walaupun demikian, mereka bisa hidup saling berdampingan namun tetap memperoleh sanksi sosial dari masyarakat kontra rencana pertambangan tersebut. Sanksi yang diberikan adalah tidak ada komunikasi atau berhubungan lagi dengan pihak pro pertambangan, artinya putuslah sudah semua hubungan baik tetangga, saudara, bahkan keluarga sedarah sekalipun diantara para pihak pro dengan pihak kontra, kesepakatan ini dibuat bersama-sama, begitu penuturan dari setiap petani yang ditanyakan mengenai hubungan mereka yang kontra dengan yang pro terhadap rencana pertambangan pasir besi. Ibu-ibu petani mengatakan *“ya buat yang pro ada sanksi sosialnya, hubungan darah bisa putus, bahkan di Karangsewu itu yang pro tidak boleh dikubur di tanah Karangsewu”.*

Anggota paguyuban ini adalah para petani lahan pantai dan kegiatan utama mereka adalah menanam tanaman mereka di lahan pantai tersebut. Terdapat beberapa keunikan dalam menanam tanaman mereka, salah satunya dalam pembagian tugas antara laki-laki atau perempuan dan adanya kegiatan gotong royong diantara para ibu-ibu. Ibu isyanti mengatakan bahwa

“Setiap keluarga memiliki lahan yang luas-luas, jadi kalau digarap sendiri itu cape, makanya seluruh keluarganya ikutan, bapak-bapak, ibu-ibu, sampe anak-anaknya juga ikut. Untuk pembagian tugasnya ya seperti biasa aja, kalo yang berat-berat itu biasanya dikerjakan sama bapak, ibunya ya ngerjain yang ringan aja seperti menanam bibit atau menyabut gulma, memetik tuh kebanyakan perempuan soalnya kan lebih telaten dibandingkan bapak-bapak, tapi ada juga yang dikerjain semuanya sama-sama”.

Selain itu, ibu Isyanti dan ibu-ibu yang lainnya sering melakukan gotong royong baik dalam menanam, menyiangi atau menyabut gulma, bahkan memetik hasilnya, ibu-ibu mengerjakannya secara bersama-sama dan bergiliran. Hal ini sudah lama dilakukan oleh ibu-ibu sebagai ciri rasa kekeluargaan dan saling tolong-menolong. Walaupun demikian, para petani ini juga memberikan lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitar dan memberikan upah yang sepadan dengan pekerjaannya, Bapak DD menceritakan bahwa

“para petani disini itu tidak akan menyia-nyiakan tenaga orang lain, makanya upah disesuaikan dengan harga, sehari tenaga kerja biasanya diberi uang Rp 50.000 /orang/hari ditambah dengan makan siang, makanan ringan atau cemilannya lah yah, kadang kalau lagi panen tuh dikasih juga hasil panennya”.

Selain menanam, kegiatan petani yang menjadi kegiatan paguyuban petani lahan pantai yang lain adalah kegiatan tanam perdana, ulang tahun, panen raya, dan kegiatan-kegiatan lainnya seperti mujadahan atau kegiatan yang mendukung gerakan misalnya teter, kampanye seribu bendera, dan demo. MW menuturkan bahwa

“setiap tahun untuk cape kita memiliki tanam perdana yang menjadi salah satu kegiatan PPLP, tanam perdana ini disepakati bersama berdasarkan musyawarah yang dilakukan oleh sesepuh kita yang mengerti mengenai cara menentukan tanam perdana, mungkin dengan cara melihat bintang, perhitungan tanggal dan macam-macam lagi, kalau saya kurang tahu bagaimana bisa muncul tanggal tanam perdana karena saya kurang mengerti dan tidak ikutan dalam musyawarah itu”.

Kegiatan tanam perdana ini diikuti oleh seluruh petani lahan pantai secara bergiliran, itulah sebabnya tanaman antar desa tidak seragam. Seperti perkataan Mas Warsito ketika ditanyakan mengapa tanaman antar desa ini tidak seragam baik tinggi tanaman dan kapan berbuah maksudnya di Desa Garongan sudah berbuah, di Pleret dan Bugel belum berbuah, *“ya kan Garongan dulu, selang beberapa hari baru desa lain mengikuti, soalnya kan di Desa Garongan yang musyawarah untuk menentukan tanam perdananya, jadi wajar kalo disini masih kecil-kecil, disana sudah bagus dan seragam”.* Sebelum tanam perdana dilaksanakan, akan ada pengajian atau syukuran karena telah disampaikan pada tanam perdana yang dilakukan dilahan pantai mengucapkan syukur dan terakhir ada acara makan bersama. MW menambahkan bahwa *“setiap akan melakukan tanam perdana ini pasti ada pengajian dulu kumpul syukuran dan makan bersama di lahan pantai yang sudah siap tanam”.*

Kemudian kegiatan lainnya adalah kegiatan ulang tahun PPLP –KP yang dirayakan setiap tanggal 1 April, tahun ini adalah ulang tahun ke-8 dan penulis menyaksikan sendiri bagaimana kemeriahan pesta ulang tahun PPLP yang seperti pesta rakyat. Mas Warsito memberitahukan bahwa *“setiap tahun di hari ulang tahun ya seperti ini, rame, nanti ada yang membunyikan motor yang keras, terus keliling desa pesisir sampai pada suatu desa yang menjadi tempat perayaan ulang tahunnya, isi acaranya ya sambutan-sambutan, orasi perjuangan dan hiburan, kemudian di akhira ada potong tumpeng dan naik gunung, berebutan gitu”.* Gunung adalah semacam tumpeng raksasa yang isinya penuh dengan hasil tanaman petani di lahan pantai. Selain itu, ada lagi kegiatan kemeriahan masyarakat petani lahan pantai ini yaitu panen raya, pesta rakyat petani lahan pantai sebagai bentuk rasa syukur karena telah diberikan hasil panen yang melimpah, ada keunikan disini, MW pun menceritakan bahwa *“setiap panen raya, di lahan pantai ini akan ada penjual motor yang menjajakan motornya di lahan pantai, keliling dia jual motornya yang diangkut sama mobil”.* Hal ini unik karena bukan pembeli yang datang ke penjual motor tapi malah penjual motor yang datang ke pembeli.

Dalam acara ulang tahun PPLP ini semua teman-teman jaringan diundang dan ikut memeriahkan pesta ulang tahun yang dihadiri oleh semua anggota PPLP dari yang muda sampai yang tua. Setiap yang kegiatan PPLP juga sering menghadirkan atau mengundang teman-teman jaringan dan masyarakat yang memiliki nasib yang sama seperti organisasi Wahana Tri Tunggal dan Aliansi Rakyat Menentang Penggusuran di Prangkususmo, kemudian teman LBH,

Seniman, Ulama, dan akademisi sebagaimana dituturkan oleh Pak SM saat itu. Kegiatan lain yang melibatkan jaringan PPLP adalah kampanye anti tambang besi yang dilakukan dengan membuat baju sablon yang bertemakan penolakan terhadap rencana pertambangan pasir besi, membuat poster dan lukisan yang bertemakan hal yang sama dan dilakukan oleh para seniman, kemudian ada kegiatan lain yang dilakukan oleh Para Ulama yaitu Mujadahan. Mujadahan menurut Pak SK adalah berdoa memohon kepada Allah agar mendapatkan perlindungan dan ketenangan dalam menjalankan perjuangan melawan rencana pertambangan pasir besi. Pak Rupingi pun menambahkan *“hikmah dari mujadahan karamah adalah selamat, tidak di dzolimi, tenang dalam melawan dan tetap menolak tambang”*.

Setiap kegiatan yang dilakukan oleh PPLP ini merupakan swakelola para petani paguyuban ini, MW mengatakan

“setiap acara yang dilakukan PPLP ini tidak ada menerima bantuan dari siapapun, kita semua sama-sama membiayainya, patungan gitu berapa per orang, semuanya sendiri pokoknya, kalo ada yang mau memberikan dana monggo tapi tidak ada syaratnya”,

Pak SP pun menambahkan bahwa

“Dana yang kami dapatkan itu biasanya dari sisa pasr lelang misalnya di pasar lelang ini setiap penjualan kan ada sisanya berapa ribu gitu dari pasnya, misalany ada Rp 1.547.000 bisa di simpan Rp 7.000 atau mau Rp 47.000 untuk dana kegiatan PPLP, itu secara sukarela”.

Ada hal yang unik yaitu “pasar lelang” suatu mekanisme penjualan cabe merah di daerah pesisir yang mampu memutuskan rantai tengkulak sehingga petani mendapatkan keuntungan yang lebih dari sebelumnya, mekanisme ini ditemukan oleh salah seorang petani PPLP. Pak Rupingi menceritakan

“Awalnya, ada seorang pedagang cabe merah yang ingin membeli ke daerah pesisir ini namun sering tidak dapat membeli karena terhalang oleh para tengkulak-tengkulak yang menghalanginya, kemudian dia memberikan saran kepada salah seorang petani untuk membuat sistem lelang, kemudian dicoba dan sangat efektif sekali dalam menjual hasil pertanian khususnya cabe merah ini, sekarang penjualnya yang datang sendiri, tidak bergantung pada tengkulak”.

Teman-teman jaringan PPLP ini berasal dari latar belakang yang berbeda, asal yang berbeda baik di dalam maupun luar negeri, dalam setiap acara PPLP teman-teman jaringan pasti diajak, Pak SK mengatakan bahwa

“setiap acara PPLP seperti Ulah PPLP, Panen Raya, kampanye, demo pun diajak seperti dalam ulang tahun kemarin kan, ada LBH, akademisi, WTT, ARMP, masyarakat yang memiliki nasib yang sama seperti di Kebumen, Lumajang, Pati, Cepu, kemudian ada seniman, yang dari luar negeri juga ada, dari Perancis, Jerman, Australia juga ada”.

Mereka ini memberikan kontribusi yaitu menolak rencana pertambangan pasir besi dengan cara masing-masing. Pak SK pun mengatakan bahwa *“orang luar boleh membantu tapi jangan di dalam PPLP, sesuai kapasitasnya saja karena kita juga harus hati-hati terhadap orang luar yang bisa memecahkan kelompok sehingga setiap ada rapat PPLP, orang luar PPLP tidak boleh ikut”*.

Paguyuban ini merupakan organisasi otonom yang tidak ada campur tangan dari pemerintah ataupun dari LSM, mengapa demikian? Karena MW ini

mengatakan bahwa *“kami tidak percaya dengan pemerintah dan LSM”*. Kemudian Ibu Isyanti menjelaskan bahwa

“...pernah ada pengalaman, dari pihak keraton ada yang memberikan dana katanya untuk membantu perjuangan, ternyata malah mengadu domba anggota PPLP sehingga mulai tidak percaya dengan pemerintah, kemudian setiap demo tidak pernah ditanggapi, yasudah berarti pemerintah tidak memihak kepada rakyat”.

Selain itu, Pak SK dan Pak Rupingi juga menjelaskan bahwa ketidakpercayaan paguyuban kepada LSM adalah

“LSM itu sukanya ngatur perjuangan kita, sedangkan masyarakat tidak mau melaksanakan apa yang telah diatur oleh LSM. Pernah ada LSM yang masuk ke dalam PPLP, bukan LSM nya yang mengikuti apa yang menjadi keinginan masyarakat namun segala bentuk strategi, tempat rapat dan lain hal itu harus pihak sana yang menentukan, itu kan namanya mengatur ya bukan keinginan masyarakat sendiri”.

Oleh karena itu, pengalaman ini dijadikan bahan pembelajaran yang membuat masyarakat PPLP tidak percaya atau tidak bergabung dengan LSM maupun pemerintah. Pak SM sebelumnya. Masyarakat lain berpandangan bahwa *“PPLP merupakan organisasi petani mandiri yang tidak terikat oleh pihak lain.”*

Masyarakat begitu sangat percaya dengan PPLP bahwa dengan wadah ini perjuangan ini tetap harus ada sampai kapan pun, hal ini karena pandangan mereka terhadap PPLP yang mengatakan bahwa PPLP ini sangat penting bagi kami sebagai petani yang memperjuangkan lahannya dan menolak tambang pasir besi. Masyarakat menyebutkan bahwa *“PPLP ini merupakan wadah bagi para petani, wadah untuk menyampaikan aspirasinya, masalah yang dihadapi oleh masyarakat dalam melakukan perjuangan”*. Selain itu perjuangan, tujuan PPLP ini juga untuk meningkatkan pertanian seperti yang diungkapkan Pak SM adalah *“tujuan PPLP ini tidak hanya menolak tambang, tapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan, sehingga jika ada tambang maka akan mengganggu ruang hidup petani”*. Hal ini memang terbukti setelah adanya PPLP masyarakat memiliki banyak inovasi dalam pertanian lahan pantai sampai mahasiswa atau dosen pun datang untuk belajar, diketahui dari Pak SK yang sering menerima tamu dari luar PPLP khususnya akademisi yang mau belajar pertanian,

“Sering yang datang itu dosen dari UGM atau dari Universitas lain datang membawa mahasiswa terus belajar pertanian dari cara mengolah lahan, menanam, menyiram, dan lainnya, bahkan penyuluh juga datang kesini bukan penyuluh tapi malah belajar karena dia bilang saya belajar dulu lah pak, begitu”.

Selain berbagi pengetahuan mengenai pertanian lahan pantai ini dengan orang luar PPLP, para petani di pesisir ini juga saling berbagi pengetahuan dengan sesama petani sendiri dalam setiap forum atau perkumpulan PPLP. Seperti yang diungkapkan oleh Ari

“PPLP itu wadah petani untuk bertukar informasi pertanian, terkait hama dan penyakit tanaman yang menimpa tanaman saya, ya kalau tak ada PPLP mungkin tanaman saya akan mati terus, saya tidak bisa bertani dan lahan saya sudah di tambang, selain itu PPLP juga mengenalkan banyak teman dari berbagai desa ini jadi tahu banyak orang”.

Begitupun menurut Pak SM “*PPLP ini juga menjadi wadah untuk bertukar informasi mengenai pertanian dan mempererat tali silaturahmi diantara petani pesisir*”. Selain dari mas Ari dan Pak SM, Pak Tukijo juga berpendapat bahwa “*PPLP itu mempersatukan warga petani lahan pantai kalau tidak ada PPLP maka warga akan pecah dan tambang akan terjadi*”. Hal inilah yang menunjukkan pentingnya paguyuban petani ini dalam mempersatukan petani lahan pantai dalam gerakan sosial untuk menolak rencana pertambangan pasir besi.

Lampiran 6 Gerakan Sosial Paguyuban Petani Lahan Pantai

Gerakan sosial yang terjadi di pesisir Kulon Progo ini bermula dari adanya penelitian mengenai lahan pantai yang katanya mengandung bijih besi. Salah seorang warga yang sudah sepuh dan menjadi sesepuh di Desa Bugel mengatakan

“Dulu pas saya lagi kerja jadi supir, saya yang suka nganterin orang-orang yang neliti di lahan pantai ini, udah beberapa kali pengambilan sampel, yang lahannya diambil buat dilubangin gitu dikasih uang, terus hasilnya juga saya tahu kalo disini itu gak bisa dibuat pabrik tambang besi karena akan rugi mau dikirim ke Cilacap juga sama akan rugi, bangun pabrik disini juga rugi, jadi ditutup lah proyek itu. Tapi mengapa sekarang muncul lagi rencana pertambangan itu? Heran juga saya”.

Usaha penelitian mengenai lahan pantai ini pun terjadi lagi pada tahun 2006, dan membuat lubang-lubang sampel sama seperti dulu, tidak ada sosialisasi

“dulu gak tahu kalo mau diteliti untuk tambang, ya para pemudanya mau aja ngangkut pasir-pasir yang untuk dijadikan sampel dikasih upah, terus pernah ada yang kumpul itu kakek-kakek sama nenek-nenek yang tidak tahu apa-apa, dikasih uang aja, tahunya lahannya mau ditambang”.

Pak SM pun menambahkan

“...ada 40 orang yang lahannya terkena penelitian lahan pasir ini, kemudian diberikan ganti rugi, disuruh tanda tangan, waktu itu satu titik harganya Rp 50.000,- tapi tanda tangan tersebut malah disalahgunakan dan dituduh menyetujui rencana pertambangan tersebut”.

Sesepuh disana pun ikut dalam penerima ganti rugi dan disangka pro terhadap pertambangan *“padahal kan saya tidak ikut, saya Cuma dikasih ganti rugi aja, gak ikut pertambangan, orang-orang pada gak percaya karena memang geger waktu itu”* kata sesepuh di Desa Bugel tersebut.

Setelah ada penelitian kemudian ada AMDAL masuk ke desa pesisir, masyarakat tidak dilibatkan, masyarakat marah karena menurut MW mengatakan

“Jika masyarakat tidak dilibatkan, bisa saja AMDAL ini berpihak pada perusahaan, yang seharusnya tidak baik menjadi baik untuk perusahaan. Oleh karena itu, ada pendatang yang katanya mau melakukan AMDAL di Desa Garongan ya langsung di kepung, dihajar sampai babakbelur terus diusir beserta semua barangnya diobrak-abrik, orang Garongan memang keras kalau masalah ini”.

Selain itu, ada beberapa hal yang menurut masyarakat rencana pertambangan ini tidak sah, tidak dapat diterima dan tidak memenuhi syarat.

Pak SM menjelaskannya yaitu

“Tidak ada sosialisasi rencana pertambangan kepada masyarakat pesisir, tiba-tiba saja langsung penelitian, AMDAL dan segala macamnya, selanjutnya tidak ada keterlibatan masyarakat dalam AMDAL, bahkan pernah ada yang mengusulkan AMDAL tandingan tapi kami sebagai warga PPLP tidak setuju, kemudian ada hal yang membuat kami heran adalah

adanya kontrak karya padahal kami tidak mengetahui soal kontrak tersebut, dan menurut tata ruang, wilayah Kulon Progo ini tidak diperuntukan untuk pertambangan”.

Oleh karena itu, pada tahun 2006 ini terbentuk adanya PPLP yang menolak pertambangan pasir besi yang akan merusak lingkungan, lahan pantai ini telah meningkatkan ekonomi masyarakat dan masyarakat mengolah sendiri lahannya tanpa bantuan dari dinas pertanian. Pak SM pun melanjutkan *“banyak orang-orang dari pertanian yang datang ke kita untuk belajar pertanian dan teknik baru yang kita terapkan, saya juga sering dipanggil di acara-acara temen-temen yang lain untuk membicarakan teknik pertanian yang diterapkan di lahan pasir ini”.*

Terkait dengan gerakan sosial, gerakan sosial yang dilakukan PPLP ini termasuk kedalam gerakan sosial baru karena terdapat ciri atau karakteristik gerakan sosial baru dalam gerakan ini diantaranya :

Paguyuban ini merupakan organisasi otonom yang tidak ada campur tangan dari pemerintah ataupun dari LSM, mengapa demikian? Karena MW ini mengatakan bahwa *“kami tidak percaya dengan pemerintah dan LSM”.* Kemudian Ibu Isyanti menjelaskan bahwa

“...pernah ada pengalaman, dari pihak keraton ada yang memberikan dana katanya untuk membantu perjuangan, ternyata malah mengadu domba anggota PPLP sehingga mulai tidak percaya dengan pemerintah, kemudian setiap demo tidak pernah ditanggapi, yasudah berarti pemerintah tidak memihak kepada rakyat”.

Selain itu, Pak SK dan Pak Rupingi juga menjelaskan bahwa ketidakpercayaan paguyuban kepada LSM adalah

“LSM itu sukanya ngatur perjuangan kita, sedangkan masyarakat tidak mau melaksanakan apa yang telah diatur oleh LSM. Pernah ada LSM yang masuk ke dalam PPLP, bukan LSM nya yang mengikuti apa yang menjadi keinginan masyarakat namun segala bentuk strategi, tempat rapat dan lain hal itu harus pihak sana yang menentukan, itu kan namanya mengatur ya bukan keinginan masyarakat sendiri”.

Oleh karena itu, pengalaman ini dijadikan bahan pembelajaran yang membuat masyarakat PPLP tidak percaya atau tidak bergabung dengan LSM maupun pemerintah. Pak SM berpandangan bahwa *“PPLP merupakan organisasi petani mandiri yang tidak terikat oleh pihak lain.”*

Kemudian aktivitas gerakan yang dilakukan oleh PPLP ini tidak tepaku di dalam desa pesisir saja tapi juga melakukan aktivitas gerakan di daerah lain termasuk di daerah perkotaan salah satunya di daerah Parangtritis, Parang Kusumo, yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Menggugat Penggusuran (ARMP), MW pernah mengatakan *“kita pernah melakukan aksi menolak penggusuran, ikut dalam kegiatan demo ARMP karena kami ini senasib dan harus diperjuangkan”.* Hal ini juga mengidentifikasikan bahwa isu yang diangkat oleh PPLP bukan hanya isu pertanian saja karena lahan pertanian mereka akan digusur tapi juga mengenai diskriminasi, penggusuran.

Selain itu, dilihat dari kerugian yang akan terjadi jika rencana pertambangan pasir besi ini tetap dibangun, itulah yang masyarakat petani lahan pantai ini perjuangkan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau yang merugikan tersebut menurut salah seorang petani mengatakan

“Rencana pertambangan ini harus ditolak karena banyak sekali kerugiannya, yaitu saya sebagai petani tidak punya pekerjaan lagi dong orang lahan saya aja diambil orang, saya mau kerja apa, terus para ibu-ibu yang sudah sepuh juga mau kerja apa? Pabrik kan pasti tidak sembarangan orang memasukan karyawan, mereka juga akhirnya tidak bekerja artinya pengangguran banyak, terus tidak ada lagi pertanian cabe, kita juga gak punya tempat tinggal nanti karena pertambangan ini akan memakan tanah pemukiman kita juga, ruang hidup kita terganggu. Selain itu, lahan pantai yang telah ditambang itu tidak dapat menyerap air sehingga bisa terjadi badai pasir lagi seperti dulu, pasirnya akan naik terus, air laut akhirnya sampai ke tempat pemukiman kita sekarang, pokoknya lingkungan akan tercemarlah itu”.

Selain dari isu yang diangkat beragam, taktik atau strategi paguyuban ini juga beragam, setiap petani yang ditanyakan mengenai strategi apa yang telah digunakan mereka menjawab

“Strategi yang sudah digunakan itu banyak, bukan hanya satu, segala macam bentuk strategi sudah kami lakukan, demo sudah beberapa kali”. MW pun menerangkan *“strategi yang sudah kami lakukan itu beragam, selain demo kemana-mana yang tidak ada hasilnya, menulis surat untuk presiden pun pernah beberapa kali, ikut ranah politik pun pernah walaupun gagal, kemudian bersolidaritas dengan LBH, jaringan lain seperti akademisi, seniman, baik dalam maupun luar negeri, banyak yang sudah kami kerjakan, sekareng strategi yang pas ya inilah menanam, karena dengan menanam petani bisa makan, bisa ngasih makan orang, kita menguasai lahan kita dan barangsiapa ada yang mengusik ya senjata kita yang angkat bicara, ya senjata dalam menanam itu”.*

Hal ini juga memperlihatkan bahwa PPLP ini memiliki strategi yang khas yaitu menanam. Dalam bidang politik pun pernah dilakukan, Pak Supriyono mengatakan *“saya juga pernah menjadi calon wakil rakyat tapi gagal”.* Menanggapi masalah menanam ini Bu Isyanti mengatakan

“Dulu masih pakai strategi yang kasar, karena dulu kan Bupati-nya juga main kasar, untuk melawan kita dia pakai preman suruh ngawasin kita, Pak SM pernah dibuat babak belur, keserempet kendaraan gitu dengan sengaja, terus kami lapor polisi disana kami lama sekali untuk ditanyai, kita duduk saja polisinya nggak bilang apa-apa, pas saya tanyain pak ini gimana saudara saya terkena tindak kejahatan ini pak, jawabannya sebentar yah tunggu atasan saya ya bu. Sudah lama terus saya marah sama bapak polisi itu, akhirnya barulah diusut, pas pulangnya kita sudah yakin akan diikuti sama mereka yang mencelakakan Pak SM itu kemudian ngomong ke Bapak Polisinya dan kita mendapatkan perlindungan saat pulang dari polisi dan dari pemuda PPLP yang menjaga kami di barisan depan dan belakang. Kalo sekarang sudah tidak kasar lagi, lebih pakai akal, lebih halus, karena Bupati yang sekarang itu kan ganti dan dia lebih halus sepertinya strategi dia itu, lebih ke purposive”

Selanjutnya gerakan sosial yang dilakukan oleh PPLP ini memiliki jaringan yang luas baik jaringannya yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Seperti yang diungkapkan Bu Isyanti

“Temannya jaringan kita banyak mba, ada yang di dalam negeri, dari luar negeri juga ada, setiap ada kegiatannya pasti ada orang luar negeri itu, ada ulama, LBH, akademisi seperti dosen dari UGM, mahasiswa yang melakukan penelitian dan sampai sekarang masih berhubungan baik, seniman-seniman, orang dalam kraton juga ada yang terus memberikan semangat agar tetap berjuang melawan rencana pertambangan pasir besi”.

Selain itu, PPLP ini juga bersolidaritas dengan beragam masyarakat yang memiliki nasib yang sama seperti di Kebumen, Pati, Blora, dan sepanjang pantai selatan Jawa sampai Cianjur yang tergabung dalam sebuah forum bernama Forum Komunikasi Masyarakat Agraris (FKMA).

Kemudian gerakan ini diisi oleh kepemimpinan yang memiliki pengetahuan yang tinggi dalam hal pertanian terlihat dari banyaknya orang yang belajar pada para petani seperti yang dilakukan oleh para kordinator lapangan yang dianggap sebagai pemimpin mereka di unit desa masing-masing. Seperti halnya Pak SK yang sering menerima tamu dari luar PPLP khususnya akademisi yang mau belajar pertanian,

“Sering yang datang itu dosen dari UGM atau dari Universitas lain datang membawa mahasiswa terus belajar pertanian dari cara mengolah lahan, menanam, menyiram, dan lainnya, bahkan penyuluh juga datang kesini bukan menyuluh tapi malah belajar karena dia bilang saya belajar dulu lah pak, begitu”.

Pak SM juga menemukan teknik penyiraman baru

“saya mencoba-mencoba melakukan beberapa percobaan teknik menyiram dengan cara infus, jadi tidak usah memakai tenaga manusia, kan selama ini juga memakai selang yang juga ditemukan oleh petani lahan pantai disini, sekarang saya mencoba menggunakan teknik infus, jadi saya hanya menyalakan mesin nanti air akan naik sendiri dan menyiram tanaman sendiri, soalnya kan saya juga sibuk juga sekarang”.

Selain dalam bidang pertanian, mengenai dampak dari adanya tambang ini juga penting. Para petani disini mengetahui bagaimana dampak dari pertambangannya nanti, kemudian siapa yang berada dibalik pertambangan, bagaimana strategi yang akan digunakan oleh mereka dalam melakukan gerakan ini juga disebarkan oleh para kordinator lapangan ini.

“sebelum melakukan demo atau aksi, kordinator lapangan yang memberi tahu, kami harus bagaimana nanti disana, terus kalau ada berita apa-apa atau hasil kumpul dari forum PPLP itu, informasinya langsung menyebar, yang ikut forum kan para pengurus, “korlap”-”korlap” juga”

Menurut para ibu dalam perkumpulan. Hal inilah yang memperlihatkan bahwa pengetahuan para “korlap” itu harus tinggi agar dapat memberikan informasi dan cara mengatur strategi yang cocok agar perjuangan tetap berjalan.

Lampiran 7 Peran Kepemimpinan dan Pengetahuannya dalam Gerakan

Makna kepemimpinan dalam paguyuban ini memiliki makna tersendiri, salah satu petani mengatakan “setiap orang adalah pemimpin bagi dirinya sendiri, oleh karena itu pemimpin dalam PPLP ini adalah para petani masing-masing”, mengapa demikian? Seorang petani bernama Supriyono mengatakan

“...sistem kepemimpinan PPLP ini kami tidak menokohkan seorang pemimpin, tidak akan bergantung pada orang lain, karena kami yang memiliki lahan dan kami sendiri yang akan mempertahankannya bukan orang lain, oleh karena itu kami tidak menokohkan atau bergantung pada perintah satu orang saja, mungkin ada yang mengkordinasikan bagaimana perjuangan ini bisa selaras atau kompak”.

Kemudian sebagian besar petani mengatakan

“...lahan ini merupakan lahan kami sendiri dan tanggung jawab kami sehingga perlu untuk mempertahankannya sendiri tanpa bergantung pada orang lain, kami merasakan bahwa kami memiliki lahan ini dan bersatu dalam wadah yang disebut paguyuban petani yang meyatukan kami dan menaungi kami, memberikan informasi bagaimana kami bisa berjuang dan mempertahankan lahan kami selanjutnya terserah-masing-masing orang untuk ikut dalam setiap aksi yang dilakukan PPLP-KP ini”.

Sistem kepemimpinan di PPLP ini tidak dipegang oleh perseorangan tapi oleh semua masyarakat PPLP harus menjadi pemimpin dirinya sendiri dalam menggerakkan dirinya untuk melawan tambang pasir besi. Hal ini terjadi karena sebagai bentuk pendewasaan PPLP yang sudah mengalami berbagai macam bentuk struktur organisasi dan strategi atau taktik perlawanan. Semua yang terjadi dalam sistem PPLP ini merupakan sebuah hasil dari pengalaman mereka sebagai pejuang penolakan pertambangan pasir besi. MW mengatakan

“...Dulu PPLP ini pernah juga mengalami bentuk organisasi yang sama seperti struktur organisasi formal lainnya namun seiring berjalannya waktu dan berdasarkan pengalaman yang telah dilalui beginilah jadinya, pemimpin itu tidak ada pengaruhnya, ada pemimpin untuk administrasi saja”.

Sekarang, mereka tetap memiliki struktur organisasi yang tidak pernah dirubah sama sekali dari dulu awal mula terbentuk sampai sekarang. Namun mereka tetap tidak menokohkan salah satu dari para pengurus PPLP-KP ini. Karena akan terjadi ketergantungan. Pak Didi mengatakan. *“kami PPLP disini memiliki pemimpin seperti halnya yang lain, tapi kami tidak menokohkan karena akan ada ketergantungan, jika menokohkan pada satu orang saja, jika dia berhalangan maka perjuangan ini juga tidak akan berjalan”.* Kemudian dalam setiap desa di sepanjang pesisir Kulon Progo ini memiliki sebuah organisasi kecil yang diinisiasi oleh para pemuda-pemudi anggota PPLP sebagai bentuk apresiasi mereka dalam menolak tambang pasir besi sekaligus sebagai wadah regenerasi perjuangan mereka. *“Di setiap desa itu ada organisasi pemudanya, waktu ulang tahun PPLP kan kelihatan yah dari baju mereka masing-masing organisasi, ada kompak dari*

pleret, garuda, ada geranat ari siliran, itu mereka sendiri yang mendirikan dengan persetujuan PPLP” tutur Bu Isyanti.

Selain itu, PPLP ini memiliki pembagian tugas dalam menjalankan kegiatan organisasinya. Dari setiap unit ini terdapat koordinator lapangan yang bertugas sebagai pemandu atau penggerak dalam perjuangannya. “korlap” ini dipilih karena mereka merupakan tokoh masyarakat yang bersedia meluangkan waktu mereka untuk mengurus perjuangan dan dapat dipercaya oleh masyarakat sebagai wakil mereka dalam forum PPLP-KP. Sistem kepemimpinan yang diterapkan PPLP ini merupakan penerapan dari hasil belajar mereka dari pengalaman sebelumnya. Berdasarkan hasil observasi dan cerita dari masyarakat diketahui bahwa peran kepemimpinan dalam PPLP ini adalah penghubung eksternal, penghubung internal, penyalur aspirasi masyarakat, pengatur strategi perlawanan, pengawasan kinerja anggota PPLP dalam menjalankan misinya, penyampai informasi dan memperluas jaringan.

Pak SM mengatakan

“peran kami ini ya ikut kumpul forum PPLP, jika ada masalah di masyarakat atau aspirasi masyarakat nanti kami sampaikan di forum, hasilnya kami sebarkan kepada masyarakat juga, kemudian dalam melakukan aksi, kami yang mengatur strategi di lapangan, taktik atau strategi yang dipilih sudah dibicarakan terlebih dahulu di forum PPLP. Untuk memperluas jaringan atau hubungan dengan orang luar itu humas yang lebih tahu, sebagai penyampai informasi apa saja terkait dengan perjuangan termasuk hasil dari forum PPLP, mau lewat apa saja bisa, mengumpulkan orang dalam 10 menit saja mudah apalagi menyampaikan informasi, lewat sms juga kan Cuma beberapa detik sudah terkirim”.

Karena peran inilah maka tingkat pengetahuan pemimpin ini juga harus tinggi karena peran untuk menyampaikan informasi ini penting untuk kemajuan gerakan sosial atau perlawanan. Tingkat pengetahuan ini bisa dilihat dari beragam bidang pengetahuan baik pertanian, politik, hukum, strategi perlawanan termasuk strategi dalam sistem kepemimpinan yang digunakan, dan mengenai hal-hal yang terkait dengan rencana pertambangan.

“....Kami sudah lama bergabung dalam LBH, kemudian pada saat Pak Tukijo ditahan tanpa alasan, dan kami menyadari bahwa konflik ini pasti akan terjadi kriminalisasi atau kami akan dikriminalkan tanpa alasan yang benar maka PPLP berdiskusi dan akhirnya menjadikan LBH sebagai pengacara kami, namun hanya sebatas di ranah hukum saja, dalam hal lain mereka tidak ikut campur, hanya pada saat ada hal yang berhubungan dengan hukum” tutur Pak SM yang menjadi anggota LBH di Kulon Progo.

Selanjutnya dalam bidang politik, MW pernah mengatakan:

“....segala macam strategi telah kami lakukan termasuk ikut dalam politik, pernah ada anggota PPLP yang ikut dalam pemilihan wakil rakyat seperti itu tapi akhirnya gagal karena tidak terpilih, ada yang terpilih namun dia mengatakan bahwa kayaknya tidak bisa jika strategi kami digunakan di politik ini karena dia pasti harus nurut sama partainya, kalau nggak kan dipecat. Pernah ada kan kepala desa yang tidak ikut partainya dan memihak pada rakyat pada kami, malah dipecat

dari jabatannya. Hal ini menjadi pelajaran untuk kami”. “Setiap strategi yang akan dilakukan itu kami musyawarahkan bersama, demo juga sama, setiap ada kesempatan atau ada acara yang pas maka demo, misalnya di beritakan akan ada pertemuan mengenai rencana pertambangan, maka kita langsung bergerak dan sebelumnya sudah dimusyawarahkan apa yang akan dilakukan nantinya.”

Setelah diketahui strategi apa yang akan digunakan, “korlap” melakukan perannya yaitu memberikan informasi dan mengatur strategi di lapangan. Selain itu, pengetahuan mengenai rencana pertambangan pasir besi ini juga dimiliki oleh para petani dan “korlap” PPLP termasuk mengenai dampak dari adanya pertambangan jika hal ini terjadi. Bu Isyanti pernah mengatakan

“...profesor dari UGM pernah mengatakan bahwa lahan pasir ini jika ditambang nantinya tidak bisa direklamasi lagi, kehidupan hilang, banyak bencana, terus pernah ada yang melihat contoh yang sudah terjadi yaitu di Ketawang, pasirnya jadi tidak bisa menyerap air, beberapa rumah juga ada yang roboh karena pasirnya turun, saya tidak mau kalau seperti tu. Selain itu, akan banyak pengangguran disini, bukan hanya pengangguran kesejahteraan masyarakat juga menurun apalagi orang yang sudah sepuh yang saat jadi petani masih bisa bekerja dan sehat setelah ada pertambangan dia tidak akan bekerja lagi, sering sakit mungkin karena tidak digerakan, tata ruang juga akan tidak teratur”.

Selain bu Isyanti, Mas Ari juga mengatakan *“dampak dari adanya pertambangan ini ya airnya jadi asin karena pasirnya tidak dapat meyerap asinnya, terus sering terjadi gempa seperti yang terjadi di daerah tetangga itu”*, Mas WR juga menambahkan:

“....di daerah pesisir ini tuh airnya gak asin loh, jarak beberapa meter dari bibir pantai pun sudah tidak asin makanya kita bisa menanam mungkin karena pasir besi ini bisa menyerap air laut menjadi tidak asin lagi, sampai di perumahan atau pemukiman pun sama tidak asin”.

Kemudian MW mengatakan:

“....air disini tidak asin pasti karena kandungan yang ada dalam pasir besi kita ini dan korporasi itu tahu sehingga mereka bukan hanya menggali bijih besi tapi mineral lain yang terkandung didalamnya karena jika bukan itu, dulu kan pernah ada penelitian kalau disini akan rugi, mengapa tetap ditambang?”.

Sedangkan pengetahuan mengenai pertanian sudah tidak diragukan lagi, banyak akademisi yang belajar pertanian lahan pantai disini.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Idah Faujiati Rosidah dilahirkan di Tasikmalaya pada 12 Juni 1991. Penulis merupakan anak pertama dari pasangan Bapak Ali Syahbana dan Ibu Aisyah. Penulis memiliki 3 orang adik laki-laki. Penulis menamatkan pendidikan Sekolah Dasar Negeri (SDN) Karilkil 2 pada tahun 1998-2004, Madrasah Tsanawiyah Al-Ikhlas Mangkubumi pada tahun 2004-2007, Madrasah Aliyah Swasta Al-Amin Tasikmalaya pada tahun 2007-2010, dan pada tahun 2010 penulis melanjutkan pendidikannya di Perguruan Tinggi Negeri dan diterima di Institut Pertanian Bogor dengan Mayor Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat melalui tes Beasiswa Utusan Daerah Departemen Agama (BUD DEPAG) atau dikenal dengan jalur PBSB (Penerima Beasiswa Santri Berprestasi) karena penulis merupakan santri dari sebuah pondok pesantren AL-Amin pada saat menjalani pendidikan Madrasah Aliyah-nya.

Selama menjalankan perkuliahan, penulis aktif dalam organisasi dan kepanitiaan. Penulis pernah menjadi pengurus Organisasi Mahasiswa Daerah (OMDA) pada tahun 2011, *staff* divisi *Community Development* HIMASIERA pada tahun 2011, menjadi anggota divisi Gizi Masyarakat SAMISAENA pada tahun 2011-2012, sekretaris divisi Informasi dan Komunikasi di CSS MoRA IPB. Selain itu, penulis juga aktif dalam kepanitiaan yang dilaksanakan oleh OMDA dan CSS MoRA IPB. Penulis memiliki minat yang tinggi dalam ilmu sosial dan minat pada matematika sehingga penulis pun pernah menjadi pengajar Pengantar Matematika TPB pada tahun 2011 dan menjadi *staff* di Bimbingan Belajar Gemilang Excellent.